

# KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI JAWA BARAT

TRIWULAN I-2009

KANTOR BANK INDONESIA BANDUNG

Kantor Bank Indonesia Bandung  
Jl. Braga No. 108  
BANDUNG  
Telp : 022 – 4230223  
Fax : 022 – 4214326

**Visi Bank Indonesia**

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

**Misi Bank Indonesia**

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

**Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia**

Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan.

**Visi Kantor Bank Indonesia Bandung**

Menjadi Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di daerah melalui peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang diberikan.

**Misi Kantor Bank Indonesia Bandung**

Berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan pelaksanaan tugas bidang ekonomi moneter, sistem pembayaran, pengawasan bank serta memberikan saran kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.

**Tugas Pokok Bank Indonesia Bandung adalah sebagai berikut :**

1. Memberikan masukan kepada Kantor Pusat tentang kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya;
2. Melaksanakan kegiatan operasional sistem pembayaran tunai dan/atau non tunai sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap perbankan di wilayah kerjanya;
4. Memberikan saran kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian yang akurat;
5. Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung terlaksananya fungsi-fungsi utama.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku “Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Barat Triwulan I-2009” ini akhirnya selesai disusun. Hasil kajian atas perkembangan ekonomi regional Provinsi Jawa Barat pada triwulan tersebut memberi gambaran bahwa gejolak krisis keuangan global yang diikuti dengan resesi dunia semakin memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Jawa Barat.

Setelah mengalami perlambatan pada triwulan sebelumnya, pada triwulan I-2009 perekonomian Jawa Barat diperkirakan masih tumbuh melambat dengan laju sebesar 4,1% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor Jawa Barat seiring dengan menurunnya permintaan negara tujuan utama. Selain itu, investasi juga diperkirakan melambat seiring dengan kelesuan ekonomi global serta sikap *wait and see* dari para investor terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Namun demikian, konsumsi rumah tangga yang membentuk sekitar 65% PDRB Jawa Barat masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Masa persiapan pelaksanaan Pemilu diduga mendorong peningkatan konsumsi. Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh penurunan kinerja sektor industri pengolahan yang cukup dalam, terutama yang berorientasi ekspor. Di lain pihak, sektor pertanian diperkirakan relatif sedikit membaik seiring dengan peningkatan produksi tanaman pangan pada masa panen raya. Sementara itu, sektor perdagangan, hotel, dan restoran diperkirakan juga mengalami pertumbuhan yang lebih baik seiring dengan meningkatnya konsumsi.

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan melemahnya tekanan eksternal (harga komoditas strategis di pasar internasional serta inflasi negara mitra dagang utama) inflasi tahunan Jawa Barat menunjukkan tren penurunan yang cukup dalam, yakni dari 11,11% (yoy) menjadi 7,45%. Penurunan harga BBM yang diikuti dengan penyesuaian tarif angkutan dalam dan luar kota semakin meredam laju inflasi Jawa Barat. Namun demikian, meningkatnya persepsi risiko investor di pasar keuangan menyebabkan kenaikan harga emas di pasar internasional yang selanjutnya memberi tekanan inflasi tahunan kelompok sandang.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2009 diikuti oleh melambatnya penyaluran kredit perbankan Jawa Barat, yakni dari 25,25% (yoy) menjadi 23,40%. Meskipun demikian, persetujuan plafon baru untuk kredit konsumsi tetap mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan maupun tahun sebelumnya. Sementara, dari sisi penghimpunan dana, laju pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni dari 11,54% (yoy) menjadi 20,90%. Hal ini terkait dengan masih tingginya suku bunga perbankan yang mendorong masyarakat cenderung mengalihkan dananya ke deposito. Di sisi lain, risiko kredit berpotensi untuk semakin meningkat seiring dengan masih lesunya kondisi perekonomian.


Sementara, pembiayaan dari sisi keuangan daerah, menunjukkan kinerja yang cukup baik. APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 meningkat sebesar 33,59% dibandingkan dengan tahun 2008. Selama triwulan I-2009, realisasi belanja telah mencapai 4,76% dari anggaran yang sebesar Rp8,26 triliun atau tumbuh sekitar 40% (yoy) dibandingkan realisasi pada triwulan I-2008. Meskipun demikian, sebagian besar realisasi belanja masih digunakan untuk pembayaran gaji pegawai, tunjangan, dan penghasilan lainnya.

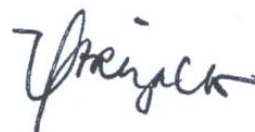
Dari sisi ketenagakerjaan, perlambatan ekonomi telah dirasakan terutama oleh sektor industri pengolahan sehingga beberapa perusahaan terpaksa melakukan rasionalisasi, baik dengan merumahkan sebagian tenaga kerjanya maupun melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan peningkatan seiring dengan tibanya musim panen raya pada triwulan I-2009.

Uraian di atas merupakan hasil analisa kami terhadap berbagai data dan informasi, yang selain berasal dari Bank Indonesia, laporan perbankan, serta hasil-hasil survei yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Bandung, juga kami peroleh dari berbagai pihak, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dinas-dinas terkait, Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Pusat Statistik, Dinas Perhubungan, BULOG Divre III Jawa Barat, serta Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini, perkenankan kiranya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut yang telah membantu penyusunan buku ini.

Kami menyadari bahwa cakupan serta kualitas data dan informasi yang disajikan dalam buku ini masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak yang berkepentingan dengan buku ini. Kiranya kerjasama yang sangat baik dengan berbagai pihak selama ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan melindungi setiap langkah kita.

Bandung, 1 Mei 2009 



Yang Ahmad Rizal  
Pemimpin

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Grafik.....	x
Tabel Indikator Ekonomi Jawa Barat.....	xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	1
BAB 1 KONDISI MAKRO EKONOMI REGIONAL .....	7
1. Sisi Permintaan.....	9
1.1. Konsumsi .....	10
1.2. Investasi .....	13
1.3. Ekspor-Impor .....	17
2. Sisi Penawaran.....	19
2.1. Sektor Pertanian.....	20
2.2. Sektor Industri Pengolahan.....	21
2.3. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran.....	25
2.4. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan .....	26
2.5. Sektor Bangunan .....	27
2.6. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi .....	28
2.7. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih .....	30
2.8. Sektor Jasa-jasa.....	31
Boks 1. Prospek Produksi Pertanian Jawa Barat Tahun 2009.....	32
Boks 2. Perkembangan Kegiatan Usaha Sektor Industri Pengolahan di Jawa Barat .....	34
Boks 3. Langkah-langkah Penguatan dan Perluasan Pasar Produk TPT .....	36
Boks 4. Hasil Survei Dampak Krisis Global Terhadap Perekonomian Jawa Barat .....	37
Boks 5. Hasil Survei Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Bandung .....	39
BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH.....	41
1. Perkembangan Inflasi .....	43
1.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa .....	44
Inflasi Tahunan .....	44
Inflasi Triwulanan.....	46
a. Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.....	47
b. Kelompok Bahan Makanan .....	47
c. Kelompok Makanan Jadi .....	48
d. Kelompok Sandang .....	49
1.2. Inflasi Menurut Kota .....	49
Inflasi Tahunan .....	49
Inflasi Triwulanan.....	50
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi .....	51
2.1 Fundamental.....	52
a. Ekspektasi Inflasi .....	52
b. Eksternal.....	53
c. Interaksi Permintaan dan Penawaran .....	54
2.2 Non Fundamental .....	55
a. Administered Price .....	55
b. Volatile Foods .....	56
Boks 6. Forum Koordinasi pengendalian Inflasi: Tata Niaga Gula Kristal Putih .....	57
BAB 3 PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH .....	59
1. Struktur Perbankan di Jawa Barat .....	61

2. Bank Umum Konvensional .....	62
2.1. Pendanaan dan Risiko Likuiditas .....	62
Perkembangan Dana Pihak Ketiga .....	62
Ekses Likuiditas .....	64
2.2. Perkembangan dan Risiko Kredit .....	64
Perkembangan Kredit .....	64
Kredit Mikro, Kecil dan Menengah (MKM) .....	67
Kredit berdasarkan Lokasi Proyek .....	68
Risiko Kredit .....	68
2.3. Risiko Pasar .....	71
3. Bank Umum Syariah.....	72
4. Bank Umum Konvensional yang Berkantor Pusat di Jawa Barat.....	72
5. Bank Perkreditan Rakyat .....	73
Boks 7. Survei Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan Jawa Barat .....	74
Boks 8. Analisis Risiko Kredit Perbankan di Jawa Barat.....	76
BAB 4 KEUANGAN DAERAH .....	77
1. APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.....	79
2. Pendapatan Daerah.....	81
3. Belanja Daerah .....	82
Boks 9. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Barat .....	85
BAB 5 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN .....	87
1. Pengedaran Uang Kartal .....	89
1.1. Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar ( <i>Inflow/Outflow</i> ) .....	89
1.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar .....	91
1.3. Uang Palsu .....	91
2. Sistem Pembayaran Non Tunai.....	92
2.1. Kliring Lokal .....	92
2.2. <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS).....	92
BAB 6 PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH.....	93
1. Ketenagakerjaan .....	95
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) .....	95
Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).....	97
2. Kesejahteraan.....	99
Kesejahteraan Petani .....	99
BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH .....	101
1. Prospek Ekonomi Makro .....	103
2. Prakiraan Inflasi .....	104
Faktor Fundamental.....	104
Faktor Non Fundamental .....	105
LAMPIRAN.....	107
DAFTAR ISTILAH .....	113



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (yoy) Provinsi Jawa Barat Dari Sisi Permintaan (%) .....	10
Tabel 1.2.	Kontribusi Komponen Sisi Permintaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (yoy) Provinsi Jawa Barat (%).....	10
Tabel 1.3.	Realisasi Investasi di Jawa Barat Menurut Sektor Usaha di Triwulan I-2009.....	14
Tabel 1.4.	Lima Negara dengan Perubahan Nilai Ekspor Terbesar.....	19
Tabel 1.5.	Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Provinsi Jawa Barat Dari Sisi Penawaran (%).....	20
Tabel 1.6.	Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Provinsi Jawa Barat (%).....	20
Tabel 1.7.	Penjualan Mobil Nasional.....	22
Tabel 1.8.	Indikator Perhotelan di Jawa Barat .....	26
Tabel 1.9.	Nilai Tambah Bank Umum di Jawa Barat (Rp Miliar) .....	27
Tabel 1.10.	Perkembangan Persewaan Bangunan.....	27
Tabel 1.11.	Perkembangan Properti Komersial .....	27
Tabel 1.12.	Jumlah Penumpang Kereta Api Daerah Operasi Jawa Barat (Bandung dan Cirebon) (Juta Penumpang).....	28
Tabel 1.13.	Jumlah Kendaraan yang Melintasi 12 Gerbang Tol di Jawa Barat .....	29
Tabel 1.14.	Jumlah Penumpang Domestik dan Internasional di Bandara Husein Sastranegara.....	29
Tabel 1.15.	Pemakaian Listrik di Jawa Barat (Juta Kwh).....	30
Tabel 2.1.	Inflasi Tahunan Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%) .....	45
Tabel 2.2.	Inflasi Triwulanan di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%).....	46
Tabel 2.3.	Inflasi Tahunan di Jawa Barat menurut Kota (%).....	49
Tabel 2.4.	Inflasi Triwulanan di Jawa Barat Menurut Kota (%) .....	50
Tabel 2.5.	Inflasi Triwulanan Jawa Barat Menurut Kota dan Kelompok Barang dan Jasa (qtq,%).....	51
Tabel 3.1.	Jumlah Kredit Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Triwulan I-2009.....	67
Tabel 3.2.	NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/ Kota.....	70
Tabel 3.3.	Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan di Jawa Barat .....	71
Tabel 4.1.	APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009.....	80
Tabel 4.2.	Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 dan 2009.....	82
Tabel 4.3.	PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 s.d 2009.....	82
Tabel 4.4.	Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 dan 2009.....	83
Tabel 4.5.	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Triwulan I-2009.....	84
Tabel 5.1.	Perkembangan <i>Outflow</i> Uang Kertas dan Uang Logam melalui KBI Bandung. ....	90
Tabel 5.2.	Perkembangan Transaksi Kliring Lokal Rata-rata per Bulan di Jawa Barat .....	92
Tabel 5.3.	Perkembangan Transaksi RTGS di Jawa Barat .....	92
Tabel 6.1.	Saldo Bersih Tertimbang Penggunaan Tenaga Kerja di Jawa Barat Triwulan I-2009 .....	96
Tabel 6.2.	Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2009 .....	98
Tabel 6.3.	Nilai Tukar Petani di Jawa Barat Bulan November 2008 dan Februari 2009 (2007 = 100)..	99
Tabel 6.4.	Nilai Tukar Petani per Subsektor di Jawa Barat Bulan November 2008 dan Februari 2009 (2007 = 100) .....	100
Tabel 6.5.	Perbandingan NTP di 5 Provinsi di Pulau Jawa Bulan November 2008 dan Februari 2009 (2007 = 100) .....	100

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat .....	9
Grafik 1.2.	Indeks Keyakinan Konsumen .....	11
Grafik 1.3.	Komponen Indeks Ekspektasi .....	11
Grafik 1.4.	Komponen Indeks Keyakinan Saat Ini.....	11
Grafik 1.5.	Perkembangan Nilai Penjualan Eceran .....	12
Grafik 1.6.	Penjualan Bahan Bakar.....	12
Grafik 1.7.	Penjualan Makanan dan Tembakau .....	12
Grafik 1.8.	Penjualan Bahan Kimia.....	12
Grafik 1.9.	Penjualan Pakaian dan Perlengkapannya.....	12
Grafik 1.10.	Posisi Baki Debet Kredit Konsumsi Bank Umum di Jawa Barat .....	13
Grafik 1.11.	Angka Persetujuan Plafon Kredit Baru untuk Penggunaan Konsumsi oleh Bank Umum di Jawa Barat .....	13
Grafik 1.12.	Relisasi Investasi di Jawa Barat Berdasarkan Nilai Proyek .....	14
Grafik 1.13.	Realisasi Investasi di Jawa Barat Berdasarkan Jumlah Proyek .....	14
Grafik 1.14.	Porsi Realisasi Investasi Berdasarkan Nilai Investasi.....	15
Grafik 1.15.	Porsi Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek .....	15
Grafik 1.16.	Penjualan Semen di Jawa Barat.....	15
Grafik 1.17.	Penjualan Perlengkapan Konstruksi.....	15
Grafik 1.18.	Impor Barang Modal.....	16
Grafik 1.19.	Impor Barang Modal Utama.....	16
Grafik 1.20.	Posisi Penyaluran Kredit Investasi oleh Bank Umum di Jawa Barat.....	16
Grafik 1.21.	Angka Persetujuan Plafon untuk Penggunaan Investasi oleh Bank Umum di Jawa Barat....	16
Grafik 1.22.	Nilai dan Volume Ekspor Jawa Barat .....	18
Grafik 1.23.	Nilai dan Volume Impor Jawa Barat.....	18
Grafik 1.24.	Nilai dan Volume Ekspor Mesin dan Pesawat Mekanik, Perlengkapan Elektronik dan Bagiannya .....	18
Grafik 1.25.	Nilai dan Volume Ekspor Tekstil dan Barang dari Tesktil.....	18
Grafik 1.26.	Nilai dan Volume Impor Mesin dan Pesawat Mekanik, Perlengkapan Elektronik dan Bagiannya .....	18
Grafik 1.27.	Nilai dan Volume Impor Kendaraan, Pesawat Terbang, Kendaraan dan Perlengkapannya .	18
Grafik 1.28.	Nilai Ekspor Jawa Barat Berdasarkan Negara Tujuan .....	19
Grafik 1.29.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Pertanian .....	21
Grafik 1.30.	Utilisasi Kapasitas Industri Pengolahan.....	22
Grafik 1.31.	Realisasi Kegiatan usaha dan Indikator Volume Produksi Industri Pengolahan .....	22
Grafik 1.32.	Nilai dan Volume Ekspor Mesin dan Pesawat Mekanik, Perlengkapan Elektronik dan Bagiannya Serta Kendaraan, Pesawat Terbang, Kendaraan dan Perlengkapannya .....	23
Grafik 1.33.	Nilai dan Volume Ekspor Produk Tekstil dan Barang dari Tesktil serta Alas Kaki, Tutup Kepala, Payung dan Bunga Tiruan.....	25
Grafik 1.34.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Industri Pengolahan .....	25
Grafik 1.35.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.....	26
Grafik 1.36.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Konstruksi .....	28
Grafik 1.37.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Pengangkutan dan Komunikasi .....	29
Grafik 1.38.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih....	30
Grafik 1.39.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Jasa Dunia Usaha dan Sosial.	31
Grafik 2.1.	Inflasi Tahunan Jawa Barat dan Nasional .....	43
Grafik 2.2.	Inflasi Triwulanan Jawa Barat dan Nasional .....	43
Grafik 2.3.	Inflasi Bulanan Jawa Barat dan Nasional.....	44
Grafik 2.4.	Inflasi Tahunan dan Andil Inflasi Tahun Berjalan Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan I-2009 .....	45

Grafik 2.5.	Inflasi dan Andil Inflasi Jawa Barat triwulanan Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan I-2009.....	46
Grafik 2.6.	Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan dan Jawa Barat..	47
Grafik 2.7.	Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan dan Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan I-2009 .....	47
Grafik 2.8.	Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Jawa Barat .....	48
Grafik 2.9.	Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan I-2009 .....	48
Grafik 2.10.	Inflasi triwulanan Kelompok Makanan Jadi di Jawa Barat.....	48
Grafik 2.11.	Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan I-2009.....	48
Grafik 2.12.	Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Jawa Barat.....	49
Grafik 2.13.	Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan I-2009 .....	49
Grafik 2.14.	Inflasi dan Andil Inflasi Tahunan di Jawa Barat Menurut Kota Triwulan I-2009.....	50
Grafik 2.15.	Inflasi dan Andil Inflasi Triwulanan di Jawa Barat Menurut Kota Triwulan I-2009.....	50
Grafik 2.16.	Perkembangan Harga Barang dan Jasa Menurut Pengusaha di Jawa Barat.....	52
Grafik 2.17.	Ekspektasi Pedagang Eceran Terhadap Harga Barang dan jasa di Kota Bandung .....	52
Grafik 2.18.	Ekspektasi Konsumen Terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Bandung.....	53
Grafik 2.19.	Laju Inflasi di Negara Mitra dagang .....	53
Grafik 2.20.	Perkembangan Harga Komoditas Strategis di Pasar Internasional.....	53
Grafik 2.21.	Penghasilan Konsumen di Kota Bandung .....	54
Grafik 2.22.	Nilai Impor dan Realisasi kredit Konsumsi di Jawa Barat .....	54
Grafik 2.23.	Kapasitas Terpakai dan Persediaan Industri di Jawa Barat.....	54
Grafik 2.24.	Pergerakan Harga Minyak WTI (World Texas Intermediate) .....	55
Grafik 2.25.	Perkembangan Harga Komoditas-Komoditas Strategis.....	56
Grafik 2.26.	Penyerapan Beras Miskin oleh Bulog Jawa Barat.....	56
Grafik 3.1.	Komposisi Aset Perbankan di Jawa Barat Triwulan I-2009.....	61
Grafik 3.2.	Perkembangan DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Jenis Simpanan .....	62
Grafik 3.3.	Perkembangan DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Jenis Valuta ...	63
Grafik 3.4.	Perkembangan DPK Valuta Asing & Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD .....	63
Grafik 3.5.	Perkembangan DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Kelompok Bank .....	63
Grafik 3.6.	DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Triwulan I-2009 berdasarkan Golongan Kepemilikan .....	63
Grafik 3.7.	Perkembangan SBI Bank Umum Konvensional di Jawa Barat dan SBI Perbankan Nasional.....	64
Grafik 3.8.	Perkembangan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat .....	64
Grafik 3.9.	Perkembangan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan.....	65
Grafik 3.10.	Perkembangan Pertumbuhan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan.....	65
Grafik 3.11.	Pangsa Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Sektor Ekonomi Triwulan I-2009 .....	65
Grafik 3.12.	Perkembangan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank.....	66
Grafik 3.13.	Perkembangan Pertumbuhan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank.....	66
Grafik 3.14.	Perkembangan Persetujuan Plafon Kredit Baru Bank Umum Konvensional di Jawa Barat .	66
Grafik 3.15.	Perkembangan Kredit MKM Berdasarkan Skala Usaha .....	67
Grafik 3.16.	Perkembangan Kredit MKM Berdasarkan Jenis Penggunaan.....	67
Grafik 3.17.	Perkembangan Kredit Lokasi Proyek dan Kredit Bank Pelapor.....	68
Grafik 3.18.	Perkembangan Jumlah Kredit Bermasalah Bank Umum Konvensional di Jawa Barat.....	68
Grafik 3.19.	Perkembangan NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank.....	69

Grafik 3.20.	Perkembangan NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan .....	69
Grafik 3.21.	Perkembangan NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Beberapa Sektor Ekonomi Utama.....	70
Grafik 3.22.	Perkembangan NPL Gross Kredit MKM dan Total Kredit.....	71
Grafik 3.23.	Perkembangan Bank Umum Syariah Di Jawa Barat.....	72
Grafik 3.24.	Perkembangan Bank yang Berkantor Pusat di Wilayah KBI Bandung.....	72
Grafik 3.25.	Perkembangan BPR di Provinsi Jawa Barat.....	73
Grafik 5.1.	Perkembangan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i> Uang Kartal di Jawa Barat .....	90
Grafik 5.2.	Perkembangan PTTB Kantor Bank Indonesia Bandung.....	91
Grafik 6.1.	Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat (SB / %).....	97
Grafik 7.1.	Ekspektasi Kegiatan Dunia Usaha.....	103
Grafik 7.2.	Indikator Penghasilan Saati ini.....	103
Grafik 7.3.	Perkembangan Harga Komoditas Strategis di Pasar internasional.....	105
Grafik 7.4.	Ekspektasi Pedagang Eceran Terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Bandung.....	105

# TABEL INDIKATOR EKONOMI JAWA BARAT

## I. MAKRO

INDIKATOR	2008				2009
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I*
PDRB - harga konstan (Rp Miliar)*	70.310	71.012	74.380	74.020	73.200
- Pertanian	11.012	8.227	9.050	8.100	10.307
- Pertambangan & Penggalian	1.532	1.530	1.730	1.720	1.753
- Industri Pengolahan	30.932	33.487	34.260	35.080	33.460
- Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.515	1.476	1.495	1.540	1.567
- Bangunan	2.242	2.269	2.618	2.600	2.432
- Perdagangan, Hotel, dan Restoran	13.368	14.038	14.824	14.710	13.670
- Pengangkutan dan Komunikasi	2.933	3.050	3.155	3.100	3.071
- Keuangan, Persewaan, dan Jasa	2.087	2.255	2.425	2.310	2.233
- Jasa	4.688	4.680	4.822	4.870	4.706
Pertumbuhan PDRB (yoy %)	7,3	4,2	6,8	4,5	4,1
Ekspor-Impor**	1.688,88	2.140,62	3.143,58	2.430,58	1.848,19
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)	4.729,71	5.040,62	5.505,69	5.057,99	2.674,20
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)	2.013,26	1.925,68	2.007,70	1.767,00	907,17
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	3.040,83	2.900,00	2.362,11	2.627,41	826,01
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	890,20	789,00	448,87	621,75	155,66
Indeks Harga Konsumen***	160,63	167,71	113,37	113,54	113,54
- Kota Bandung	162,40	171,84	112,78	112,70	112,82
- Kota Bekasi	157,67	163,95	112,68	112,71	118,25
- Kota Bogor	162,46	167,13	115,47	116,00	116,92
- Kota Sukabumi	155,98	161,74	112,83	114,32	116,23
- Kota Cirebon	154,52	161,94	116,96	117,18	118,25
- Kota Tasikmalaya	169,34	177,24	113,68	115,07	115,97
- Kota Depok	NA	NA	113,70	113,91	112,92
Laju Inflasi Tahunan (yoy %)***	6,88	11,83	12,30	11,11	7,45
- Kota Bandung	7,00	13,52	10,31	10,23	6,31
- Kota Bekasi	6,62	11,17	10,07	10,10	6,68
- Kota Bogor	6,58	9,61	13,67	14,20	6,17
- Kota Sukabumi	7,09	12,03	9,94	11,39	8,25
- Kota Cirebon	8,17	13,19	13,93	14,14	8,22
- Kota Tasikmalaya	6,52	11,53	10,71	12,07	9,18
- Kota Depok	N/A	N/A	11,49	11,70	N/A

Keterangan:

\* Proyeksi KBI Bandung

\*\* Data Ekspor-Impor Triwulan I-2009 adalah data bulan Januari s.d. Februari 2009

\*\* Data IHK Triwulan I-2009 menggunakan Tahun Dasar 2007

## II. PERBANKAN

No	Indikator	2007	2008				2009
		Tw. IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I
<b>A Bank Umum</b>							
1	Total Aset (Rp Triliun)	136,39	133,59	139,72	145,03	154,91	162,80
2	DPK (Rp Triliun)	105,57	101,76	105,98	107,03	117,76	123,03
	- Tabungan (Rp Triliun)	37,78	36,58	39,44	39,94	42,09	41,63
	- Giro (Rp Triliun)	22,03	22,25	23,01	21,88	22,99	27,48
	- Deposito (Rp Triliun)	45,77	42,93	43,53	45,22	52,68	53,91
3	Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi proyek*)	122,52	127,22	140,15	151,22	161,93	162,54
	- Investasi	19,19	19,39	20,79	22,68	25,01	25,48
	- Modal Kerja	56,22	58,13	65,04	70,37	77,04	76,74
	- Konsumsi	47,11	49,70	54,32	58,18	59,87	60,32
4	Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi kantor cabang	69,74	70,98	77,92	82,86	87,35	87,58
	- Modal Kerja	29,98	30,36	34,31	36,97	39,95	39,39
	- Investasi	7,3	7,39	8,08	8,69	9,22	9,18
	- Konsumsi	32,46	33,22	35,53	37,20	38,18	39,02
5	- LDR (%)	66,06	69,75	73,52	77,42	74,18	71,19
6	Rasio NPL Gross (%)	3,44	3,78	3,63	3,57	3,52	3,99
7	Rasio NPL Net (%)	1,66	2,06	1,72	1,5	1,43	1,63
8	Kredit MKM (triliun Rp)	54,76	55,82	60,77	63,85	65,27	66,18
9	Kredit Mikro (< Rp50 juta) (triliun Rp)	24,16	24,18	25,26	26,28	26,14	26,49
	- Kredit Modal Kerja	2,99	3,27	3,76	4,22	4,21	4,48
	- Kredit Investasi	0,59	0,41	0,48	0,45	0,45	0,46
	- Kredit Konsumsi	20,58	20,50	21,02	21,61	21,47	21,56
10	Kredit Kecil (Rp50 juta s.d. Rp 500 juta) (triliun Rp)	15,56	16,38	18,61	20,19	21,33	22,04
	- Kredit Modal Kerja	5,17	5,31	5,87	6,25	6,36	6,39
	- Kredit Investasi	0,87	0,82	0,88	0,96	0,98	0,99
	- Kredit Konsumsi	9,52	10,25	11,85	12,98	13,99	14,66
11	Kredit Menengah (Rp500 juta s.d.Rp5 miliar) (triliun Rp)	15,04	15,26	16,90	17,37	17,81	17,65
	- Kredit Modal Kerja	10,78	10,84	12,07	12,38	12,76	12,66
	- Kredit Investasi	2,16	2,22	2,46	2,66	2,73	2,73
	- Kredit Konsumsi	2,1	2,20	2,38	2,33	2,31	2,26
12	Total Kredit MKM (triliun Rp)	54,76	55,82	60,77	63,85	65,27	66,18
13	Rasio NPL MKM gross (%)	3,41	3,71	3,55	3,32	3,06	3,69
<b>B Bank Umum Syariah</b>							
1	Total Aset (Rp Triliun)	4,07	4,05	4,73	4,91	5,52	5,23
2	DPK (Rp Triliun)	3,14	3,19	3,73	3,65	3,97	4,09
	- Giro (Rp Triliun)	0,28	0,26	0,44	0,32	0,38	0,33
	- Deposito (Rp Triliun)	1,35	1,47	1,62	1,63	1,82	1,87
	- Tabungan (Rp Triliun)	1,52	1,46	1,66	1,71	1,79	1,89
3	Pembiayaan (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi kantor cabang	2,84	2,95	3,07	3,37	3,43	3,41
	- Modal Kerja	1,65	1,67	1,75	1,86	1,81	1,86
	- Investasi	0,63	0,57	0,52	0,57	0,61	0,54
	- Konsumsi	0,56	0,75	0,80	0,93	1,00	1,01
4	- FDR	90,34	92,34	82,28	92,21	86,26	86,26
<b>C BPR</b>							
1	Total Aset (Rp Triliun)	4,82	5,00	5,29	5,71	5,86	6,21
2	DPK (Rp Triliun)	3,31	3,52	3,64	3,88	4,03	4,40
	- Tabungan (Rp Triliun)	0,74	0,78	0,83	0,79	0,90	0,96
	- Deposito (Rp Triliun)	2,57	2,74	2,81	3,09	3,13	3,44
3	Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi proyek	2,86	3,68	4,07	4,43	4,40	4,49
	- Modal Kerja	1,62	2,06	2,22	2,46	2,43	2,42
	- Investasi	0,15	0,15	0,15	0,16	0,15	0,14
	- Konsumsi	1,10	1,47	1,70	1,80	1,82	1,93
4	Kredit MKM (triliun Rp)	2,86	3,68	4,07	4,43	4,40	4,49

\*) Posisi Februari 2009

### III. SISTEM PEMBAYARAN

Indikator	2008				2009
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I
<b>Transaksi Tunai</b>					
Posisi Kas Gabungan (Rp Triliun)	3,66	1,90	0,95	3,11	5,77
Inflow (Rp Triliun)	1,43	2,72	4,75	5,68	7,02
Outflow (Rp Triliun)	3,66	1,54	3,75	2,03	0,81
Pemusnahan Uang (Jutaan lembar/keping)	146,69	127,22	114,05	155,88	118,24
<b>Transaksi Non Tunai</b>					
<b>BI-RTGS</b>					
Nominal Transaksi BI-RTGS (Rp Triliun)	155,09	143,79	140,44	156,30	130,57
Volume Transaksi BI-RTGS	198.876	188.469	164.434	217.398	188.863
Rata-rata Harian Nominal Transaksi BI-RTGS (Rp Triliun)	2,63	2,44	2,27	2,69	2,18
Rata-rata Harian Volume Transaksi BI-RTGS	3.371	3.194	2.652	3.748	3.148
<b>Kliring</b>					
Nominal Perputaran Kliring (triliun Rp)	9,60	10,23	11,48	10,93	9,94
Volume Perputaran Kliring	506.234	516.866	544.327	479.764	504.311
Rata-rata Harian Nominal Perputaran Kliring (triliun Rp)	0,16	0,16	0,19	0,19	0,17
Rata-rata Harian Volume Perputaran Kliring	8.580	8.204	8.779	8.272	8.405

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



# RINGKASAN EKSEKUTIF

## PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

*Ekonomi Jawa Barat triwulan I-2009 diperkirakan tumbuh 4,1% (yoy).*

Gejolak krisis keuangan global yang diikuti dengan resesi dunia diperkirakan semakin memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Jawa Barat. Setelah mengalami perlambatan pada triwulan IV-2008, perekonomian Jawa Barat diperkirakan tumbuh semakin lambat di awal tahun 2009, dengan laju sebesar 4,1% (yoy) pada triwulan I-2009.

*Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terutama dipicu oleh melambatnya investasi dan penurunan kinerja ekspor.*

Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor Jawa Barat yang sangat dalam. Ekspor Jawa Barat diperkirakan menurun cukup tajam seiring dengan pelemahan permintaan negara tujuan ekspor akibat merosotnya pertumbuhan ekonomi negara-negara utama tujuan ekspor. Selain itu, investasi melambat karena para investor masih menunggu situasi politik dan keamanan pasca penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Namun demikian, Pemilu merupakan salah satu stimulus pertumbuhan konsumsi rumah tangga, yang membentuk sekitar 65% PDRB Jawa Barat.

*Dari sisi penawaran, perlambatan terjadi pada sektor dominan di Jawa Barat, yaitu sektor industri pengolahan.*

Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh perlambatan pada sektor ekonomi dominan di Jawa Barat, yaitu sektor industri pengolahan. Perlambatan terutama terjadi pada industri berorientasi ekspor (seperti subsektor alat angkutan, mesin, dan peralatannya, serta subsektor tekstil, barang kulit, dan alas kaki) akibat pelemahan daya beli masyarakat internasional. Sementara itu, kinerja sektor pertanian diperkirakan relatif membaik seiring dengan masuknya masa panen raya padi di Jawa Barat disertai perkiraan peningkatan luas panen dan produktivitasnya. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran diperkirakan masih tumbuh positif, yang didorong oleh konsumsi dalam penyelenggaraan kampanye Pemilu Legislatif.

## PERKEMBANGAN INFLASI

*Inflasi tahunan Jawa Barat pada triwulan I-2009 menurun cukup tajam*

Inflasi tahunan Jawa Barat pada triwulan I-2009 turun drastis dari 11,11% menjadi 7,45% (yoy), sementara secara triwulanan, Jawa Barat tidak mengalami inflasi (0%) atau harga barang dan jasa tetap stabil.

*Faktor penyebab penurunan inflasi tahunan adalah berkurangnya tekanan imported inflation*

Penyebab utama penurunan inflasi tahunan Jawa Barat adalah faktor eksternal. Harga komoditas seperti minyak bumi, kedelai, gandum, dan kelapa sawit di pasar internasional yang selama semester I-2008 mengalami kenaikan cukup drastis telah turun pada triwulan I-2009 sehingga melemahkan tekanan inflasi secara tahunan (*baseline effect*). Dari tujuh kelompok pembentuk inflasi, hanya inflasi tahunan kelompok sandang yang mengalami kenaikan. Meskipun tekanan inflasi kelompok tersebut meningkat, besarnya bobot IHK kelompok bahan makanan masih menempatkan kelompok bahan makanan sebagai penyumbang inflasi tertinggi. Jika dilihat dari tujuh kota penyumbang inflasi di Jawa Barat, andil inflasi Kota Bekasi dan Bandung masih tetap yang tertinggi, meskipun laju inflasi tahunan semua kota mengalami penurunan.

*Secara triwulanan, peningkatan tekanan faktor eksternal serta volatile foods dapat diimbangi oleh turunnya*

Pada triwulan I-2009, Jawa Barat tidak mengalami inflasi secara triwulanan akibat berimbangannya tekanan inflasi di lima kelompok dengan deflasi yang terjadi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan serta perumahan, air, listrik, gas, dan air bersih. Kelompok sandang mengalami inflasi yang cukup tinggi karena

administered price dan  
ekspektasi inflasi

kenaikan harga emas di pasar internasional yang menjadi acuan oleh pedagang emas di Jawa Barat. Harga beberapa komoditas di pasar internasional seperti CPO, gula, dan kedelai mengalami *rebound* setelah berada pada titik terendah di triwulan IV-2008. Adapun, tekanan inflasi kelompok bahan makanan seperti sayur-sayuran; ikan segar; dan padi-padian, umbi-umbian, serta hasil-hasilnya masih tinggi karena gangguan cuaca. Pelemahan tekanan inflasi terutama disebabkan oleh penurunan harga BBM yang disertai dengan penyesuaian tarif angkutan dalam dan luar kota. Penurunan tersebut menyebabkan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi cukup tinggi. Di samping itu, ekspektasi inflasi yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya turut menyumbangkan pelemahan tekanan inflasi.

## PERKEMBANGAN PERBANKAN

Perkembangan perbankan  
di Jawa Barat masih tetap  
tumbuh.

Secara umum, perkembangan perbankan di Jawa Barat pada triwulan I-2009 masih tetap tumbuh di tengah tekanan yang berasal dari dampak krisis keuangan global. Secara tahunan, beberapa indikator utama perbankan seperti total aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, sedangkan pertumbuhan *outstanding* kredit mengalami perlambatan. Secara triwulanan (qtq), aset, DPK maupun *outstanding* kredit tumbuh melambat. Dengan kondisi tersebut, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan di Jawa Barat sedikit mengalami penurunan. Di sisi lain, seiring dengan semakin melesunya perekonomian, risiko kredit bermasalah (NPL) perbankan di Jawa Barat semakin meningkat. Sementara itu, eksekusi likuiditas berupa penempatan bank pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus menunjukkan peningkatan seiring dengan melambatnya penyaluran kredit.

Aset perbankan Jawa  
Barat tumbuh 5,02% (qtq)  
atau 22,06% (yoy).

Aset perbankan Jawa Barat pada triwulan I-2009 tumbuh 5,02% (qtq) atau 22,06% (yoy) mencapai Rp173,12 triliun. Sebagian besar aset perbankan (94,04%) di Jawa Barat merupakan aset bank umum konvensional.

DPK tumbuh tumbuh lebih  
tinggi dibandingkan  
triwulan sebelumnya

Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan di Jawa Barat pada triwulan I-2009 mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara tahunan, DPK tumbuh 20,90% menjadi Rp123,03 triliun atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 11,54%. Sementara itu, secara triwulanan, DPK tumbuh 4,48% atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (10,02%). Tingginya pertumbuhan DPK pada triwulan laporan diperkirakan sebagai akibat dari masih tingginya suku bunga simpanan terutama deposito terkait masih tertekannya likuiditas perbankan.

Kredit yang disalurkan  
tumbuh melambat  
dibandingkan triwulan  
sebelumnya

Pertumbuhan kredit yang disalurkan bank umum konvensional di Jawa Barat pada triwulan I-2009 mengalami perlambatan seiring dengan meningkatnya tekanan karena memburuknya perekonomian. Pertumbuhan *outstanding* kredit yang disalurkan sampai dengan posisi Maret 2009 tumbuh 0,27% (qtq) atau 23,40% (yoy) menjadi Rp87,58 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV-2009 yang mencapai 5,41% (qtq) atau 25,25% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit diindikasikan terkait dengan kebijakan kredit perbankan yang lebih ketat seiring dengan masih tingginya persepsi risiko kredit.

Perkembangan tujuh bank  
umum yang berkantor  
pusat di Jawa Barat terus

Perkembangan tujuh bank umum konvensional yang berkantor pusat di Jawa Barat tetap menunjukkan peningkatan. Aset ketujuh bank tersebut tumbuh 13,36% (qtq) atau 27,07% (yoy) mencapai Rp52,74 triliun.

*meningkat.* Kredit tumbuh sebesar 3,28% (qtq) atau 28,39% (yoy) mencapai Rp32,09 triliun. Sementara itu, DPK tumbuh sebesar 23,19% (qtq), atau 27,56% (yoy) menjadi Rp43,17 triliun. Beberapa indikator kinerja bank lainnya seperti rasio efisiensi antara biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO), *net interest income* (NII) dan *return on asset* (ROA) bank-bank tersebut masih menunjukkan perkembangan yang baik dengan risiko kredit masih tetap rendah dan terkendali.

## PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

*Transaksi sistem pembayaran perkembangan yang bervariasi.*

Kegiatan sistem pembayaran di Jawa Barat pada triwulan I-2009 menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Jumlah aliran uang masuk (*inflow*) ke Kantor Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat, meningkat 23,57% (qtq) menjadi Rp7,02 triliun, sebaliknya jumlah aliran uang keluar (*outflow*) turun 60,08% menjadi Rp0,81 triliun. Sementara itu, untuk transaksi kliring, rata-rata nominal per bulan turun 9,00% (qtq) menjadi Rp9,94 triliun, namun rata-rata volume transaksi per bulan meningkat 5,12% menjadi 504.311 warkat. Di sisi lain, rata-rata nominal dan volume transaksi pembayaran melalui BI-RTGS per bulan turun masing-masing sebesar 16,46% (qtq) menjadi Rp43,52 triliun dan 13,13% menjadi sebanyak 62.954 transaksi.

## PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

*APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 meningkat sebesar Rp1,07 triliun atau 33,59%*

Pemerintah daerah Jawa Barat menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan mempercepat pengesahan APBD tahun 2009 yang mayoritas pada bulan Januari 2009. Percepatan pengesahan APBD Provinsi Jawa Barat disertai dengan peningkatan anggaran menjadi sebesar Rp8,26 triliun. Peningkatan anggaran tersebut terutama dialokasikan untuk belanja langsung.

*Realisasi belanja pada triwulan I-2009 meningkat lebih tinggi dibandingkan realisasi pada triwulan I-2008*

Dengan peningkatan jumlah belanja serta percepatan pengesahan APBD, pemerintah daerah Jawa Barat mencatat realisasi sebesar 4,76% atau Rp393,40 miliar atau lebih besar 40,08% dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, mayoritas realisasi belanja masih digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, serta penghasilan lainnya kepada PNS.

*Pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagian besar bersumber dari PAD*

Penerimaan pemerintah daerah mengalami peningkatan terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Provinsi Jawa Barat sebagian besar disumbangkan oleh bea balik nama kendaraan, dan pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, realisasi pendapatan diperkirakan akan lebih tinggi setelah membaiknya konsumsi rumah tangga pada triwulan-triwulan ke depan.

## PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

*Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat menunjukkan kinerja yang relatif menurun*

Krisis keuangan global telah menyebabkan peningkatan gelombang PHK di Jawa Barat. Memburuknya ketenagakerjaan terutama dirasakan pada industri TPT di beberapa daerah industri. Namun demikian, sektor pertanian, pertambangan, jasa-jasa, serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa keuangan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja pada triwulan berikutnya seperti yang diindikasikan oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha.

*Kesejahteraan petani*

Dari sisi kesejahteraan, tingkat kesejahteraan petani Jawa Barat pada

*meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya*

triwulan I-2009 cenderung membaik terutama yang disebabkan oleh masuknya musim panen padi pada beberapa daerah di Jawa Barat. Kondisi ini tercermin pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat sejak triwulan IV-2008. Peningkatan tersebut terjadi hampir di seluruh subsektor pertanian, kecuali di subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat.

## PROSPEK PEREKONOMIAN

*Perekonomian Jawa Barat triwulan II-2009 diperkirakan tumbuh melambat, berkisar antara 3,6%-4,4% (yoy).*

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan II-2009 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan pada triwulan I-2009, yakni berkisar antara 3,6% hingga 4,4% (yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan masih didukung oleh komponen konsumsi swasta dan investasi. Konsumsi diperkirakan meningkat sebagai dampak positif Pemilu Legislatif pada awal triwulan I-2009 dan masa persiapan penyelenggaraan akan dilangsungkannya Pemilu Presiden pada awal triwulan III-2009; kenaikan gaji pokok para Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan Polri; serta pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun di sisi lain, kinerja ekspor diperkirakan masih belum membaik, sebagai dampak belum membaiknya kondisi perekonomian global. Sementara itu, respons di sisi penawaran masih diwarnai oleh perlambatan di sektor industri pengolahan. Walaupun demikian, peningkatan kinerja sektor pertanian seiring masa panen raya diperkirakan dapat meredam perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

*Inflasi pada triwulan II-2009 diperkirakan akan semakin melambat, meskipun secara triwulanan akan mengalami peningkatan*

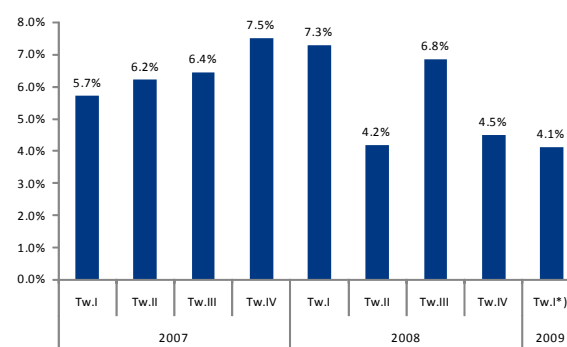
Pelembahan tekanan inflasi Jawa Barat diperkirakan masih akan berlanjut pada triwulan II-2009 berkisar antara 3,6% hingga 4,6% (yoy), meskipun secara triwulanan akan meningkat, yakni berkisar antara 0,55% hingga 1,05% (qtoq). Faktor eksternal diduga masih merupakan penyebab utama atas perlambatan inflasi. Sementara itu, tekanan inflasi secara triwulanan diperkirakan bersumber dari kenaikan harga komoditas strategis di pasar internasional meskipun dengan laju peningkatan yang relatif kecil. Dari sisi *volatile foods*, harga beberapa komoditas kelompok bahan makanan seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah diperkirakan akan mengalami kenaikan seperti yang diindikasikan oleh Survei Pemantauan Harga Mingguan di Kota Bandung.

BAB 1

KONDISI  
MAKRO EKONOMI REGIONAL

Gejolak krisis keuangan global yang diikuti dengan resesi dunia diperkirakan telah mempengaruhi perkembangan ekonomi Jawa Barat sejak triwulan IV-2008. Dampak negatif tersebut semakin terasa di awal tahun 2009, yang ditunjukkan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 4,1% (yoy) pada triwulan I-2009, melambat dibandingkan dengan triwulan IV-2008 yang sebesar 4,5% (yoy).

**Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat  
\*) Proyeksi KBI Bandung

**Dari sisi permintaan, perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor-impor Jawa Barat yang sangat dalam.** Ekspor Jawa Barat diperkirakan menurun cukup tajam seiring dengan merosotnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara utama tujuan ekspor. Selain itu, investasi melambat karena masih lesunya kondisi perekonomian global dan sikap para investor yang masih menunggu situasi pasca penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih tumbuh positif, sebagai dampak positif Pemilu.

**Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh perlambatan pada sektor ekonomi dominan di Jawa Barat, yaitu sektor industri pengolahan.** Pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami perlambatan terutama terjadi pada industri berorientasi ekspor (seperti subsektor alat angkutan, mesin, dan peralatannya, serta subsektor tekstil, barang kulit, dan alas kaki) akibat pelemahan daya beli masyarakat internasional. Sementara itu, kinerja sektor pertanian diperkirakan mengalami peningkatan, seiring dengan masuknya masa panen raya di Jawa Barat.

## 1. SISI PERMINTAAN

**Perekonomian Jawa Barat pada triwulan I-2009 diperkirakan tumbuh 4,1% (yoy), terutama masih ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga (Tabel 1.1).** Peningkatan konsumsi rumah tangga di Jawa Barat didorong oleh tingginya aktivitas kampanye pada triwulan tersebut menjelang Pemilu Legislatif yang berlangsung pada awal April 2009. Selain itu, tren perlambatan inflasi akibat penurunan harga BBM juga telah menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Sementara itu, investasi diperkirakan mengalami perlambatan, karena para investor yang masih menunggu situasi politik dan keamanan pasca Pemilu. Selain itu, kondisi perekonomian global yang masih lesu juga turut mengakibatkan perlambatan tersebut, terkait dengan porsi PMA yang sangat besar terhadap investasi di Jawa Barat. Kinerja ekspor Jawa Barat diperkirakan mengalami penurunan, sebagai dampak pelemahan daya beli masyarakat internasional, yang selanjutnya mendorong penurunan impor.

**Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (yoy) Provinsi Jawa Barat Dari Sisi Permintaan (%)**

Jenis Penggunaan	2007				2007	2008				2008*)	2009 Tw.I**)
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV		Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV		
Konsumsi Rumah Tangga	5,2%	8,1%	5,2%	6,3%	6,2%	7,9%	3,7%	7,2%	4,3%	5,8%	4,9%
Konsumsi Pemerintah	-12,5%	5,8%	-3,2%	25,9%	4,9%	-2,9%	-8,1%	9,3%	5,0%	1,3%	7,3%
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	6,0%	4,9%	10,0%	8,9%	7,5%	10,4%	9,5%	7,8%	7,9%	8,9%	4,6%
Perubahan Inventori	3,7%	-20,6%	6,5%	-40,9%	-13,9%	2,5%	3,1%	-3,1%	61,8%	11,3%	2,2%
Deskrepansi Statistik	-321,4%	-39,4%	-201,7%	-123,1%	-55,6%	-171,3%	-428,1%	-147,7%	254,8%	-433,5%	-100,0%
Ekspor barang dan jasa	8,2%	3,0%	2,7%	-16,6%	-1,1%	-14,2%	-18,3%	-17,1%	-8,4%	-14,7%	-15,7%
Dikurangi impor barang dan jasa	-6,0%	3,3%	9,3%	-16,7%	-3,1%	-5,5%	-18,4%	-27,3%	-3,9%	-14,2%	-24,1%
<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	<b>5,7%</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>7,5%</b>	<b>6,5%</b>	<b>7,3%</b>	<b>4,2%</b>	<b>6,8%</b>	<b>4,5%</b>	<b>5,7%</b>	<b>4,1%</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

\*) Angka Sementara

\*\*\*) Proyeksi KBI Bandung

**Tabel 1.2. Kontribusi Komponen Sisi Permintaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (yoy) Provinsi Jawa Barat (%)**

Jenis Penggunaan	2007				2007	2008				2008*)	2009 Tw.I**)
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV		Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV		
Konsumsi Rumah Tangga	3,4%	5,2%	3,3%	4,2%	4,0%	5,2%	2,4%	4,6%	2,8%	3,7%	3,2%
Konsumsi Pemerintah	-0,8%	0,4%	-0,2%	1,8%	0,3%	-0,2%	-0,5%	0,6%	0,4%	0,1%	0,3%
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	1,0%	0,8%	1,7%	1,5%	1,3%	1,8%	1,6%	1,4%	1,4%	1,5%	0,8%
Perubahan Inventori	0,1%	-0,7%	0,2%	-1,2%	-0,4%	0,1%	0,1%	-0,1%	1,0%	0,3%	0,1%
Deskrepansi Statistik	-5,2%	0,4%	3,9%	2,6%	0,5%	5,8%	2,3%	-2,7%	1,2%	1,6%	-2,3%
Ekspor barang dan jasa	4,4%	1,6%	1,4%	-9,5%	-0,6%	-7,7%	-9,6%	-8,7%	-3,7%	-7,4%	-6,9%
Dikurangi impor barang dan jasa	2,8%	-1,5%	-3,9%	8,1%	1,4%	2,3%	7,9%	11,7%	1,4%	5,9%	8,8%
<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	<b>5,7%</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>7,5%</b>	<b>6,5%</b>	<b>7,3%</b>	<b>4,2%</b>	<b>6,8%</b>	<b>4,5%</b>	<b>5,7%</b>	<b>4,1%</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

\*) Angka Sementara

\*\*\*) Proyeksi KBI Bandung

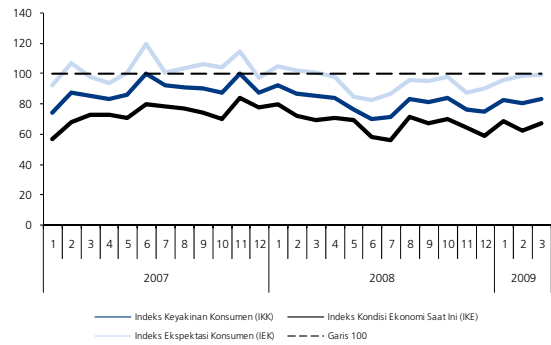
## 1.1. Konsumsi

Konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2009 diperkirakan tumbuh 4,9% (yoy), dan memberikan kontribusi terbesar (3,2%) terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat (lihat Tabel 1.1). Dengan laju pertumbuhan tersebut, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan IV-2008, namun masih lebih lemah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I-2008. Peningkatan konsumsi rumah tangga didorong oleh dua faktor. *Pertama*, penyelenggaraan Pemilu Legislatif pada awal April 2009. Biaya yang dikeluarkan partai-partai dan para calon anggota legislatif dalam aktivitas kampanye, meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kenaikan pendapatan ini akan mendorong masyarakat dalam melakukan konsumsi. *Kedua*, tren perlambatan inflasi tahunan (yoy), sebagai dampak positif penurunan harga BBM bersubsidi sehingga menjaga stabilitas daya beli masyarakat.



Peningkatan konsumsi rumah tangga antara lain tercermin dari menguatnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari hasil Survei Konsumen bulan Maret 2009 yang dilakukan oleh KBI Bandung. Indeks Keyakinan Konsumen meningkat dari 75,00 pada Desember 2008 menjadi 83,39 pada Maret 2009. Secara rata-rata, IKK pada triwulan I-2009 meningkat dari 78,50 pada triwulan IV-2008 menjadi 82,13 pada triwulan I-2009.

Grafik 1.2. Indeks Keyakinan Konsumen

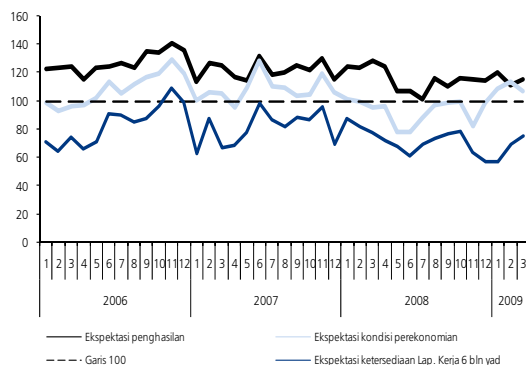


Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia Bandung.

Dilihat dari komponennya, menguatnya IKK didorong oleh menguatnya kedua komponen Survei Konsumen, yaitu Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) (Grafik 1.2). Dari sisi IKE, peningkatan konsumsi rumah tangga terutama didorong oleh indikator pembelian barang tahan lama (*durable goods*), dari rata-rata 52,89 pada triwulan IV-2008 menjadi 56,89 pada triwulan I-2009. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dalam melakukan konsumsi untuk membeli barang tahan lama.

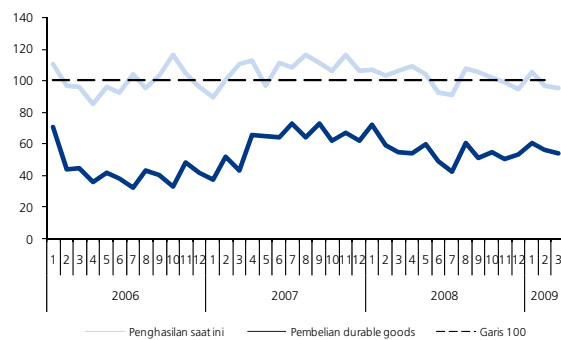
Ekspektasi konsumen juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yang dipicu oleh peningkatan ekspektasi kondisi perekonomian (Grafik 1.3). Ekspektasi kondisi perekonomian meningkat drastis dari 93,89 pada triwulan IV-2008 menjadi 110,22 pada triwulan I-2009. Kondisi ini diperkirakan sebagai efek dari rencana stimulus ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengantisipasi dampak krisis ekonomi. Stimulus puluhan triliun rupiah yang dijanjikan Pemerintah sejak awal tahun 2009 mendorong optimisme masyarakat dalam hal pulihnya kondisi perekonomian ke depan. Hal ini didukung oleh peningkatan optimisme dari para responden.

Grafik 1.3. Komponen Indeks Ekspektasi



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia Bandung.

Grafik 1.4. Komponen Indeks Keyakinan Saat ini

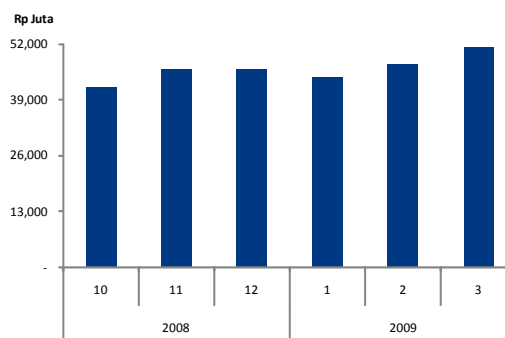


Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia Bandung

**Peningkatan kegiatan konsumsi turut diindikasikan dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE).**

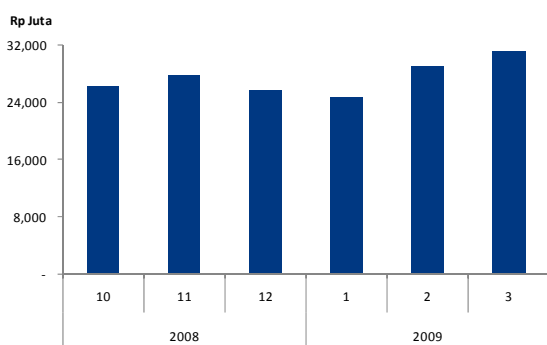
Nilai penjualan total mengalami peningkatan pada triwulan I-2009 dibandingkan dengan triwulan IV-2008 (Grafik 1.5), yaitu dari Rp134,1 miliar menjadi Rp142,7 miliar. Peningkatan konsumsi rumah tangga terjadi baik dari sisi konsumsi makanan maupun non makanan. Nilai penjualan untuk 4 kelompok barang dengan nilai penjualan tertinggi dalam SPE ditunjukkan oleh Grafik 1.6 s.d. Grafik 1.9. Tiga kelompok dengan nilai penjualan tertinggi (bahan bakar, makanan dan tembakau, dan bahan kimia) mengalami kenaikan penjualan pada triwulan I-2009, dibandingkan dengan triwulan IV-2008. Fenomena yang menarik terlihat dari Grafik 1.6, yang menunjukkan adanya kenaikan penjualan bahan bakar sejak Januari 2009, yaitu setelah Pemerintah menetapkan penurunan harga BBM bersubsidi. Sementara itu, penjualan pakaian dan perlengkapannya mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

**Grafik 1.5. Perkembangan Nilai Penjualan Eceran**



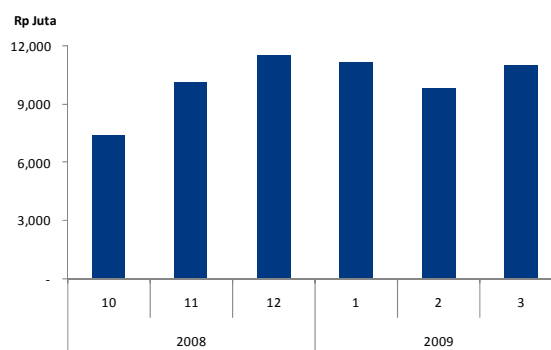
Sumber: Survei Penjualan Eceran Kota Bandung

**Grafik 1.6. Penjualan Bahan Bakar**



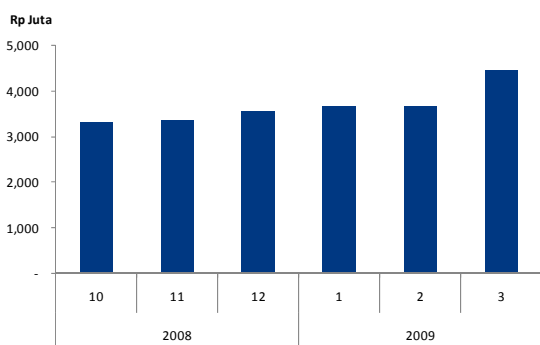
Sumber: Survei Penjualan Eceran Kota Bandung (Bank Indonesia Bandung).

**Grafik 1.7. Penjualan Makanan dan Tembakau**



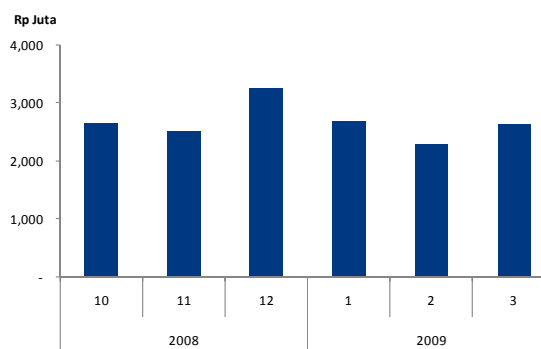
Sumber: Survei Penjualan Eceran Kota Bandung (Bank Indonesia Bandung).

**Grafik 1.8. Penjualan Bahan Kimia**



Sumber: Survei Penjualan Eceran Kota Bandung (Bank Indonesia Bandung).

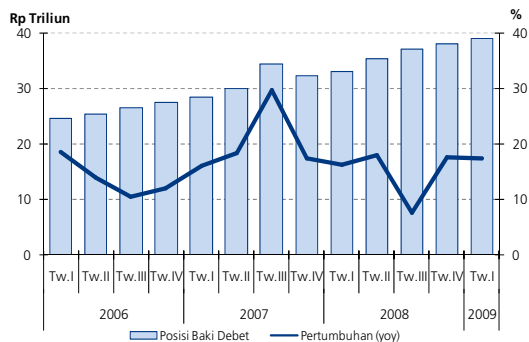
**Grafik 1.9. Penjualan Pakaian dan Perlengkapannya**



Sumber: Survei Penjualan Eceran Kota Bandung (Bank Indonesia Bandung).

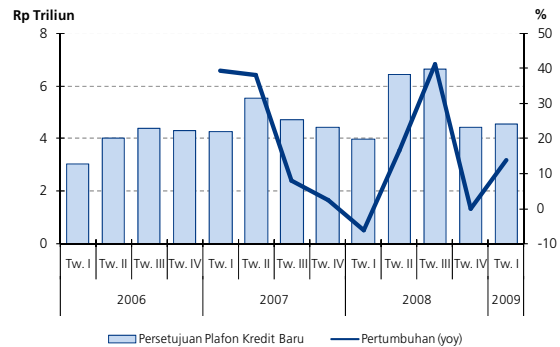
Dari sisi pembiayaan, peningkatan konsumsi antara lain ditopang oleh penyaluran kredit konsumsi oleh bank umum di Jawa Barat. Angka persetujuan plafon kredit baru untuk penggunaan konsumsi selama triwulan I-2009 mencapai Rp4,5 triliun atau tumbuh dengan laju sebesar 13,8% (yoy) (Grafik 1.11). Sementara itu, total *outstanding* kredit konsumsi yang disalurkan bank umum di Jawa Barat pada akhir triwulan I-2009 mencapai nilai sebesar Rp39,0 triliun, atau tumbuh 17,4% (yoy) (Grafik 1.10).

**Grafik 1.10. Posisi Baki Debet Kredit Konsumsi Bank Umum di Jawa Barat**



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung.

**Grafik 1.11. Angka Persetujuan Plafon Kredit Baru untuk Penggunaan Konsumsi oleh Bank Umum di Jawa Barat**



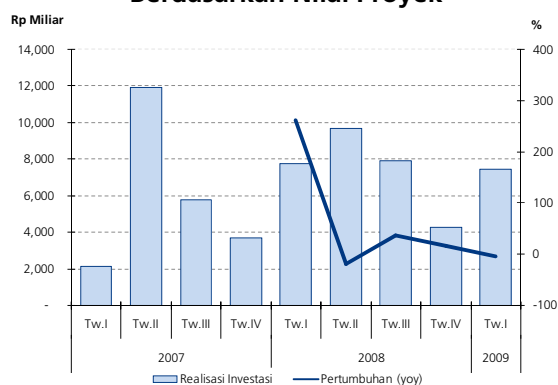
Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung.

## 1.2. Investasi

Kegiatan investasi yang tercermin dari nilai tambah pembentukan modal tetap bruto (PMTB) diperkirakan tumbuh 4,6% (yoy) pada triwulan I-2009. Pertumbuhan tersebut melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 7,9% (yoy). Perlambatan tersebut terjadi karena para investor yang masih menunggu situasi politik dan keamanan pasca Pemilu. Selain itu, kondisi perekonomian global yang masih lesu juga turut mengakibatkan perlambatan, terkait dengan porsi PMA yang sangat besar terhadap investasi di Jawa Barat.

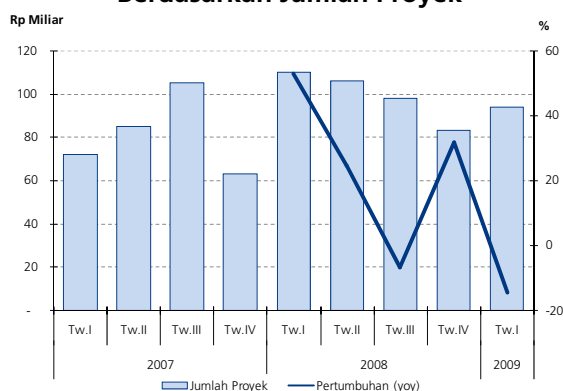
Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Jawa Barat, total realisasi investasi di Jawa Barat selama triwulan I-2009 mencapai Rp7,45 triliun, dengan total jumlah proyek sebanyak 94 buah proyek. Dengan investasi tersebut, pertumbuhan realisasi investasi di Jawa Barat mengalami pertumbuhan sebesar -3,83% (yoy), melambat bila dibandingkan pertumbuhan realisasi investasi pada triwulan IV-2008 yang sebesar 14,99% (yoy). Dilihat dari sisi jumlah proyek, jumlah proyek di triwulan I-2009 tumbuh sebesar -14,55% (yoy), menurun bila dibandingkan dengan pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang sebesar 31,75%. Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp6,40 triliun, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp1,05 triliun. Dengan demikian, PMA masih menguasai investasi dengan sumbangan sebesar 85,87% dari total nilai investasi di triwulan I-2009, atau 88,30% dari total jumlah proyek di triwulan I-2009.

**Grafik 1.12. Realisasi Investasi di Jawa Barat Berdasarkan Nilai Proyek**



Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

**Grafik 1.13. Realisasi Investasi di Jawa Barat Berdasarkan Jumlah Proyek**



Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

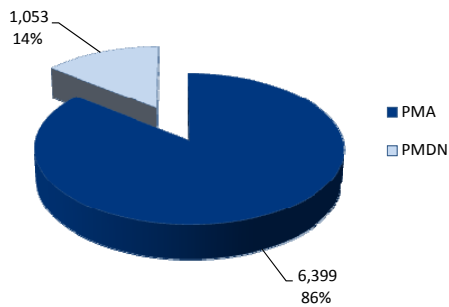
Berdasarkan sektor usaha, sektor yang paling diminati oleh investor adalah sektor sekunder, khususnya industri logam, mesin, dan elektronika (Tabel 1.3). Investasi di industri tersebut bernilai 31,88% dari keseluruhan nilai investasi di Jawa Barat pada triwulan I-2009, dan khususnya datang dari PMA.

**Tabel 1.3. Realisasi Investasi Di Jawa Barat Menurut Sektor Usaha di Triwulan I-2009**

Sektor Usaha	PMA	PMDN	Total
<b>Sektor Primer</b>	<b>17,41</b>	<b>-</b>	<b>17,41</b>
Tanaman Pangan & Perkebunan	-	-	-
Peternakan	17,41	-	17,41
Kehutanan	-	-	-
Perikanan	-	-	-
Pertambangan	-	-	-
<b>Sektor Sekunder</b>	<b>3.459,95</b>	<b>832,01</b>	<b>4.291,96</b>
Industri Makanan	30,91	-	30,91
Industri Tekstil	215,87	195,32	411,19
Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki	157,00	-	157,00
Industri Kayu	47,25	-	47,25
Industri Kertas & Percetakan	111,29	247,26	358,55
Industri Kimia & Farmasi	236,74	-	236,74
Industri Karet & Plastik	134,76	309,70	444,46
Industri Mineral Non Logam	-	-	-
Ind. Logam, Mesin, & Elektronik	2.296,20	79,74	2.375,93
Ind. Instrumen, Kedokteran, Presisi, & Optik dan Jam	-	-	-
Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	192,53	-	192,53
Industri Lainnya	37,40	-	37,40
<b>Sektor Tersier</b>	<b>2.921,16</b>	<b>221,20</b>	<b>3.142,36</b>
Listrik, Gas, dan Air	1.007,79	-	1.007,79
Konstruksi	-	-	-
Perdagangan & Reparasi	152,53	-	152,53
Hotel & Restoran	36,80	-	36,80
Transportasi, Gudang, dan Komunikasi	3,39	218,20	221,59
Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran	1.710,05	-	1.710,05
Jasa Lainnya	10,60	3,00	13,60
<b>Total</b>	<b>6.398,52</b>	<b>1.053,21</b>	<b>7.451,74</b>

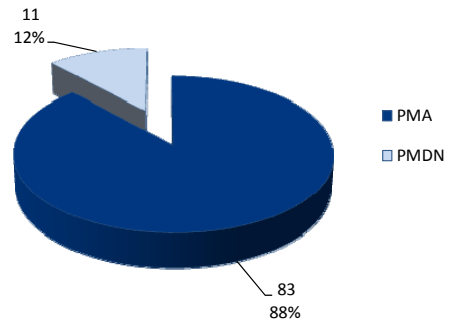
Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

**Grafik 1.14. Porsi Realisasi Investasi Berdasarkan Nilai Investasi**



Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

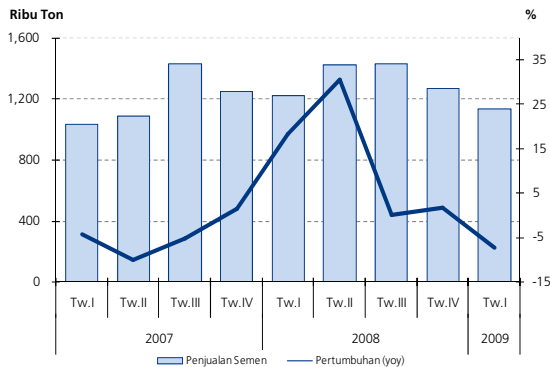
**Grafik 1.15. Porsi Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek**



Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

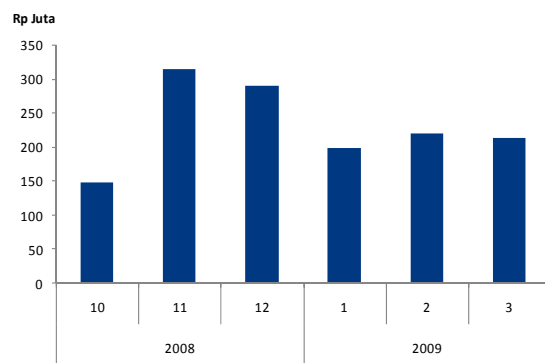
**Perlambatan investasi diperkirakan terjadi, baik untuk investasi bangunan maupun non bangunan.** Indikator perlambatan investasi bangunan adalah penurunan penjualan semen dan perlengkapan konstruksi, sebagai bahan baku dalam investasi di sisi bangunan dan konstruksi. Penjualan semen di triwulan I-2009 turun 7,3% (yoy) dibandingkan penjualan pada triwulan I-2008 (Grafik 1.16). Selain itu, penjualan perlengkapan konstruksi juga diperkirakan mengalami penurunan, seperti diindikasikan oleh Survei Penjualan Eceran di Kota Bandung (Grafik 1.17).

**Grafik 1.16. Penjualan Semen di Jawa Barat**



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia.

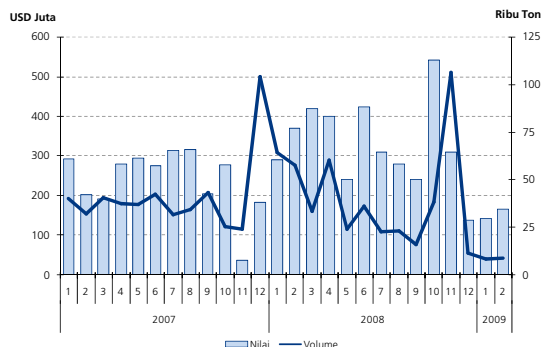
**Grafik 1.17. Penjualan Perlengkapan Konstruksi**



Sumber: Survei Penjualan Eceran Kota Bandung (Bank Indonesia Bandung).

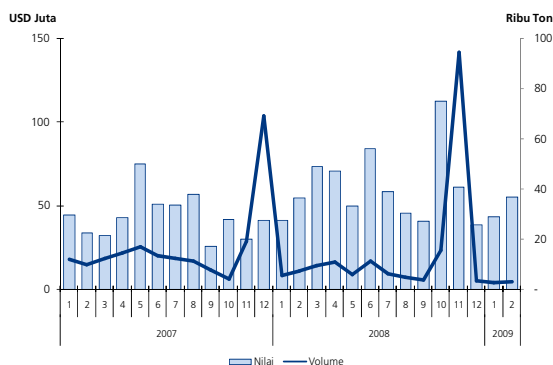
**Perlambatan investasi pada komponen non bangunan terindikasi oleh penurunan dan perlambatan impor barang modal Jawa Barat (Grafik 1.18 dan Grafik 1.19).** Dari segi nilai dan volume, impor barang modal dan barang modal utama mengalami penurunan yang sangat drastis pada triwulan I-2009 (Januari – Februari 2009), bila dibandingkan dengan triwulan I-2008. Demikian juga dengan laju pertumbuhan nilai impor barang modal dan barang modal utama, yang masing-masing mengalami perlambatan pertumbuhan dari 98% (yoy) menjadi -53% (yoy) untuk barang modal, dan 89% (yoy) menjadi 3% (yoy) untuk barang modal utama. Sementara itu, volume impor juga mengalami perlambatan dari 2% (yoy) menjadi -86% (yoy) untuk barang modal, dan 24% menjadi -58% (yoy) untuk barang modal utama.

**Grafik 1.18. Impor Barang Modal**



Sumber: Statistik Ekonomi & Keuangan Daerah (Sekda) KBI Bandung

**Grafik 1.19. Impor Barang Modal Utama**

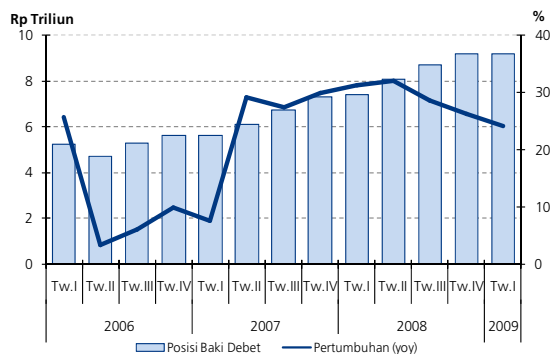


Sumber: Statistik Ekonomi & Keuangan Daerah (Sekda) KBI Bandung

**BKPPMD menargetkan peningkatan realisasi investasi di Jawa Barat pada tahun 2009 sebesar 12-14%.** Untuk mencapai target tersebut, BKPPMD Jawa Barat berusaha untuk menggalakkan investasi melalui promosi *door-to-door*, yaitu langsung berhadapan dengan investor berdasarkan daftar investor lama dan potensial, serta membantu investor dalam penyusunan profil investasi atau melakukan *pra-Feasibility Study*. Selain itu, untuk mengantisipasi hambatan dari sisi Peraturan Daerah yang kurang kondusif, disediakan juga Badan Pelayanan Terpadu untuk Perizinan, untuk mempermudah investor dari sisi perizinan investasi. Pembentukan 24 Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Barat serta penyediaan outlet di Batam sebagai sarana informasi untuk investasi juga diharapkan dapat mendorong minat investor untuk melakukan investasi di Jawa Barat.

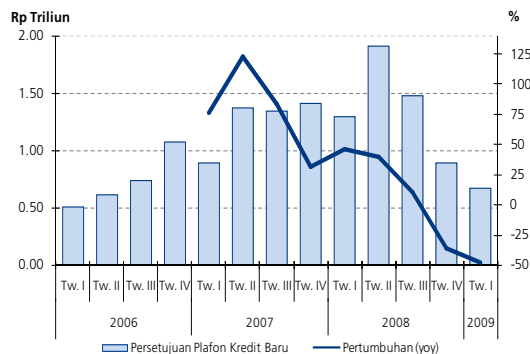
**Dari sisi pembiayaan, perlambatan diindikasikan melalui penurunan posisi kredit investasi, serta penurunan dan perlambatan pertumbuhan angka persetujuan plafon kredit baru untuk investasi.** Posisi baki debit kredit investasi tumbuh melambat dari 26,3% (yoy) pada triwulan IV-2008 menjadi 24,2% (yoy) pada triwulan I-2009. Sementara itu, angka persetujuan plafon kredit baru untuk penggunaan investasi turun sebesar Rp227,86 miliar pada triwulan I-2009, dan tumbuh semakin negatif dari -36,6% (yoy) pada triwulan IV-2008 menjadi -48,5% (yoy) pada triwulan I-2009.

**Grafik 1.20. Posisi Penyaluran Kredit Investasi oleh Bank Umum di Jawa Barat**



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung.

**Grafik 1.21. Angka Persetujuan Plafon Kredit Baru untuk Penggunaan Investasi oleh Bank Umum di Jawa Barat**



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung.

### 1.3. Ekspor-Import

**Krisis keuangan global yang melanda dunia internasional semakin berimbas terhadap kinerja ekspor dan impor Jawa Barat ke luar negeri.** Nilai tambah PDRB ekspor Jawa Barat diperkirakan mengalami penurunan sebesar 15,2% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan penurunan pada triwulan IV-2008 yang sebesar -8,4% (yoy). Permintaan ekspor terus menurun, sebagai dampak pelemahan daya beli masyarakat internasional, khususnya di negara importir utama, yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan Asia (Jepang dan RRC).

**Kinerja ekspor luar negeri Jawa Barat pada triwulan I-2009 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya.** Nilai ekspor selama Januari dan Februari 2009 turun 15,2% (yoy), semakin lemah dibandingkan pertumbuhan triwulan IV-2008 (Oktober – Desember 2008) yang sebesar 10,6% (yoy). Demikian juga apabila dilihat dari segi volume, yang mterus melemah dari pertumbuhan sebesar -22,6% (yoy) pada triwulan IV-2008 menjadi -31,8% (yoy) pada triwulan I-2009 (Januari – Februari 2009).

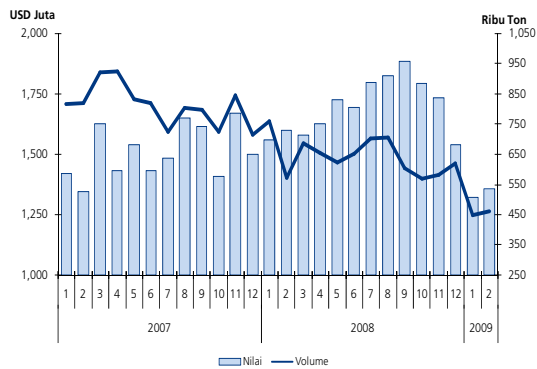
**Penyumbang utama ekspor Jawa Barat adalah kelompok Mesin dan Pesawat Mekanik, Perlengkapan Elektronik dan Bagiannya, serta kelompok Tekstil dan Barang dari Tekstil.** Kedua kelompok tersebut mengalami penurunan, baik dari segi nilai maupun volume. Dari segi nilai, kelompok mesin dan pesawat mekanik, perlengkapan elektronik dan bagiannya tumbuh melambat dari 24,2% (yoy) pada triwulan IV-2008 menjadi -6,7% (yoy) pada triwulan I-2009, sementara volumenya turun semakin dalam dari -1,3% (yoy) pada triwulan IV-2008 menjadi -33,1% (yoy) pada triwulan I-2009 (Grafik 1.24). Sementara itu, pertumbuhan nilai ekspor kelompok tekstil dan barang dari tekstil semakin turun dari -1,2% (yoy) pada triwulan IV-2008 menjadi -13,3% (yoy) pada triwulan I-2009, namun pertumbuhan volumenya dapat dikatakan stabil, walaupun tetap negatif, yaitu dari -6,8% (yoy) pada triwulan IV-2008 menjadi -6,6% (yoy) pada triwulan I-2009.

**Sejalan dengan ekspor, kinerja impor di Jawa Barat pada triwulan I-2009 juga diperkirakan mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.** Impor Jawa Barat pada triwulan I-2009 diperkirakan turun 24,1% (yoy), semakin melemah bila dibandingkan dengan pada triwulan IV-2008 yang turun 3,9% (yoy). Kondisi ini diperkirakan terjadi karena produk ekspor Jawa Barat memiliki kandungan bahan baku impor yang sangat tinggi, sehingga penurunan ekspor akan diikuti oleh penurunan impor bahan baku. Kondisi ini terlihat dari kelompok penyumbang ekspor tertinggi Jawa Barat yang sama dengan kelompok penyumbang impor tertinggi Jawa Barat, yaitu kelompok mesin dan pesawat mekanik, perlengkapan elektronik dan bagiannya serta kelompok tekstil dan barang dari tekstil.

**Kedua kelompok penyumbang impor tertinggi mengalami penurunan pada triwulan I-2009, baik dari segi nilai maupun volume impor.** Dari segi nilai, kelompok mesin dan pesawat mekanik, perlengkapan elektronik dan bagiannya yang pada triwulan IV-2008 tumbuh 22,6% (yoy), pada triwulan I-2009 turun 53,6% (yoy). Di samping itu, volume impor kelompok barang tersebut turun semakin dalam dari -18,3% (yoy) pada triwulan IV-2008 menjadi -87,5% (yoy) pada triwulan I-2009 (Grafik 1.26). Sementara itu, nilai impor kelompok tekstil dan barang dari tekstil yang pada triwulan

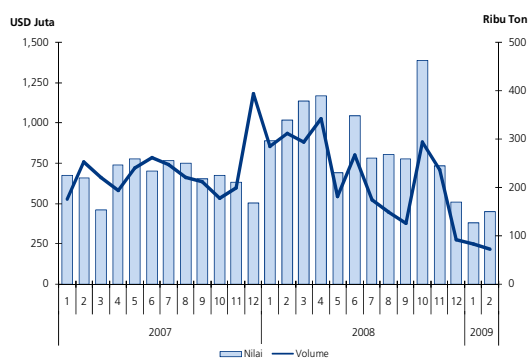
IV-2008 masih tumbuh 31,4% (yoy), pada triwulan I-2009 turun 36,0% (yoy). Adapun volumenya turun sangat dalam dari -9,8% (yoy) pada triwulan IV-2008 menjadi -70,1% (yoy) pada triwulan I-2009.

**Grafik 1.22. Nilai dan Volume Ekspor Jawa Barat**



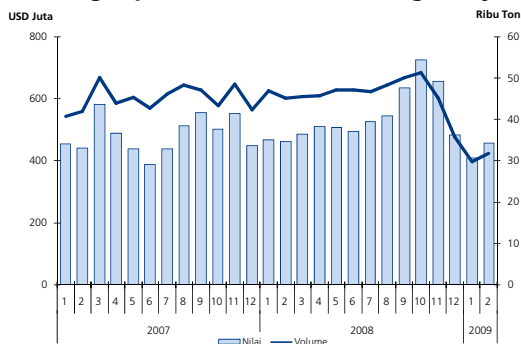
Sumber: Statistik Ekonomi & Keuangan Daerah (SEKDA) Jabar, KBI Bandung.

**Grafik 1.23. Nilai dan Volume Impor Jawa Barat**



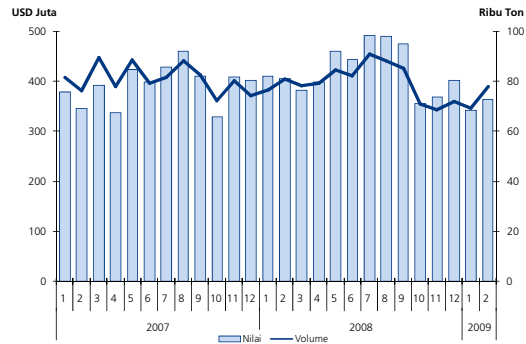
Sumber: Statistik Ekonomi & Keuangan Daerah (SEKDA) Jabar, KBI Bandung.

**Grafik 1.24. Nilai dan Volume Ekspor Mesin dan Pesawat Mekanik, Perlengkapan Elektronik dan Bagiannya**



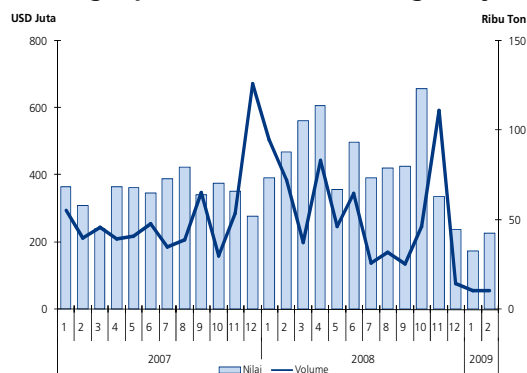
Sumber: Statistik Ekonomi & Keuangan Daerah (SEKDA) Jabar, KBI Bandung.

**Grafik 1.25. Nilai dan Volume Ekspor Tekstil dan Barang dari Tekstil**



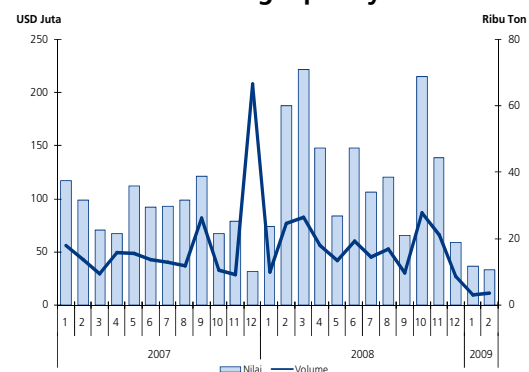
Sumber: Statistik Ekonomi & Keuangan Daerah (SEKDA) Jabar, KBI Bandung.

**Grafik 1.26. Nilai dan Volume Impor Mesin dan Pesawat Mekanik, Perlengkapan Elektronik dan Bagiannya**



Sumber: Statistik Ekonomi & Keuangan Daerah (SEKDA) Jabar, KBI Bandung.

**Grafik 1.27. Nilai dan Volume Impor Kendaraan, Pesawat Terbang, Kendaraan dan Perlengkapannya**

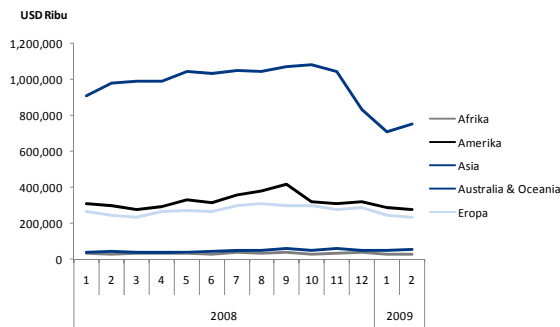


Sumber: Statistik Ekonomi & Keuangan Daerah (SEKDA) Jabar, KBI Bandung.



Dilihat dari negara tujuan ekspor, nilai ekspor dengan tujuan Asia, Amerika Serikat, dan Eropa memiliki tendensi menurun (Grafik 1.28). Sementara itu, nilai ekspor dengan tujuan Afrika dan Australia masih terlihat stabil. Nilai ekspor dengan tujuan Asia mengalami persentase penurunan yang sangat signifikan, terutama ekspor ke negara RRC, Thailand, Jepang, dan Singapura. Sementara itu, Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor dengan penurunan nilai ekspor kelima terbesar, dilihat dari perbandingan antara nilai ekspor Jawa Barat periode Januari-Februari 2008 dengan Januari-Februari 2009 (lihat Tabel 1.4).

Grafik 1.28. Nilai Ekspor Jawa Barat Berdasarkan Negara Tujuan



Sumber: Statistik Ekonomi & Keuangan Daerah (SEKDA) Jabar, KBI Bandung

Tabel 1.4. Lima Negara Dengan Perubahan Nilai Ekspor Terbesar\*)

No	Negara	Perubahan Nilai Ekspor (USD Ribuan)	Persentase Perubahan Nilai Ekspor
1	RRC	(93.331)	-41%
2	Thailand	(58.415)	-37%
3	Jepang	(54.275)	-14%
4	Singapura	(42.361)	-33%
5	Amerika Serikat	(38.384)	-7%

\*) Perubahan antara nilai ekspor Januari-Februari 2008 dengan Januari-Februari 2009  
 Sumber: Statistik Ekonomi & Keuangan Daerah (SEKDA) Jabar, KBI Bandung

## 2. SISI PENAWARAN

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I-2009 masih ditopang oleh sektor ekonomi penyumbang PDRB terbesar di Jawa Barat, yakni sektor industri pengolahan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I-2009 tidak terlepas dari perlambatan sektor ekonomi ini. Meskipun sektor industri pengolahan tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhannya pada triwulan IV-2008, sektor tersebut masih memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tahunan Jawa Barat (Tabel 1.5 dan 1.6). dari pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 4,1% (yoy), sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 3,6%. Sementara itu, sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) yang nilai tambahnya merupakan penyumbang kedua terbesar PDRB Jawa Barat, pada triwulan I-2009 tumbuh positif dan memberikan sumbangan kedua terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Adapun sektor pertanian,

yang menempati urutan ketiga dalam pembentukan PDRB Jawa Barat masih mengalami penurunan (pertumbuhan negatif) sejak triwulan II-2008. Namun demikian, persentase penurunannya tidak sebesar pada triwulan IV-2008.

**Tabel 1.5. Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Provinsi Jawa Barat Dari Sisi Penawaran (%)**

Sektor Ekonomi	2007				2007	2008				2008*)	2009 Tw.I(**)
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV		Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV		
Pertanian	-16,4%	-1,0%	1,9%	34,0%	2,5%	42,2%	-14,2%	-2,0%	-11,2%	2,0%	-6,4%
Pertambangan dan Penggalian	-2,1%	-6,0%	-5,4%	-4,9%	-4,6%	-9,3%	-7,1%	5,1%	2,4%	-2,2%	14,4%
Industri Pengolahan	9,5%	7,2%	6,1%	6,8%	7,4%	3,9%	10,6%	10,5%	10,8%	9,0%	8,2%
Listrik, Gas, dan Air Bersih	7,7%	5,4%	3,3%	7,5%	6,0%	7,0%	5,4%	3,6%	3,3%	4,8%	3,4%
Bangunan	9,8%	11,3%	11,8%	1,3%	8,4%	2,1%	1,2%	13,4%	19,2%	9,0%	8,5%
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	10,3%	9,1%	11,1%	2,7%	8,0%	3,6%	7,2%	6,1%	-0,8%	3,9%	2,3%
Pengangkutan dan Komunikasi	16,7%	13,9%	10,3%	1,0%	10,1%	-4,1%	-0,1%	2,3%	0,7%	-0,3%	4,7%
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	19,0%	16,0%	13,1%	3,7%	12,7%	-2,1%	3,5%	8,6%	9,9%	5,0%	7,0%
Jasa-jasa	5,6%	2,1%	2,4%	1,5%	2,9%	1,1%	-0,1%	2,4%	3,8%	1,8%	0,4%
<b>PDRB</b>	<b>5,7%</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>7,5%</b>	<b>6,5%</b>	<b>7,3%</b>	<b>4,2%</b>	<b>6,8%</b>	<b>4,5%</b>	<b>5,7%</b>	<b>4,1%</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

\*) Angka Sementara

\*\*) Proyeksi KBI Bandung

**Tabel 1.6. Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Provinsi Jawa Barat (%)**

Sektor Ekonomi	2007				2007	2008				2008*)	2009 Tw.I(**)
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV		Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV		
Pertanian	-2,5%	-0,1%	0,3%	3,5%	0,3%	5,0%	-2,0%	-0,3%	-1,4%	0,3%	-1,0%
Pertambangan dan Penggalian	-0,1%	-0,2%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,2%	-0,2%	0,1%	0,1%	-0,1%	0,3%
Industri Pengolahan	4,2%	3,2%	2,7%	3,1%	3,3%	1,8%	4,7%	4,7%	4,8%	4,0%	3,6%
Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Bangunan	0,3%	0,4%	0,4%	0,0%	0,3%	0,1%	0,0%	0,4%	0,6%	0,3%	0,3%
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1,9%	1,7%	2,1%	0,6%	1,6%	0,7%	1,4%	1,2%	-0,2%	0,8%	0,4%
Pengangkutan dan Komunikasi	0,7%	0,6%	0,4%	0,0%	0,4%	-0,2%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,5%	0,5%	0,4%	0,1%	0,4%	-0,1%	0,1%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%
Jasa-jasa	0,4%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0,2%	0,3%	0,1%	0,0%
<b>PDRB</b>	<b>5,7%</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>7,5%</b>	<b>6,5%</b>	<b>7,3%</b>	<b>4,2%</b>	<b>6,8%</b>	<b>4,5%</b>	<b>5,7%</b>	<b>4,1%</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

\*) Angka Sementara

\*\*) Proyeksi KBI Bandung

## 2.1. Sektor Pertanian

Meskipun diperkirakan masih mengalami kontraksi, pertumbuhan sektor pertanian secara tahunan pada triwulan I-2009 lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Sektor pertanian diperkirakan turun sebesar 6,4% (yoy), relatif lebih baik dibandingkan kinerjanya pada triwulan IV-2008 yang tercatat mengalami penurunan sebesar 11,2% (yoy). Nilai tambah sektor pertanian pada triwulan I-2009 yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2008 disebabkan oleh kinerja subsektor tanaman pangan, sehubungan pergeseran masa panen raya padi. Pada tahun 2008, panen raya terjadi pada triwulan I-2008, sementara pada tahun 2009, sebagian kecil panen raya terjadi di akhir triwulan I-2009 dan sebagian besar terjadi pada triwulan berikutnya. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, meskipun panen raya padi telah dimulai di Jawa Barat sejak Februari 2009 secara sporadis, panen raya baru akan berlangsung sejak pertengahan Maret hingga mencapai puncaknya pada bulan Mei 2009. Informasi yang sama juga dikemukakan oleh Bulog. Dibandingkan triwulan sebelumnya, kinerja sektor pertanian mengalami peningkatan pertumbuhan secara tahunan. Hal ini dikarenakan lemahnya kinerja subsektor tanaman

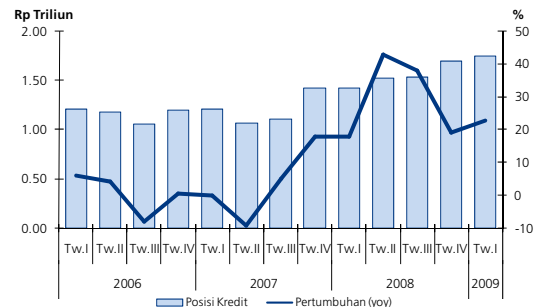
pangan pada triwulan IV-2008, yang dipengaruhi oleh faktor musiman, yaitu musim kemarau yang panjang, serta penurunan luas panen padi.

**Selama tahun 2009, produksi padi Jawa Barat diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008 (lihat Boks 1. Prospek Produksi Pertanian Jawa Barat Tahun 2009).**

Peningkatan ramalan produksi tersebut disebabkan peningkatan luas panen dan produktivitas padi. Optimisme peningkatan produksi padi pada tahun 2009 ini mendorong Pemerintah untuk melakukan ekspor beras pada tahun 2009 ini, termasuk beras asal Jawa Barat, terutama dari daerah Cianjur dan Tasikmalaya. Bencana banjir yang melanda Jawa Barat diperkirakan tidak menghambat produksi padi Jawa Barat. Menurut informasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, sawah puso akibat banjir relatif kecil, yaitu kurang dari 1% dari total luas sawah di Jawa Barat.

**Kinerja sektor pertanian di Jawa Barat tidak terlepas dari dukungan pembiayaan dari perbankan.** Penyaluran kredit oleh bank umum ke sektor pertanian mengalami peningkatan (Grafik 1.29). Posisi kredit pada triwulan I-2009 mencapai Rp1,74 triliun, atau meningkat Rp323,01 miliar dibandingkan triwulan I-2008, dengan laju pertumbuhan sebesar 22,7% (yoy).

**Grafik 1.29. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Pertanian**



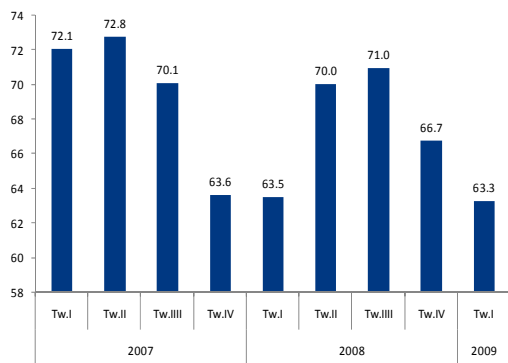
Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

## 2.2. Sektor Industri Pengolahan

**Sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh 8,2% (yoy) pada triwulan I-2009, lebih lambat** dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 10,8% (yoy). Namun demikian, sektor industri pengolahan masih menjadi sektor penyumbang nilai tambah terbesar dalam PDRB Jawa Barat di triwulan I-2009.

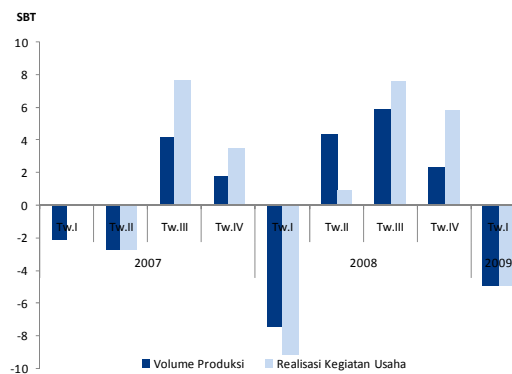
**Perlambatan sektor industri pengolahan tercermin pada hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha di Jawa Barat pada triwulan I-2009.** Utilisasi kapasitas sektor industri pengolahan mengalami penurunan signifikan dari skala 66,7 pada triwulan IV-2008 menjadi 63,3 pada triwulan I-2009, titik terendah sejak tahun 2007 (Grafik 1.30). Kondisi ini mencerminkan bahwa perusahaan yang bergerak di industri pengolahan telah menurunkan kegiatan produksinya, sebagai respons atas turunnya permintaan. Di samping itu, baik indikator volume produksi maupun realisasi kegiatan usaha pada triwulan I-2009 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, bahkan Saldo Bersih Tertimbang kedua indikator tersebut tercatat negatif (Grafik 1.31).

**Grafik 1.30. Utilisasi Kapasitas Industri Pengolahan**



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha KBI Bandung

**Grafik 1.31. Realisasi Kegiatan Usaha dan Indikator Volume Produksi Industri Pengolahan**



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha KBI Bandung

**Perlambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan terutama terjadi pada dua subsektor, yakni subsektor alat angkutan, mesin, dan peralatannya dan subsektor tekstil, barang kulit, dan alas kaki. Salah satu indikator penurunan kinerja subsektor alat angkutan, mesin, dan peralatannya adalah penurunan penjualan kendaraan bermotor secara nasional.** Penjualan mobil selama triwulan I-2009 lebih rendah 25,8% dibandingkan penjualan pada triwulan I-2008. Sebagian besar pabrik kendaraan bermotor di Indonesia berlokasi di Jawa Barat, khususnya di Bekasi dan Karawang. Perusahaan otomotif telah merespons turunnya permintaan dengan menurunkan tingkat produksi. Penurunan produksi diindikasikan oleh pengurangan *shift* kerja serta peniadaan lembur di pabrik-pabrik. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2008, penjualan mobil secara nasional turun sebesar 25,8% pada triwulan I-2009 (lihat Tabel 1.7). Penurunan tersebut terjadi di hampir seluruh merek mobil, kecuali Daihatsu, akibat terdorong kenaikan penjualan tipe Gran Max yang mulai diterima di pasar internasional. Penurunan angka penjualan kendaraan bermotor disebabkan oleh menurunnya permintaan akibat kenaikan harga kendaraan bermotor, tingginya uang muka pembelian, serta tingginya suku bunga kredit dari perusahaan pembiayaan. Kredit memegang peranan penting dalam transaksi jual-beli kendaraan bermotor, karena membiayai 85%-90% dari transaksi penjualan.

**Tabel 1.7. Penjualan Mobil Nasional**

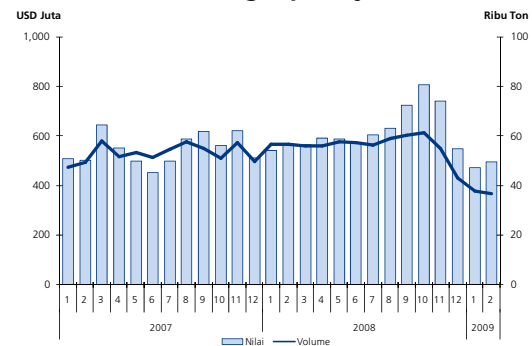
Merek	Tw.I-2008	Jan-09	Feb-09	Mar-09	Tw.I-2009	Pertumbuhan (yoy)
Daihatsu	15.035	4.391	6.512	7.385	18.288	21,6%
Honda	12.035	2.039	2.353	2.597	6.989	-41,9%
Isuzu	6.000	1.199	1.269	1.332	3.800	-36,7%
Mazda	594	21	63	87	171	-71,2%
Mitsubishi	19.878	3.727	4.723	5.116	13.566	-31,8%
Nissan	7.331	1.581	1.520	1.383	4.484	-38,8%
Suzuki	18.706	4.267	3.001	2.435	9.703	-48,1%
Toyota	45.058	12.498	12.032	11.162	35.692	-20,8%
Lainnya	10.964	1.911	3.026	3.003	7.940	-27,6%
<b>Total</b>	<b>135.601</b>	<b>31.634</b>	<b>34.499</b>	<b>34.500</b>	<b>100.633</b>	<b>-25,8%</b>

Sumber: Anggota Gaikindo

**Penurunan kinerja subsektor mesin, alat angkutan, dan peralatannya juga tercermin dari hasil wawancara KBI Bandung dengan beberapa perusahaan (lihat Boks 2. Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha Sektor Industri Pengolahan di Jawa Barat.** Beberapa perusahaan yang bergerak di hulu untuk industri mesin, elektronik, dan kendaraan bermotor (seperti *gear*, komponen plastik dan metal, klakson) menyatakan adanya penurunan produksi, sehingga perusahaan melakukan pengurangan *shift* kerja, serta pengurangan lembur karyawannya. Hal tersebut dilakukan menyusul turunnya pesanan dari industri hilir, pengguna produk suku cadang, otomotif dan elektronika. Pengelola Kawasan Industri di Jawa Barat mengakui bahwa krisis keuangan global berdampak terhadap beberapa industri, terutama pada industri otomotif, elektronika, serta alat berat (seperti . Sementara itu, industri makanan dan minuman relatif masih bertahan terhadap krisis keuangan global.

**Penurunan kinerja subsektor alat angkutan, mesin, dan peralatan juga tercermin dari perlambatan ekspor kelompok Mesin dan Pesawat Mekanik, perlengkapan Elektronik dan Bagian-bagiannya serta Kendaraan, Pesawat Terbang, Kendaraan dan Perlengkapannya (Grafik 1.32).** Nilai ekspor mengalami perlambatan pertumbuhan cukup signifikan, yaitu dari 24% (yoy) pada triwulan IV-2008 menjadi -13% (yoy). Volume ekspor turun drastis, pada triwulan IV-2008 masih tumbuh 1% (yoy), pada triwulan I-2009 turun -34%.

**Grafik 1.32. Nilai dan Volume Ekspor Mesin dan Pesawat Mekanik, Perlengkapan Elektronik dan Bagian-bagiannya serta Kendaraan, Pesawat Terbang, Kendaraan dan Perlengkapannya**



Sumber: Statistik Ekonomi & Keuangan Daerah (SEKDA) Jabar, KBI Bandung.

**Subsektor tekstil, barang kulit, dan alas kaki juga diperkirakan mengalami penurunan.** Penurunan terutama disebabkan oleh pelemahan permintaan ekspor dari negara mitra dagang yang terimbas krisis keuangan global. Pesanan dari negara importir sejak awal tahun 2009 relatif kecil, sehingga perusahaan TPT di Jawa Barat pada umumnya hanya menyelesaikan sisa pesanan tahun sebelumnya. Beberapa importir hanya melakukan pengecekan harga, namun hanya sebagian kecil yang melakukan pesanan. Berdasarkan informasi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat, volume ekspor penjualan produk TPT pada triwulan I-2009 diperkirakan turun 30%. Perkiraan penurunan ekspor ini juga didasarkan atas hasil survei di Amerika Serikat dan Eropa (yang dilakukan pada Desember 2008 dan Januari 2009), dimana 3 dari 10 wanita di Amerika Serikat menyatakan tidak akan membeli pakaian di tahun 2009, terkait dengan krisis keuangan global. Namun demikian, API Jawa Barat optimis bahwa ekspor diperkirakan akan kembali meningkat sejak bulan September 2009. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya API dalam penguatan dan perluasan pasar TPT (lihat Boks 3. Langkah-langkah Penguatan dan Perluasan Pasar Produk TPT).

**Depresiasi nilai tukar rupiah mengunci perdagangan tekstil, terutama industri hulu.** Hal ini dikarenakan penggunaan dollar AS sebagai mata uang dalam perdagangan di industri hulu TPT. Fluktuasi nilai tukar rupiah menahan pelaku usaha untuk bertransaksi, sehingga mengakibatkan

penumpukan stok serta perumahan tenaga kerja di sektor hulu. Solusi permasalahan yang diharapkan adalah penggunaan rupiah dalam transaksi TPT. Pemerintah diharapkan dapat memberikan fasilitas *hedging* bagi importir (dengan tenor 3-6 bulan). Penurunan produksi tidak terlalu drastis dilakukan oleh industri hilir (garmen), karena mayoritas industri garmen menggunakan dollar AS sebagai alat pembayaran transaksi. Selain fasilitas *hedging*, industri TPT sangat mengharapkan bantuan berupa perbaikan infrastruktur serta ketersediaan energi.

**Para pelaku usaha di sektor industri TPT mengakui penurunan kinerja perusahaannya.**

Perusahaan alas kaki menyatakan penurunan produksi sejak akhir triwulan IV-2008 hingga triwulan I-2009, sebagai dampak penghentian pesanan serta pembatalan kontrak yang dilakukan oleh *customer*, terutama importir dari luar negeri. Sektor hulu industri TPT (seperti benang) juga menurunkan kapasitas produksi dan pengurangan *shift* kerja akibat penundaan dan pembatalan pesanan, terutama dari Amerika Serikat dan Eropa. Walaupun demikian, penambahan mesin dan ekspansi tetap direncanakan oleh industri tersebut.

**Di sisi pasar domestik, diperkirakan terjadi peningkatan, sebagai dampak positif beberapa kebijakan pemerintah dan peningkatan permintaan garmen untuk atribut kampanye Pemilu Legislatif.**

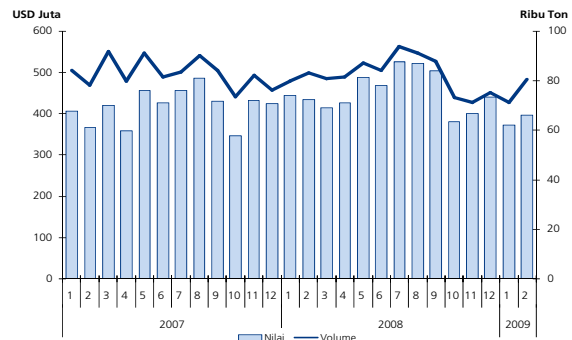
Namun demikian, penguatan di pasar TPT domestik tersebut diperkirakan belum mampu menahan penurunan kinerja industri TPT. Penguatan di pasar domestik tersebut didorong antara lain sebagai dampak positif Permendag No.44/M-DAG/PER/10/2008 dan Permendag No. 52/M-DAG/PER/12/ 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Mulai awal tahun 2009, impor lima produk konsumsi yaitu elektronika, alas kaki, garmen, makanan dan minuman, serta mainan anak, akan diperketat hanya melalui lima pelabuhan saja, yaitu Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Mas (Semarang), Soekarno-Hatta (Makassar) dan Belawan (Medan). Impor hanya boleh dilakukan Importir Terdaftar (IT) dan sebelumnya wajib diverifikasi di pelabuhan muat. Untuk garmen, verifikasi dimulai 1 Januari 2009, sedangkan empat produk lainnya wajib verifikasi sejak 1 Februari 2009. API Jawa Barat menyatakan bahwa sejak diberlakukannya peraturan tersebut, produsen TPT mengalami peningkatan penjualan di pasar dalam negeri sebesar 10%-15%. Sementara itu, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jawa Barat menyatakan bahwa terjadi lonjakan penjualan di pasar domestik sekitar 20-30%. Hal ini sejalan dengan kegiatan Liaison yang dilakukan oleh KBI Bandung kepada industri *apparel* di Jawa Barat. Namun, penguatan di pasar domestik tidak mampu menahan penurunan kinerja industri TPT, karena ekspor memegang peranan yang sangat besar (67%) terhadap produk TPT nasional. Penurunan paling besar terjadi pada industri hulu, seperti industri serat sintesis, benang, dan kain. Sementara itu, industri hilir TPT (garmen dan *apparel*) masih tumbuh positif. Informasi tersebut diperoleh dari hasil diskusi dengan Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat serta hasil *liaison* dengan beberapa perusahaan TPT.

**Penyelenggaraan Pemilu juga menghasilkan dampak positif terhadap industri TPT.** Menurut informasi Ketua Koperasi Sentra Industri Kaos Suci Bandung, angka penjualan kaos dan atribut kampanye pada masa Pemilu Legislatif diperkirakan mencapai Rp15 miliar. Pernyataan ini juga didukung hasil riset Indotextiles (lembaga riset pertekstilan nasional), yang melaporkan konsumsi

produk TPT di dalam negeri pada triwulan I-2009 meningkat 25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008.

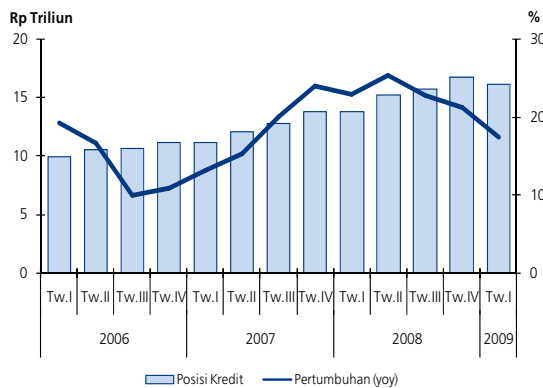
**Ekspor kelompok tekstil dan barang dari tekstil serta alas kaki, tutup kepala, payung, dan bunga tiruan pada triwulan I-2009 (Januari-Februari 2009) mengalami perlambatan (Grafik 1.33).** Pertumbuhan nilai ekspor melambat dari 2% (yoy) pada triwulan IV-2008 menjadi -13% (yoy) pada triwulan I-2009. Sementara itu, pertumbuhan volume ekspor menurun dari -5% (yoy) menjadi -7% (yoy).

**Grafik 1.33. Nilai dan Volume Ekspor Produk Tekstil dan Barang dari Tesktil serta Alas Kaki, Tutup Kepala, Payung, dan Bunga Tiruan**



Sumber: Statistik Ekonomi & Keuangan Daerah (SEKDA) Jabar, KBI Bandung.

**Grafik 1.34. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Industri Pengolahan**



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

**Perkembangan sektor industri pengolahan juga didukung oleh peran pembiayaan perbankan.** Dilihat dari sisi pembiayaan, setelah terus mengalami kenaikan sejak tahun 2006, pertumbuhan posisi penyaluran kredit perbankan untuk sektor industri pengolahan menunjukkan perlambatan dibandingkan dengan triwulan IV-2008, namun dengan posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2008. Posisi kredit untuk sektor industri pengolahan pada triwulan I-2009 mencapai Rp16,2 triliun, tumbuh 17,39% (yoy), lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2008 yang sebesar 21,22% (yoy).

### 2.3. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

**Sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) diperkirakan tumbuh 2,3% (yoy), setelah pada triwulan IV-2008 turun 0,8% (yoy).** Pertumbuhan sektor PHR terutama ditopang oleh pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran. Pangsa nilai tambah subsektor ini mencapai 86,9% terhadap total nilai tambah sektor PHR (tahun 2007). Sementara itu, kinerja subsektor hotel diperkirakan melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2008.

**Peningkatan kinerja subsektor perdagangan besar dan eceran diindikasikan oleh hasil Survei Penjualan Eceran (SPE), yang menunjukkan adanya peningkatan nilai penjualan pada**

**triwulan I-2009.** Peningkatan tersebut antara lain merupakan dampak positif aktivitas kampanye menjelang Pemilu Legislatif pada 9 April 2009. Belanja untuk kegiatan kampanye telah meningkatkan volume perdagangan di Jawa Barat. Peningkatan kegiatan perdagangan juga telah dirasakan oleh para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Perdagangan Ritel (APRINDO) Jawa Barat.

**Sementara itu, pertumbuhan subsektor hotel diperkirakan mengalami perlambatan pada triwulan I-2009.** Kondisi ini tercermin dari penurunan rata-rata Tingkat Hunian Kamar (THK) di Jawa Barat. Pada triwulan I-2009, THK hotel bintang dan non bintang di Jawa Barat mencapai 34,57%, atau turun sebesar 4,2% (yoy) dibandingkan THK pada triwulan I-2008. Penurunan tersebut lebih dalam dibandingkan penurunan pada triwulan IV-2008 yang sebesar -0,2% (yoy). Walaupun demikian, rata-rata THK tetap mengalami kenaikan dibandingkan periode triwulan IV-2008. Kenaikan tersebut dipicu oleh kenaikan THK hotel bintang, yaitu dari 42,21% pada triwulan IV-2008 menjadi 43,69 pada triwulan I-2009. Sementara itu, THK hotel non bintang menurun dari 27,52% pada triwulan IV-2008 menjadi 25,76% pada triwulan I-2009.

**Tabel 1.8. Indikator Perhotelan di Jawa Barat**

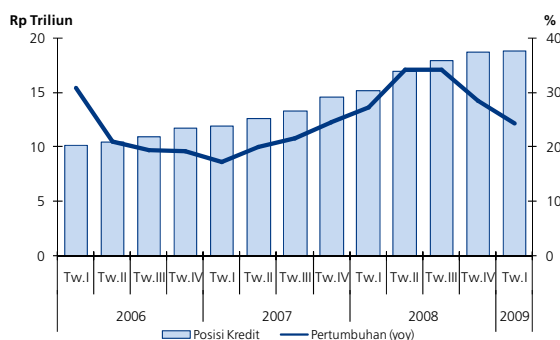
Tingkat Hunian Kamar (%)	2007	2008				2009	Pertumbuhan Tw.IV-08 (yoy)	Pertumbuhan Tw.I-09 (yoy)
	Tw.IV	Tw.I*)	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I*)		
Hotel Bintang	47,51	43,72	41,40	40,03	42,21	43,69	-11,2%	-0,1%
Hotel Non Bintang	23,96	26,40	25,24	25,18	27,52	25,76	14,9%	-2,4%
<b>Hotel Bintang &amp; Non Bintang</b>	<b>33,95</b>	<b>36,08</b>	<b>31,22</b>	<b>32,84</b>	<b>33,87</b>	<b>34,57</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-4,2%</b>

Sumber: BPS Provinsi Jabar

\*) Rata-rata Tingkat Hunian Kamar bulan Januari dan Februari

Dilihat dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit ke sektor perdagangan, hotel, dan restoran secara tahunan mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 1.35). *Outstanding* kredit pada triwulan I-2009 mencapai Rp18,89 triliun, tumbuh sebesar 24,50% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV-2008 yang sebesar 28,52% (yoy).

**Grafik 1.35. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran**



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

## 2.4. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan pada triwulan I-2009 diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan IV-2008, yakni dari 9,9% (yoy) menjadi 7,0% (yoy). Perlambatan terutama terjadi pada subsektor keuangan, yang



tercermin dari perlambatan pertumbuhan nilai tambah bank umum di Jawa Barat (Tabel 1.9). Nilai tambah bank umum pada periode triwulan I-2009 mencapai Rp1.707 miliar dan tumbuh 17,60% (yoy), jauh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2008 yang sebesar 30,04% (yoy).

**Kinerja subsektor persewaan pada triwulan IV-2008 diperkirakan mengalami penurunan.** Hal ini tercermin pada hasil Survei Properti Komersial (Tabel 1.10) KBI Bandung pada triwulan I-2009. Sewa kantor mengalami pertumbuhan yang stagnan. Sementara itu, sewa pusat perbelanjaan mengalami perlambatan pertumbuhan dan sewa apartemen mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan I-2009, dibandingkan dengan pertumbuhan di triwulan IV-2008.

**Tabel 1.9. Nilai Tambah Bank Umum di Jawa Barat (Rp Miliar)**

Nilai Tambah	2007	2008				2009	Pertumbuhan Tw.IV-2008 (yoy)	Pertumbuhan Tw.I-2009 (yoy)
	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I		
Bank Umum Pemerintah	2.998	870	1.878	3.040	4.182	1.213	39,50%	39,36%
Bank Swasta Nasional	1.872	544	1.158	1.757	2.246	504	19,96%	-7,29%
Bank Asing dan Campuran	153	37	72	100	104	(11)	-32,02%	-130,83%
<b>Total</b>	<b>5.023</b>	<b>1.452</b>	<b>3.108</b>	<b>4.897</b>	<b>6.532</b>	<b>1.707</b>	<b>30,04%</b>	<b>17,60%</b>

Sumber: LBU KBI Bandung

**Tabel 1.10. Perkembangan Persewaan Bangunan**

Jenis Properti	2007	2008				2009	Pertumbuhan Tw.IV-2008 (yoy)	Pertumbuhan Tw.I-2009 (yoy)
	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I		
Sewa Kantor	18.230	18.230	26.563	25.181	25.181	25.181	38,13%	38,13%
Sewa Pusat Perbelanjaan	57.620	57.880	58.325	58.437	58.437	58.482	1,42%	1,04%
Sewa Apartemen	474	474	474	474	474	468	0,00%	-1,27%

Sumber: Survei Properti Komersial Kota Bandung

## 2.5. Sektor Bangunan

**Sektor bangunan Jawa Barat diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 8,5% (yoy) pada triwulan I-2009, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 19,2% (yoy).** Kondisi ini tercermin dari hasil Survei Properti Komersial KBI Bandung triwulan I-2009 (Tabel 1.11). Hampir seluruh jenis properti mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan I-2009, dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV-2008, meliputi perkantoran sewa, pusat perbelanjaan sewa dan jual, serta apartemen jual. Di lain sisi, jumlah kamar di hotel bintang 3, 4, dan 5 mengalami sedikit peningkatan pertumbuhan, walaupun tidak signifikan, pada triwulan I-2009 ini.

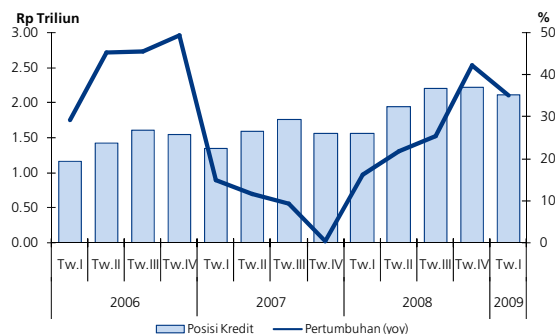
**Tabel 1.11. Perkembangan Properti Komersial**

Jenis Properti	2007	2008				2009	Pertumbuhan Tw.IV-2008 yoy (%)	Pertumbuhan Tw.I-2009 yoy (%)
	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I		
Perkantoran Sewa (m <sup>2</sup> )	18.230	18.680	26.563	25.181	25.181	25.181	38,1%	34,8%
Pusat Perbelanjaan Sewa dan Jual (m <sup>2</sup> )	104.693	106.260	107.040	107.152	107.152	105.555	2,3%	-0,7%
Apartemen Jual (unit)	403	408	558	558	558	558	38,5%	36,8%
Hotel Bintang 3,4, dan 5 (jumlah kamar)	1.261	1.274	1.420	1.436	1.414	1.432	12,2%	12,4%

Sumber: Survei Properti Komersial Kota Bandung

Di sisi pembiayaan, posisi kredit perbankan ke sektor konstruksi mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan triwulan IV-2008. Posisi kredit tumbuh 35,02% (yoy) atau mencapai Rp2,12 triliun pada triwulan I-2009, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 42,33% (yoy).

**Grafik 1.36. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Konstruksi**



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

## 2.6. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi pada triwulan I-2009 diperkirakan tumbuh 4,7% (yoy), lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV-2008 yang sebesar 0,7% (yoy). Salah satu indikator peningkatan kinerja subsektor pengangkutan adalah jumlah penumpang angkutan udara dan angkutan darat. Jumlah penumpang kereta api di Daerah Operasi Jawa Barat (meliputi Bandung dan Cirebon) tumbuh 16,30% (yoy) pada triwulan I-2009 (Tabel 1.12), sementara jumlah kendaraan yang melintasi 12 gerbang tol di Jawa Barat rata-rata tumbuh 3,65% (yoy) (Tabel 1.13). Khusus angkutan udara, jumlah penumpang angkutan udara di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, masih mencatat penurunan namun tidak sebesar penurunan pada triwulan IV-2008. Pada triwulan I-2009, jumlah penumpang angkutan udara turun 15,47% (yoy), setelah turun 16,30% (yoy) pada triwulan IV-2008.

**Tabel 1.12. Jumlah Penumpang Kereta Api Daerah Operasi Jawa Barat (Bandung dan Cirebon) (Juta Penumpang)**

Kelas	2007	2008				2009	Pertumbuhan Tw.IV-08 (yoy)	Pertumbuhan Tw.I-09 (yoy)
	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I		
Eksekutif	0,24	0,23	0,30	0,33	0,32	0,28	32,64%	20,41%
Bisnis	0,21	0,20	0,26	0,33	0,32	0,27	49,01%	34,91%
Ekonomi	0,42	0,37	0,41	0,46	0,49	0,41	18,24%	9,15%
Lokal Bisnis	0,30	0,26	0,28	0,33	0,33	0,36	10,66%	41,87%
Lokal Ekonomi	1,84	1,74	1,88	2,01	2,23	1,94	20,93%	11,41%
<b>Total</b>	<b>3,01</b>	<b>2,80</b>	<b>3,12</b>	<b>3,45</b>	<b>3,69</b>	<b>3,25</b>	<b>22,48%</b>	<b>16,30%</b>

Sumber: PT Kereta Api DAOP Jawa Barat

Catatan: terdiri dari DAOP Bandung dan Cirebon

Tabel 1.13. Jumlah Kendaraan yang Melintasi 12 Gerbang Tol di Jawa Barat

Gerbang Tol	Tw.I-08		Tw.I-09		Pertumbuhan (yoy)	
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
Sadang	361.618	347.711	393.714	377.812	8,9%	8,7%
Jatiluhur	295.241	296.289	308.102	313.222	4,4%	5,7%
Padalarang Barat	1.591.122	1.804.623	1.689.950	1.886.200	6,2%	4,5%
Padalarang	1.395.247	1.336.542	1.492.629	1.391.195	7,0%	4,1%
Baros 1	495.861	703.182	474.804	712.583	-4,2%	1,3%
Baros 2	701.746	524.179	711.611	507.080	1,4%	-3,3%
Pasteur	2.303.580	2.243.763	2.387.054	2.315.270	3,6%	3,2%
Pasir Koja	1.331.497	1.047.391	1.376.649	1.116.020	3,4%	6,6%
Kopo	961.845	1.037.162	996.679	1.046.025	3,6%	0,9%
M Toha	746.749	820.330	790.560	861.141	5,9%	5,0%
Buah Batu	1.151.188	1.256.681	1.174.806	1.275.471	2,1%	1,5%
Cileunyi	1.647.642	1.660.909	1.700.145	1.707.876	3,2%	2,8%
<b>TOTAL</b>	<b>12.983.336</b>	<b>13.078.762</b>	<b>13.496.703</b>	<b>13.509.895</b>	<b>4,0%</b>	<b>3,3%</b>

Sumber: PT Jasa Marga Kantor Cabang Purbaleunyi

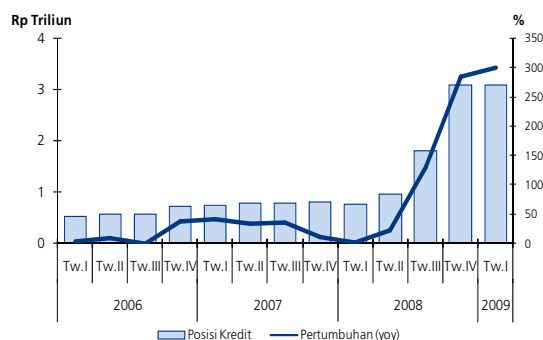
Tabel 1.14. Jumlah Penumpang Domestik dan Internasional di Bandara Husein Sastranegara

Domestik	2007	2008				2009	Pertumbuhan Tw.IV-08 (yoy)	Pertumbuhan Tw.I-09 (yoy)
	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I		
Keberangkatan	40,962	29,787	24,935	20,886	23,624	19,679	-42.33%	-33.93%
Kedatangan	37,609	27,516	23,745	20,400	20,816	18,811	-44.65%	-31.64%
<b>Total</b>	<b>78,571</b>	<b>57,303</b>	<b>48,680</b>	<b>41,286</b>	<b>44,440</b>	<b>38,490</b>	<b>-43.44%</b>	<b>-32.83%</b>
Internasional	2007	2008				2009	Pertumbuhan Tw.IV-08 (yoy)	Pertumbuhan Tw.I-09 (yoy)
	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I		
Keberangkatan	12,722	17,662	20,947	19,199	21,263	19,844	67.14%	12.35%
Kedatangan	13,142	19,564	22,290	22,510	21,762	21,571	65.59%	10.26%
<b>Total</b>	<b>25,864</b>	<b>37,226</b>	<b>43,237</b>	<b>41,709</b>	<b>43,025</b>	<b>41,415</b>	<b>66.35%</b>	<b>11.25%</b>
Total	2007	2008				2009	Pertumbuhan Tw.IV-08 (yoy)	Pertumbuhan Tw.I-09 (yoy)
	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I		
Keberangkatan	53,684	47,449	45,882	40,085	44,887	39,523	-16.39%	-16.70%
Kedatangan	50,751	47,080	46,035	42,910	42,578	40,382	-16.10%	-14.23%
<b>Total</b>	<b>104,435</b>	<b>94,529</b>	<b>91,917</b>	<b>82,995</b>	<b>87,465</b>	<b>79,905</b>	<b>-16.25%</b>	<b>-15.47%</b>

Sumber: PT Persero Angkasa Pura II

Dari segi pembiayaan, penyaluran kredit oleh bank umum di Jawa Barat ke sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan signifikan. Nilai *outstanding* kredit pada triwulan I-2009 tumbuh 300,4% (yoy) dan mencapai Rp3,09 triliun. Nilai tersebut tumbuh meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 283,6% (yoy). Peningkatan kredit yang signifikan ke sektor pengangkutan dan komunikasi terjadi sejak triwulan III-2008.

Grifik 1.37. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Pengangkutan dan Komunikasi



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

## 2.7. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

Sektor listrik, gas, dan air bersih diperkirakan tumbuh 3,4% (yoy) pada triwulan I-2009, tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan pada triwulan IV-2008. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pada subsektor listrik, sebagai subsektor penyumbang nilai tambah terbesar pada sektor listrik, gas, dan air bersih.

**Peningkatan pada subsektor listrik terlihat dari indikator pemakaian listrik di Jawa Barat.**

Jumlah pemakaian listrik pada triwulan I-2009 di Jawa Barat tumbuh 14,17% (yoy), dan mencapai 6.858 juta Kwh. Peningkatan konsumsi listrik tersebut terjadi pada konsumsi listrik rumah tangga, sedangkan konsumsi listrik industri mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini diperkirakan terjadi akibat penurunan produksi yang dilakukan oleh industri pengolahan di Jawa Barat, seiring dengan menurunnya permintaan.

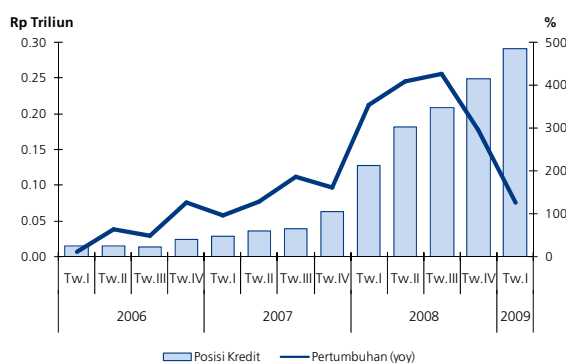
**Tabel 1.15. Pemakaian Listrik di Jawa Barat (Juta Kwh)**

Pengguna	2007	2008				2009	Pertumbuhan Tw.IV-08 (yoy)	Pertumbuhan Tw.I-09 (yoy)
	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I		
Rumah Tangga	2,457	2,383	2,419	2,513	2,611	2,656	6.29%	11.45%
Industri	3,458	3,623	3,807	3,918	4,083	4,202	18.07%	15.97%
<b>Total</b>	<b>5,915</b>	<b>6,006</b>	<b>6,226</b>	<b>6,431</b>	<b>6,694</b>	<b>6,858</b>	<b>13.18%</b>	<b>14.17%</b>

Sumber: PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Dilihat dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit ke sektor listrik, gas, dan air bersih tumbuh 126,77% (yoy) pada triwulan I-2009, mencapai nilai sebesar Rp290,52 miliar. Namun, pertumbuhan kredit tersebut masih lebih lambat dibandingkan triwulan IV-2008 yang tercatat tumbuh sebesar 297,17% (yoy).

**Grafik 1.38. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih**

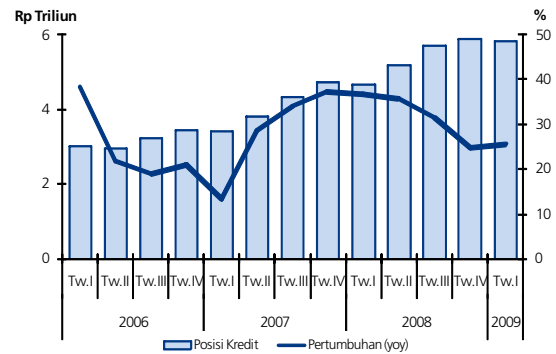


Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

## 2.8. Sektor Jasa-Jasa

Nilai tambah sektor jasa-jasa diperkirakan tumbuh 0,4% (yoy) pada triwulan I-2009, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV-2008 yang sebesar 3,8% (yoy). Namun demikian, dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit ke sektor jasa-jasa masih tumbuh cukup baik. Penyaluran kredit ke sektor jasa-jasa tumbuh 25,49% (yoy) pada triwulan I-2009, sedikit lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2008 yang sebesar 24,68% (yoy).

**Grafik 1.39. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Jasa Dunia Usaha dan Sosial**



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

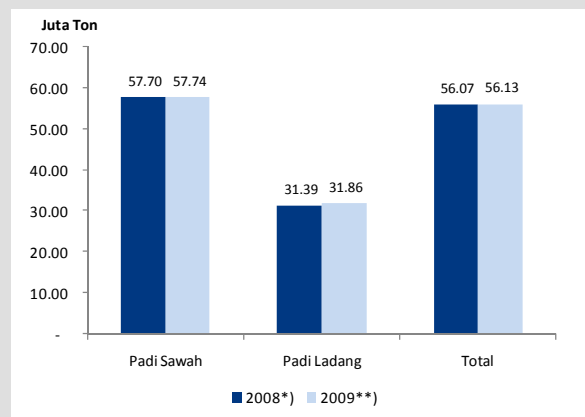
**BOKS 1**

**PROSPEK PRODUKSI PERTANIAN JAWA BARAT TAHUN 2009**

Menurut Angka Ramalan I BPS, produksi padi dan jagung pada tahun 2009 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2008, sedangkan produksi kedelai diperkirakan mengalami penurunan. Selama tahun 2009, produksi padi di Jawa Barat diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008. Produksi padi diperkirakan meningkat sebesar 123.744 ton, atau tumbuh 1,22% dibandingkan tahun 2008. Peningkatan terjadi baik padi sawah (meningkat 1,15%) maupun padi ladang (meningkat 3,33%).

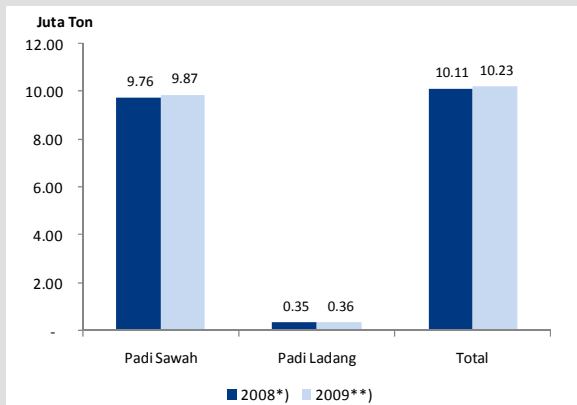
Peningkatan produksi padi tersebut diperkirakan karena peningkatan produktivitas dan luas panen padi. Produktivitas padi meningkat 0,11%, dari 56,07 kuintal/hektar pada tahun 2008 menjadi 56,13 kuintal per hektar pada tahun 2009 (Grafik 1). Sementara itu, luas panen padi pada tahun 2009 diperkirakan meningkat 1,12% mencapai 1.822.941 hektar (Grafik 4). Kenaikan luas panen padi sawah sebesar 1,08%, sementara luas panen padi ladang meningkat 1,79%. Perkiraan tersebut sejalan dengan pernyataan beberapa kelompok tani di Jawa Barat yang diwawancarai KBI Bandung. Pada umumnya mereka merasakan peningkatan produktivitas tahun ini. Kondisi tersebut didukung oleh cukupnya pasokan air dan pupuk, serta faktor cuaca. Musim kemarau diperkirakan lebih pendek dibandingkan tahun 2008, yang akan sangat mendukung peningkatan produktivitas padi. Untuk menjaga kelancaran pasokan air pada musim kering, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan bantuan berupa pompanisasi telah disiapkan.

**Grafik 1. Perbandingan Produktivitas Padi di Jawa Barat (Ku/Ha)**



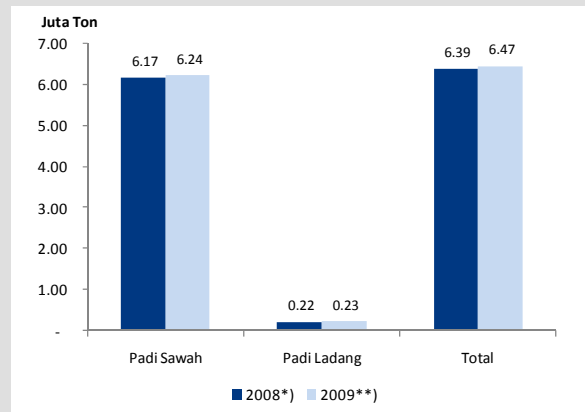
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat  
 \*) Angka Sementara  
 \*\*) Angka Ramalan I

**Grafik 2. Produksi Gabah di Jawa Barat**



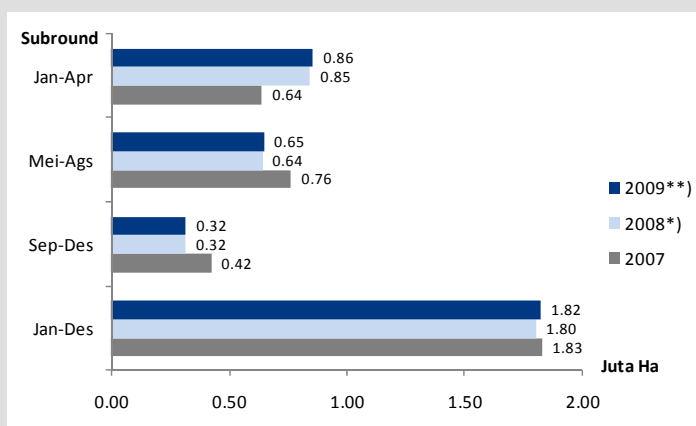
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat  
 \*) Angka Sementara  
 \*\*) Angka Ramalan I

**Grafik 3. Produksi Beras di Jawa Barat**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat  
 \*) Angka Sementara  
 \*\*) Angka Ramalan I

Grafik 4. Luas Panen per Musim Tanam Padi Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

\*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Ramalan I

Dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan beberapa program pada tahun 2009. Program Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) merupakan salah satu program yang menjadi prioritas Pemprov Jawa Barat di tahun 2009. Program tersebut ditujukan untuk menjamin ketersediaan pangan di Jawa Barat, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan petani. Program lainnya adalah Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), berupa bantuan dari dana APBN yang disalurkan melalui perbankan langsung ke kelompok tani dengan nilai Rp100 juta/gabungan kelompok tani (gapoktan). Di Jawa Barat, sebanyak 750 gapoktan direncanakan akan menerima dana bantuan tersebut. Selain itu, terdapat juga fasilitas rumah kompos (minimal untuk 1.000 desa), dukungan fasilitas biaya operasional petugas provinsi di lapangan, dukungan bantuan Gubernur bagi peningkatan kinerja penyuluh pertanian lapangan, fasilitasi terobosan pasca panen (terpal, sabit bergerigi, *tresher*) dan berbagai alat dan mesin pertanian, serta fasilitasi pengembangan pemasaran hasil pertanian (promosi, pameran, pasar tani, dan kemitraan pemasaran).

Produktivitas jagung diperkirakan akan meningkat 0,19% pada tahun 2009. Peningkatan produksi ini disebabkan peningkatan produktivitasnya, yaitu dari 53,85 kuintal/hektar di tahun 2008 menjadi 54,23 kuintal/hektar di tahun 2009. Sementara itu, luas panen jagung di tahun 2009 diperkirakan turun sebesar 622 hektar (atau 0,52%).

Berbeda dengan dua komoditas pertanian sebelumnya, produksi kedelai diperkirakan mengalami penurunan pada tahun 2009. Dibandingkan tahun 2008, produksi kedelai turun 754 ton, atau sebesar 2,29% pada tahun 2009. Walaupun produktivitas kedelai meningkat 3,7% dari 13,82 kuintal/hektar menjadi 14,33 kuintal/hektar, penurunan luas panen sebesar 1.361 hektar atau 5,72% menjadi kendala dalam peningkatan produksi kedelai.

Tabel 1. Perkembangan Komoditas Jagung di Jawa Barat

Kondisi Jagung	2008 *)	2009 **)	Pertumbuhan
Produksi (Ton)	640.647	641.880	0,19%
Luas Panen (Ha)	118.976	118.354	-0,52%
Hasil/Ha (Ku)	53,85	54,23	0,72%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

\*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Ramalan I

Tabel 2. Perkembangan Komoditas Kedelai di Jawa Barat

Kondisi Kedelai	2008	2009	Pertumbuhan
Produksi (Ton)	32915	32161	-2,29%
Luas Panen (Ha)	23810	22449	-5,72%
Hasil/Ha (Ku)	13,82	14,33	3,63%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

\*) Angka Sementara

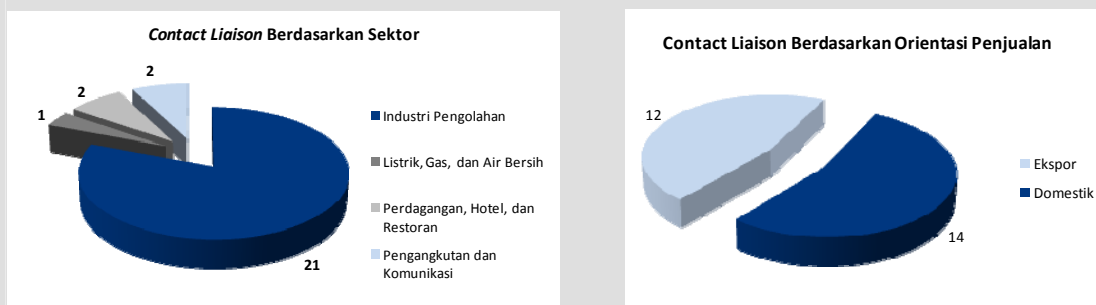
\*\*\*) Angka Ramalan I

## BOKS 2

### PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI JAWA BARAT

Pada triwulan I-2009, KBI Bandung melaksanakan wawancara kepada 26 perusahaan, 1 asosiasi, dan 1 pengelola kawasan industri di wilayah Jawa Barat.

**Grafik 1. Distribusi Responden**



#### **Kondisi Permintaan Ekspor**

Berdasarkan informasi dari 12 perusahaan yang berorientasi ekspor, 9 perusahaan mengalami penurunan penjualan sedangkan 3 perusahaan lainnya masih mengalami peningkatan penjualan dibandingkan triwulan IV-2008. Sembilan perusahaan yang mengalami penurunan ekspor bergerak pada subsektor Industri Pengolahan Tekstil & Alas Kaki, Barang Kayu (*furniture*), Kimia (komponen plastik), Logam Dasar Besi & Baja, serta Barang Lainnya (*printer*). Penurunan ekspor secara umum disebabkan oleh penundaan dan/atau pembatalan pesanan, akibat penurunan daya beli negara tujuan ekspor terutama Amerika Serikat dan Eropa. Penurunan tersebut menyebabkan perusahaan menurunkan kapasitas utilisasi dan melakukan berbagai strategi efisiensi, seperti mengurangi jam kerja produksi, baik melalui penghilangan *overtime* atau pengurangan jam kerja mesin. Adapun tiga perusahaan yang mengalami peningkatan ekspor berada pada subsektor Industri Pengolahan Tekstil (kain polyester, produk pakaian olahraga, kemeja, dan topi). Peningkatan ekspor terjadi pada perusahaan dengan orientasi penjualan ke negara dengan tingkat permintaan masih tinggi, seperti negara-negara di Timur Tengah, ASEAN, dan sebagian Asia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu pengelola kawasan industri di Cikarang (70% dari 175 perusahaan Industri pengolahan yang berada pada kawasan tersebut berorientasi ekspor), diketahui bahwa dampak krisis dirasakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang Otomotif, Elektronik, dan Kimia (Plastik). Hanya industri makanan jadi dan minuman yang relatif stabil, tidak terkena dampak krisis.

#### **Kondisi Permintaan Domestik**

Berdasarkan informasi dari 14 perusahaan berorientasi pasar domestik, 7 perusahaan mengalami penurunan penjualan, sedangkan 7 perusahaan mengalami peningkatan penjualan. Tujuh perusahaan yang mengalami penurunan penjualan berada pada subsektor Industri Pengolahan Alat Angkutan (*Shock Absorber, Steering System, dan Body Parts for Automotive*); Logam Dasar Besi & Baja (Kawat dan Kabel Elektrik); Tekstil (Benang dan Kain); Kimia (Plastik); Hasil Hutan Lainnya (Mendong); dan Barang Lainnya (Kursi & Meja Perkantoran/Sekolah dan *Nursing Bed*, yang berbahan dasar besi). Penurunan tersebut sebagian besar berlangsung sejak triwulan IV-2008, yang disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, penurunan daya beli masyarakat akibat peningkatan uang muka pembiayaan dan masih relatif tingginya suku bunga, khususnya terhadap produk otomotif dan elektronik. *Kedua*, persaingan dengan produk impor negara lain, khususnya dari China (untuk produk elektronik dan tekstil). *Ketiga*, persaingan di pasar domestik yang semakin ketat sehubungan peralihan orientasi kompetitor dari pasar ekspor ke domestik. *Keempat*, belum optimalnya realisasi anggaran pemerintah terkait pembelanjaan produk tertentu (*furniture* untuk dinas, perkantoran dan sekolah). Sementara itu, tujuh perusahaan lainnya yang mengalami peningkatan penjualan berada pada subsektor Perdagangan Eceran (makanan/minuman jadi, bahan makanan, pakaian jadi, dll.), Industri Pengolahan Makanan (pakan ternak) dan Kimia (farmasi), Jasa Penunjang Komunikasi, subsektor Listrik, yang disebabkan tingkat permintaan domestik yang tetap tinggi terhadap produk-produk kebutuhan pokok.



### **Ekspektasi Perusahaan**

Dari 26 perusahaan, terdapat 12 perusahaan yang pesimis terhadap kondisi perusahaan 1 tahun ke depan. Sementara itu, 14 perusahaan lainnya masih tetap optimis. Pendorong sikap pesimis para pelaku usaha tersebut adalah ketidakpercayaan perusahaan terhadap kondisi permintaan (baik pasar dunia maupun domestik), sehingga muncul kekhawatiran dampak krisis baru dialami perusahaan pada satu tahun ke depan, serta penurunan minat masyarakat terhadap produk domestik (khusus untuk produk telekomunikasi).

Sementara itu, sikap optimisme 14 perusahaan lainnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- Kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor sehingga mendorong beberapa merek luar negeri berproduksi di Indonesia.
- Perusahaan yakin terhadap strategi yang akan dijalankan untuk meningkatkan penjualan, seperti mencari pasar baru yang potensial dan mengembangkan jenis produk baru.
- Peningkatan permintaan dari Timur Tengah dan ASEAN sebagai negara tujuan ekspor yang potensial (khusus untuk perusahaan di industri Tekstil dan Produk Tekstil).
- Adanya peralihan order dari kompetitor yang diperkirakan tidak dapat bertahan dari dampak krisis keuangan global.
- Adanya strategi dalam menghadapi pengaruh krisis keuangan global, antara lain melakukan *hedging* terhadap valas yang digunakan.
- Diverifikasi produk.

## BOKS 3

## LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN DAN PERLUASAN PASAR PRODUK TPT

Munculnya Vietnam sebagai kekuatan baru industri TPT dunia berpotensi membawa dampak positif terhadap industri TPT nasional, termasuk Jawa Barat. Vietnam memiliki beberapa kelebihan dibandingkan Indonesia dalam industri garmen. *Pertama*, Vietnam memperoleh keistimewaan dari Amerika Serikat berupa bea masuk 0%, sedangkan bea masuk produk TPT Indonesia ke Amerika Serikat adalah 13-16%. *Kedua*, Vietnam sangat menarik bagi investor TPT asal Korea, Jepang, dan Cina karena upah minimum yang relatif rendah (Vietnam: USD50, Indonesia: USD70-100), perizinan yang cepat, aturan ketenagakerjaan yang lebih longgar, serta pelarangan demo tenaga kerja. Bea masuk 0% serta kehadiran investor asal Jepang mempermudah masuknya produk garmen Vietnam ke Jepang, sedangkan produk TPT Indonesia mengalami hambatan untuk masuk langsung ke Jepang karena Indonesia belum memiliki informasi yang lengkap mengenai selera pasar Jepang. Akses pasar garmen Vietnam ke Jepang merupakan peluang pasar bagi industri hulu TPT di Indonesia. Dengan pasokan bahan baku dari Indonesia, maka bea masuk 0% ke Jepang dapat berlaku, karena Jepang mensyaratkan minimal 45% bahan baku produk tekstil yang masuk ke negara tersebut berasal dari ASEAN. Pesaing produsen bahan baku garmen di ASEAN bagi Indonesia adalah Thailand. Penetrasi secara ekspansif ke pasar Vietnam telah dilakukan sejak Januari 2009, dengan melakukan B2B (*business to business*) atau *business matching*. Kegiatan untuk mensinergikan industri garmen Vietnam dengan industri tekstil Indonesia akan diluncurkan pada April, Agustus, dan Oktober 2009. Melalui penetrasi tersebut, *market share* produk TPT Indonesia di Vietnam diharapkan dapat meningkat dari 5% menjadi 15% pada tahun 2009.

Untuk mendorong kinerja industri TPT lokal, API mengusulkan beberapa program untuk dilaksanakan pada tahun 2009. Program tersebut antara lain:

- Meningkatkan pasar dan pemasaran, yakni dengan mendorong kerjasama perdagangan (*Free Trade Area ASEAN-Uni Eropa*), meningkatkan penetrasi pasar ke negara-negara ASEAN sebagai pasar domestik sekaligus sebagai pintu ekspor ke mancanegara, memperketat masuknya barang-barang impor, serta mendorong pertumbuhan industri kreatif.
- Meningkatkan investasi dan melakukan modernisasi permesinan. Saat ini, mayoritas pembiayaan industri TPT di Indonesia berasal dari luar negeri, karena sulitnya memperoleh pembiayaan kredit perbankan di dalam negeri. Pada tahun 2009, diharapkan terjadi peningkatan investasi lebih dari USD 400 juta, khususnya di sektor garmen. Sementara itu, pemerintah berencana menggulirkan dana sebesar Rp240 miliar untuk bantuan restrukturisasi permesinan pada triwulan II-2009, sebagai diskon harga mesin dan subsidi bunga bagi investasi di industri TPT. Bantuan tersebut menurun bila dibandingkan dengan tahun 2008 (Rp350 miliar), namun target penerima bantuan ditingkatkan. Terdapat dua skema dalam program ini. Skema pertama berupa diskon harga mesin 10% untuk perusahaan TPT skala besar dengan plafon sebesar Rp213 miliar, sedangkan skema kedua berupa subsidi bunga kredit pembelian mesin untuk industri skala menengah kecil. Melalui program ini, Departemen Perindustrian menargetkan investasi produsen TPT senilai USD218 juta dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 22.000 orang (untuk skala nasional).
- Meningkatkan pasokan energi, dengan mendorong pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, mendukung diversifikasi energi di industri, dan mendukung efisiensi kinerja PLN.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, dengan mendorong pemerintah mengaktifkan Balai Latihan Kerja (BLK), mendukung penyelenggaraan pelatihan tingkat madya (untuk tenaga marketing dan merchandising).
- Membangun infrastruktur, dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi kinerja pelabuhan, memperbaiki akses jalan menuju pelabuhan dan sekitar sentra industri, mendorong investasi transportasi dengan kereta api dari kawasan industri ke pelabuhan.

## BOKS 4

## HASIL SURVEI DAMPAK KRISIS GLOBAL TERHADAP PEREKONOMIAN JAWA BARAT

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat yang dipicu oleh krisis pembiayaan perumahan di AS (*sub prime mortgage*) sejak pertengahan 2007 telah berkembang menjadi masalah serius dan mempengaruhi stabilitas perekonomian global. Sistem pasar bebas yang dianut oleh seluruh negara di dunia saat ini memungkinkan aliran dana bebas keluar masuk dari satu negara ke negara lain, akibatnya setiap negara yang terintegrasi penuh dengan sistem keuangan dunia atau mempunyai perekonomian terbuka dan perdagangan mancanegara yang dominan diperkirakan memiliki risiko terkena dampak krisis, yang tidak hanya berdampak pada perekonomian nasional, namun juga pada perekonomian daerah.

Untuk memperoleh data yang mampu memberikan informasi lebih terinci dan mendalam akan kondisi perekonomian di Jawa Barat terkait krisis keuangan global, maka KBI Bandung melakukan survei dampak krisis terhadap perekonomian Jawa Barat. Survei dilakukan kepada 76 responden perusahaan yang bergerak di 8 sektor perekonomian (selain sektor pertambangan dan pengalihan).

Para responden menyatakan bahwa krisis keuangan global yang dirasakan oleh perusahaan ditransmisikan terutama melalui aspek nilai tukar. Bila persepsi tersebut dipisahkan secara sektoral, maka sektor pertanian menyatakan bahwa jalur transmisi krisis keuangan global terhadap perkembangan usaha adalah melalui jalur perdagangan domestik, dengan didasari atas adanya indikasi serapan permintaan domestik menurun. Sementara, responden di sektor industri pengolahan cenderung menyatakan bahwa transmisi krisis keuangan global adalah melalui nilai tukar dan perdagangan internasional, akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang mengakibatkan bahan baku impor menjadi lebih mahal. Hal ini juga dirasakan oleh perusahaan di sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sementara itu, responden di sektor bangunan, perdagangan, hotel, dan restoran (PHR), pengangkutan dan komunikasi, serta jasa-jasa merasakan krisis global tersebut ditransmisikan melalui aspek pembiayaan.

Hingga triwulan I-2009, krisis keuangan global berdampak terhadap penurunan kapasitas produksi dan tidak berdampak terhadap ketenagakerjaan, baik tenaga kerja struktural maupun tenaga kontrak. Khusus untuk sektor industri pengolahan, sebagai sektor dengan dampak krisis keuangan global terbesar di Jawa Barat, krisis berdampak terhadap permintaan, penjualan, biaya, keuntungan, dan kapasitas terpakai. Penurunan terhadap permintaan dan penjualan terjadi akibat turunnya daya beli konsumen, khususnya dari negara-negara tujuan ekspor utama. Sedangkan biaya mengalami peningkatan akibat peningkatan nilai harga bahan baku impor, sebagai dampak depresiasi nilai tukar rupiah. Kemudian, penurunan permintaan terhadap output produksi akan menurunkan jumlah kapasitas produksi terpakai perusahaan, sebagai salah satu strategi efisiensi.

Dalam menghadapi krisis keuangan tersebut, beberapa langkah-langkah dilakukan oleh para pengusaha untuk meminimalisasi dampak negatif yang terjadi (Tabel 1). Para responden yang bergerak di sektor industri pengolahan mengantisipasi melalui pencarian pasar baru dan pengurangan *budget* pemasaran. Sementara itu, di sisi ketenagakerjaan, sektor industri pengolahan telah melakukan pengurangan tenaga kerja melalui pemutusan perpanjangan kontrak bagi pegawai kontrak serta penyesuaian gaji. Dari sisi operasional, pengurangan pembelian bahan baku dan penurunan kapasitas terpakai dilakukan sebagai langkah efisiensi untuk menyesuaikan terjadinya penurunan permintaan. Sedangkan dari sisi keuangan, responden melakukan efisiensi terhadap *budget* operasional dan bersikap hati-hati dalam menjalankan transaksi perusahaan, sebagai langkah meminimalkan risiko.

**Tabel 1. Langkah-langkah Responden Dalam Menghadapi Krisis Keuangan Global**

Strategi Perusahaan	Sektor			
	Pertanian	Industri Pengolahan	Jasa-Jasa*	All
<b>Marketing</b>				
Mengurangi <i>budget</i> untuk kegiatan marketing	25.0%	27.9%	17.5%	<b>22.8%</b>
Meningkatkan kegiatan promosi	16.7%	11.5%	27.0%	<b>19.1%</b>
Memperkenalkan produk/brand baru	-	14.8%	27.0%	<b>19.1%</b>
Mencari pasar baru	41.7%	39.3%	22.2%	<b>31.6%</b>
Lainnya	16.7%	6.6%	6.3%	<b>7.4%</b>

<b>Ketenagakerjaan</b>				
Tidak melakukan perpanjangan kontrak bagi pegawai kontrak	25.0%	31.1%	30.6%	<b>30.3%</b>
Melakukan perumahan sementara bagi pegawai kontrak	12.5%	11.1%	8.3%	<b>10.1%</b>
Melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pegawai tetap	-	-	-	-
Perumahan sementara bagi pegawai tetap	0.0%	4.4%	2.8%	<b>3.4%</b>
Melakukan penyesuaian gaji/honor	50.0%	24.4%	36.1%	<b>31.5%</b>
Lainnya	12.5%	28.9%	22.2%	<b>24.7%</b>

<b>Operasional</b>				
Mengganti peralatan dengan alat yang lebih efisien	20.0%	19.3%	29.3%	<b>23.1%</b>
Mengurangi kapasitas produksi	30.0%	26.3%	17.1%	<b>23.1%</b>
Mengurangi pembelian bahan baku	10.0%	35.1%	14.6%	<b>25.0%</b>
Merubah spesifikasi produk	20.0%	7.0%	7.3%	<b>8.3%</b>
Lainnya:	20.0%	12.3%	31.7%	<b>20.4%</b>

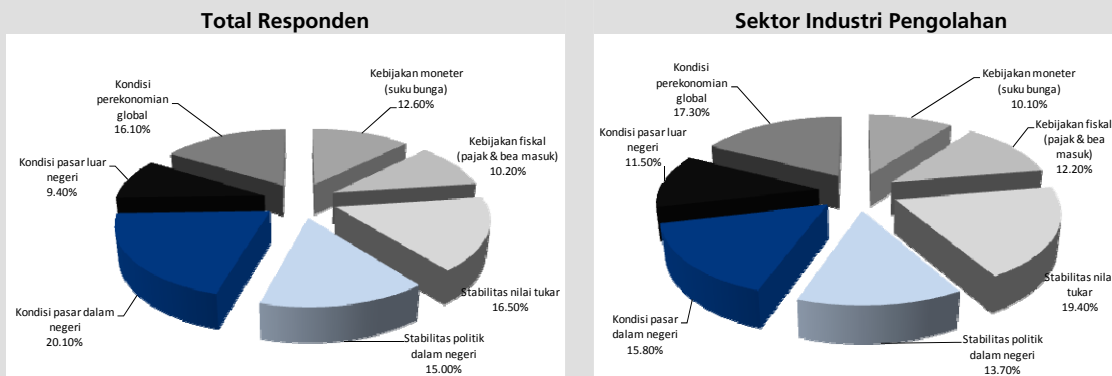
<b>Keuangan</b>				
Melakukan efisiensi budget operasional	50.0%	56.9%	53.7%	<b>54.3%</b>
Mengurangi investasi perusahaan	8.3%	15.7%	26.8%	<b>19.0%</b>
Melakukan langkah minimalisasi resiko dalam transaksi perusahaan	16.7%	27.5%	14.6%	<b>21.0%</b>
Lainnya	25.0%	-	4.9%	<b>5.7%</b>

Keterangan :

\* Sektor Jasa-jasa adalah sektor-sektor selain sektor pertanian dan industri pengolahan

Terhadap kegiatan usaha di masa mendatang, yaitu hingga periode triwulan III-2009, para responden memperkirakan indikator permintaan, penjualan, biaya, *margin* keuntungan, jumlah tenaga kerja struktural, jumlah tenaga kerja kontrak, investasi, serta kapasitas terpakai cenderung mengalami penurunan, kecuali untuk indikator biaya yang diperkirakan stabil. Beberapa faktor diyakini oleh para responden dapat membuat kondisi usaha pada periode ke depan lebih baik (Grafik 1). Dilihat dari keseluruhan responden, para pelaku usaha mengharapkan membaiknya kondisi pasar dalam negeri merupakan faktor utama pemicu perbaikan kondisi usaha. Sementara itu, responden di sektor industri pengolahan mengharapkan stabilitas nilai tukar rupiah dan perbaikan kondisi perekonomian global sebagai faktor-faktor utama yang dapat meningkatkan kembali kinerja usaha para responden di depan.

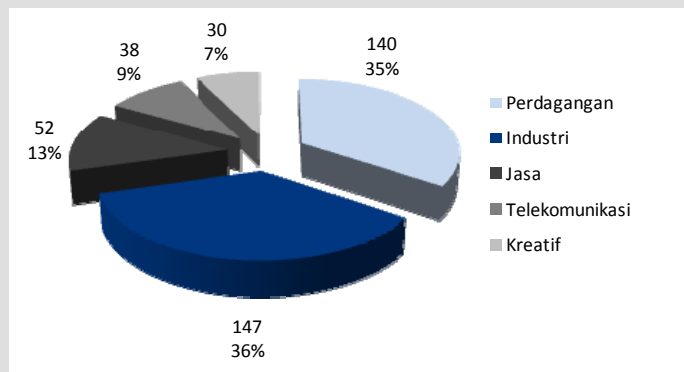
**Grafik 1. Faktor-faktor yang Membuat Kinerja Perusahaan Lebih Baik**



## BOKS 5 HASIL SURVEI DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KOTA BANDUNG

Krisis keuangan global dirasakan sudah mulai berimbas terhadap perekonomian daerah, antara lain melalui pelemahan daya beli masyarakat di negara-negara utama tujuan ekspor. Permintaan luar negeri yang merosot menyebabkan penumpukan stok hasil produksi dan memaksa pengusaha untuk mengurangi bahkan menunda produksinya. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh krisis keuangan global terhadap perekonomian daerah, khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pada triwulan I-2009 KBI Bandung melakukan survey kepada 407 pelaku UKM di Kota Bandung.

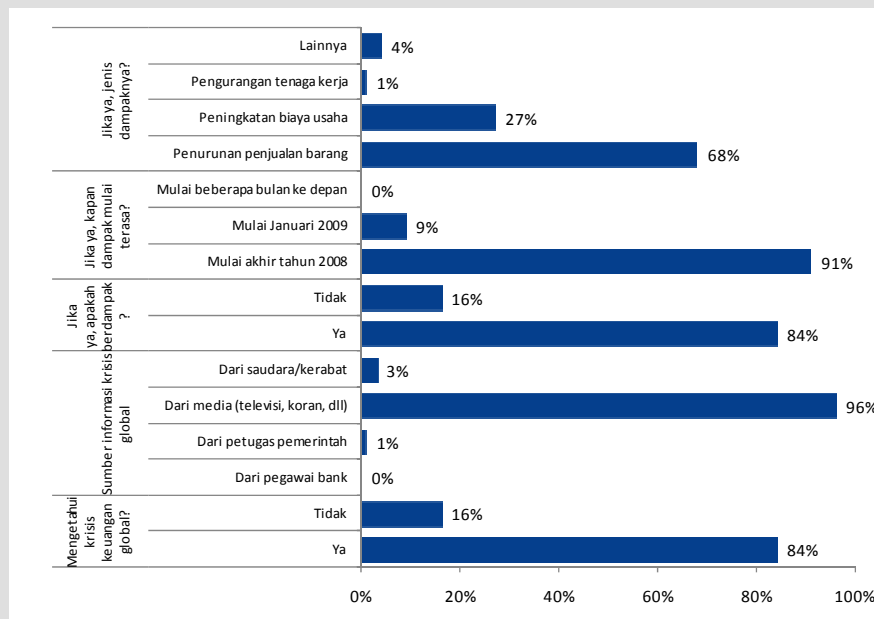
**Grafik 1. Responden Survei**



Sumber: Hasil Survei, KBI Bandung

Krisis global yang semula diduga akan mulai dirasakan pada tahun 2009 ternyata sudah mulai dirasakan oleh usaha kecil dan menengah pada akhir tahun 2008. Sebanyak 84% responden menyatakan bahwa krisis keuangan global telah berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan oleh para pelaku sejak akhir tahun 2008 (91%). Krisis keuangan global berdampak terhadap penurunan jumlah penjualan barang (68%) dan peningkatan biaya usaha (27%). Dari sisi tenaga kerja, hanya sedikit (1%) responden yang menyatakan melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai dampak krisis keuangan global tersebut.

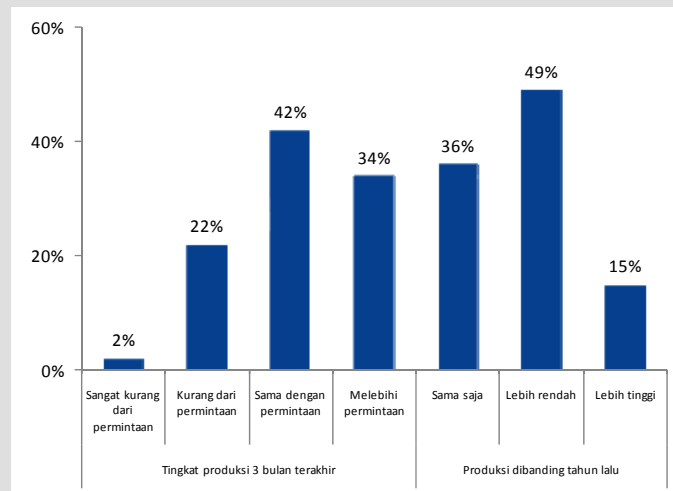
**Grafik 2. Krisis Global Terhadap Usaha Kecil dan Menengah**



Sumber: Hasil Survei, KBI Bandung

Hampir 50% responden menyatakan bahwa produksi/ penjualan selama tahun 2008 yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, responden lain mengatakan stagnan (36%), sedangkan sebagian kecil mengatakan terjadi kenaikan (15%). Dampak krisis semakin kuat melalui penegasan jawaban responden terhadap tingkat produksi tiga bulan terakhir, dimana 34% responden menyatakan bahwa permintaan tidak mampu menyerap seluruh produksi

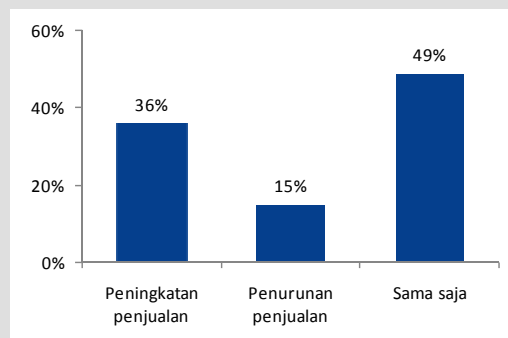
**Grafik 3. Kondisi Produksi**



Dari hasil survei ini, diperoleh informasi tentang beberapa permasalahan yang dihadapi UKM di Kota Bandung. Salah satu permasalahan adalah tingkat ketergantungan UKM terhadap bahan baku impor. Dengan ketergantungan tersebut, maka kelangsungan UKM di Kota Bandung sangat rentan terhadap bahan baku impor. Fluktuasi harga (nilai tukar rupiah) ataupun hambatan pasokan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dan instansi terkait kiranya dapat memberikan solusi dengan menawarkan bahan baku alternatif yang diproduksi di dalam negeri.

Mengenai prospek usaha UKM di Kota Bandung hingga semester I-2009, hanya 36% responden yang optimis bahwa penjualannya akan meningkat. Mayoritas responden (49%) memperkirakan penjualan akan stabil, sedangkan sisanya (15%) responden bersikap pesimis, dengan menyatakan bahwa akan terjadi penurunan penjualan.

**Grafik 4. Ekspektasi UKM**



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

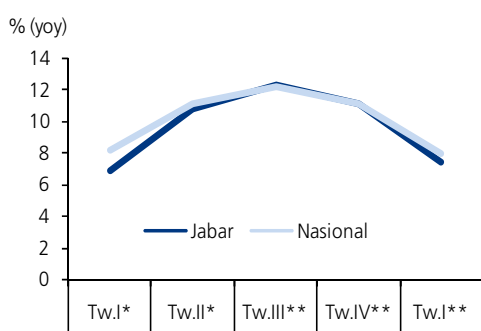
## BAB 2

# PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH



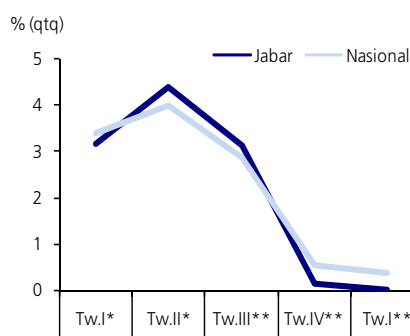
**Laju inflasi di Jawa Barat hingga triwulan I-2009 masih mengalami perlambatan.** Inflasi Jawa Barat pada triwulan I-2009 tercatat sebesar 7,45% (yoy) atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 11,11%. Angka inflasi Jawa Barat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional yang sebesar 7,96% (Grafik 2.1). Sementara itu, secara triwulanan, tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum (angka inflasi sama dengan 0%). Angka ini merupakan posisi terendah dari pola historisnya. Walaupun pada bulan Februari dan Maret 2009 Jawa Barat mengalami inflasi yang masing-masing sebesar 0,08% (mtm) dan 0,20%, deflasi bulan Januari 2009 yang sebesar 0,28% (mtm) mampu mengkompensasi kenaikan harga pada dua bulan tersebut. Dengan perkembangan tersebut, inflasi Jawa Barat lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi nasional triwulan I-2009 yang sebesar 0,36% (qtq) (Grafik 2.2).

**Grafik 2.1. Inflasi Tahunan Jawa Barat dan Nasional**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, TD 2002.  
Keterangan: \* Inflasi dengan Tahun Dasar 2002;  
\*\* Inflasi dengan Tahun Dasar 2007.

**Grafik 2.2. Inflasi Triwulanan Jawa Barat dan Nasional**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, TD 2002.  
Keterangan: \* Inflasi dengan Tahun Dasar 2002;  
\*\* Inflasi dengan Tahun Dasar 2007.

**Harga barang dan jasa di Jawa Barat pada triwulan I-2009 relatif stabil karena peningkatan tekanan dari faktor eksternal serta kenaikan harga kelompok bahan makanan dapat diimbangi dengan turunnya harga yang diatur oleh pemerintah (*administered price*), serta penurunan ekspektasi inflasi.** Tekanan kenaikan harga di luar negeri (*imported inflation*) meningkat setelah melewati level terendah pada triwulan sebelumnya. Dari sisi barang yang bergejolak (*volatile foods*), terjadi kenaikan harga akibat belum terjadi puncak panen padi serta adanya gangguan cuaca. Sementara, pelemahan tekanan inflasi didorong oleh penurunan harga BBM dan cenderung melambatnya tekanan permintaan. Kedua faktor tersebut yang selanjutnya menyebabkan penurunan ekspektasi inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya.

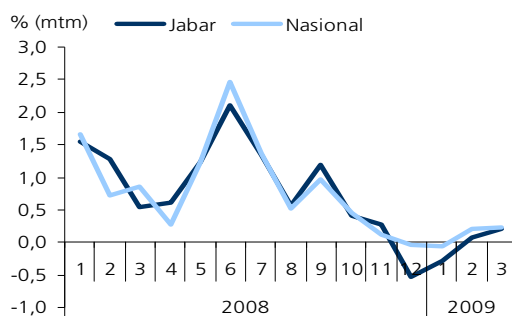
## 1. PERKEMBANGAN INFLASI

**Pada triwulan I-2009, laju inflasi menunjukkan penurunan tajam dari 11,11% (yoy) pada triwulan IV-2008 menjadi 7,45%.** Pelemahan tekanan inflasi terjadi pada hampir semua kelompok pembentuk inflasi kecuali kelompok sandang. Penurunan laju inflasi tertinggi dialami oleh kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan akibat dampak penurunan harga BBM. Sementara, dampak tidak langsung penurunan harga BBM tercermin dari penurunan tarif angkutan dalam dan luar kota. Inflasi kelompok bahan makanan menurun karena berkurangnya pengaruh kenaikan harga komoditas

strategis di pasar internasional pada triwulan yang sama tahun sebelumnya (*baseline effect*). Krisis keuangan global telah menaikkan tingkat persepsi risiko di pasar keuangan sehingga pelaku pasar beralih kepada investasi emas. Meningkatnya permintaan atas emas di pasar internasional menyebabkan kenaikan harga emas perhiasan di Indonesia termasuk di Jawa Barat.

**Secara triwulanan, tren penurunan inflasi yang telah terjadi sejak triwulan III-2008 berlanjut hingga triwulan I-2009.** Harga barang dan jasa yang stabil pada triwulan ini disebabkan oleh besarnya pengaruh penurunan harga yang diatur pemerintah (*administered price*), yakni BBM. Penurunan harga BBM selanjutnya berimbas terhadap penurunan tarif angkutan dalam kota dan luar kota pada bulan Januari 2009. Sementara itu, harga komoditas bahan makanan, produk makanan jadi, serta emas perhiasan mengalami kenaikan. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga cukup besar selama triwulan I-2009, antara lain bensin (premium dan pertamax), angkutan dalam kota, dan cabe merah, sedangkan komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain emas perhiasan, bawang merah, ikan mas, telur ayam ras, daging ayam ras, dan gula pasir.

**Grafik 2.3. Inflasi Bulanan Jawa Barat dan Nasional**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.  
Keterangan: data inflasi nasional bulan Juni 2008 tidak ditampilkan karena perbedaan tahun dasar. Pada grafik di atas, inflasi Jawa Barat berdasarkan Tahun Dasar 2002, sedangkan inflasi nasional sejak Juni 2008 berdasarkan Tahun Dasar 2007.

**Meskipun secara triwulanan, inflasi Jawa Barat cenderung menurun, secara bulanan menunjukkan tren meningkat (Grafik 2.3).**

Pada bulan Januari 2009, Jawa Barat mengalami deflasi sebesar 0,28% (mtm) akibat penurunan harga BBM pada pertengahan bulan. Sementara itu, pada bulan-bulan berikutnya, inflasi Jawa Barat bergerak naik dengan laju kenaikan yang minimum. Adapun, bila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi bulanan Jawa Barat masih lebih rendah.

## 1.1. INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

### Inflasi Tahunan

**Berdasarkan kelompok barang dan jasa, enam dari tujuh kelompok mengalami penurunan laju inflasi tahunan dan hanya inflasi kelompok sandang yang mengalami peningkatan (Tabel 2.1).** Kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan terbesar, yakni dari 12,78% (yoy) pada triwulan IV-2008 menjadi 3,53% pada triwulan I-2009 akibat penurunan harga BBM serta tarif angkutan dalam dan luar kota. Penurunan laju inflasi juga terjadi pada kelompok bahan makanan akibat berkurangnya pengaruh eksternal (penurunan harga komoditas di pasar internasional). Namun demikian, kelompok sandang mengalami peningkatan inflasi yang relatif tinggi dari 3,69% menjadi 6,83% karena kenaikan harga emas di pasar internasional.

Tabel 2.1. Inflasi Tahunan Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)

No.	Kelompok	2008				2009	Andil
		Tw.I*	Tw.II*	Tw.III**	Tw.IV**	Tw.I**	Tw.I**
1	Bahan makanan	11,53	17,53	18,41	16,11	11,67	2.58
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	5,05	9,51	10,96	12,45	10,08	1.81
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	5,27	6,17	7,82	6,76	4,97	1.27
4	Sandang	13,76	6,80	7,03	3,69	6,83	0.32
5	Kesehatan	9,37	9,12	10,17	10,52	5,43	0.21
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	7,94	6,59	7,78	8,61	7,15	0.53
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	1,10	13,74	16,13	12,78	3,53	0.65
<b>Umum</b>		<b>6.88</b>	<b>10.83</b>	<b>12.30</b>	<b>11.11</b>	<b>7.45</b>	<b>7.45</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

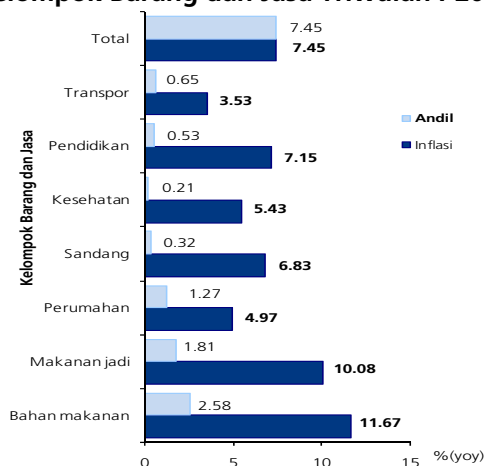
Keterangan:

\* Data inflasi Tahun Dasar 2002, gabungan tujuh kota (Bandung, Bekasi, Bogor, Sukabumi, Cirebon, Tasikmalaya, Banjar);

\*\* Data inflasi Tahun Dasar 2007, gabungan tujuh kota (Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Sukabumi, Cirebon, dan Tasikmalaya).

**Kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar menyumbang inflasi yang relatif tinggi, yakni mencapai lebih dari 1% (Grafik 2.4).** Meskipun demikian, inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan air bersih hanya sebesar 4,97%. Besarnya inflasi tahunan kelompok tersebut disebabkan oleh bobot IHK yang kedua terbesar setelah kelompok bahan makanan. Sementara, pada triwulan I-2009 kelompok kesehatan menyumbang inflasi terendah, yakni sebesar 0,21%.

Grafik 2.4. Inflasi Tahunan dan Andil Inflasi Tahun Berjalan Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan I-2009



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Keterangan: nama kelompok disingkat.

**Setelah peningkatan harga komoditas bahan makanan di pasar internasional pada tahun 2008, pada triwulan I-2009 pengaruh eksternal tersebut terhadap kelompok bahan makanan telah mereda.** Pelemahan tekanan inflasi terjadi akibat menurunnya permintaan dunia sehingga pengaruh *food inflation*<sup>1</sup> yang terjadi pada hampir semua negara berkembang telah mereda dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, kelompok sandang adalah satu-satunya kelompok yang mengalami peningkatan inflasi akibat kenaikan harga emas perhiasan. Kenaikan harga emas disebabkan oleh peningkatan permintaan investor luar negeri terhadap emas di pasar internasional. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan ekspektasi peningkatan harga emas perhiasan oleh pedagang di pasar domestik.

<sup>1</sup> James, W. Food Prices and Inflation in Developing Asia. 2008. Asian Development Bank

### Inflasi Triwulanan

Secara triwulanan, deflasi yang disumbangkan oleh kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mampu menahan inflasi Jawa Barat. Kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 5,95% (qtq) atau lebih tinggi dibandingkan deflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,17% (Tabel 2.2). Sebaliknya, tekanan inflasi triwulanan tertinggi berasal dari kelompok sandang yang tercatat meningkat dari 0,86% menjadi 4,44%. Sementara itu, inflasi kelompok bahan makanan mengalami peningkatan yang cukup besar dari 0,81% menjadi 2,06% sehingga mendorong inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau menjadi sebesar 2,01%.

**Tabel 2.2. Inflasi Triwulanan di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)**

No.	Kelompok	2008				2009	Andil
		Tw.I*	Tw.II*	Tw.III**	Tw.IV**	Tw.I**	Tw.I**
1	Bahan makanan	6,30	3,21	4,79	0,81	2,06	0,49
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	2,80	4,69	2,78	1,82	2,01	0,36
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	2,27	3,15	2,98	0,25	-0,10	-0,02
4	Sandang	3,35	0,22	0,91	0,86	4,44	0,19
5	Kesehatan	6,18	1,81	1,50	0,74	1,57	0,06
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0,82	0,89	4,38	1,54	0,14	0,01
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0,18	11,93	2,07	-3,17	-5,95	-1,08
<b>Umum</b>		<b>3,17</b>	<b>4,41</b>	<b>3,14</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

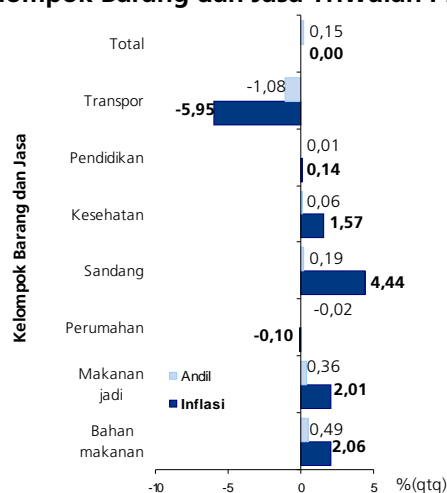
Keterangan:

\* Data inflasi Tahun Dasar 2002, gabungan tujuh kota (Bandung, Bekasi, Bogor, Sukabumi, Cirebon, Tasikmalaya, Banjar);

\*\* Data inflasi Tahun Dasar 2007, gabungan tujuh kota (Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Sukabumi, Cirebon, dan Tasikmalaya).

Pada triwulan I-2009, sumbangan inflasi kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; serta kelompok sandang yang cukup besar dapat diimbangi oleh deflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Kelompok bahan makanan menyumbangkan inflasi terbesar, yakni 0,49%, sedangkan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta kelompok sandang masing-masing menyumbangkan inflasi yang lebih rendah yang sebesar 0,36% dan 0,19% (Grafik 2.5). Adapun, andil deflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,08%.

**Grafik 2.5. Inflasi dan Andil Inflasi Jawa Barat Triwulanan Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan I-2009**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah.

Keterangan: nama kelompok disingkat.

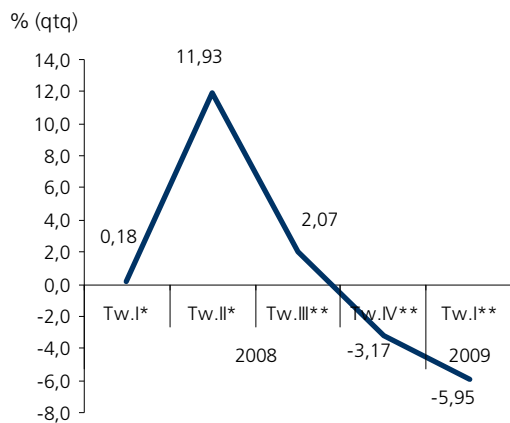
Berdasarkan komoditas, dampak langsung dan tidak langsung penurunan harga BBM mampu menstabilkan harga barang dan jasa secara umum di Jawa Barat. Beberapa komoditas

yang mengalami penurunan harga, antara lain bensin, angkutan dalam kota, dan cabe merah, sedangkan beberapa harga komoditas meningkat, antara lain emas perhiasan, bawang merah, ikan mas, telur ayam ras, daging ayam ras, dan gula pasir.

**a. Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan**

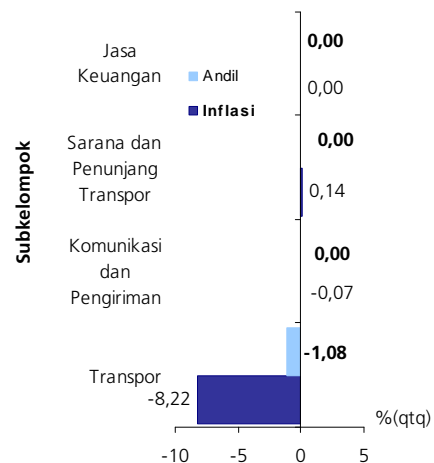
**Deflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan yang sebesar 5,95% pada triwulan I-2009 disebabkan oleh penurunan harga BBM yang direspon dengan penurunan tarif angkutan dalam dan luar kota (Grafik 2.6).** Kondisi tersebut tercermin dari deflasi subkelompok transpor yang cukup besar, yakni 8,22% dengan andil 1,08% (Grafik 2.7). Namun demikian, harga suku cadang mengalami kenaikan seperti yang tercermin pada inflasi subkelompok sarana dan penunjang transpor yang sebesar 0,14%. Sementara itu, subkelompok komunikasi dan jasa pengiriman mengalami deflasi sebesar 0,07% akibat perang tarif telepon seluler pada bulan Februari 2009.

**Grafik 2.6. Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Jawa Barat**



Keterangan: \*inflasi IHK Tahun Dasar 2002; \*\*inflasi IHK Tahun Dasar 2007  
 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

**Grafik 2.7. Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan I-2009**

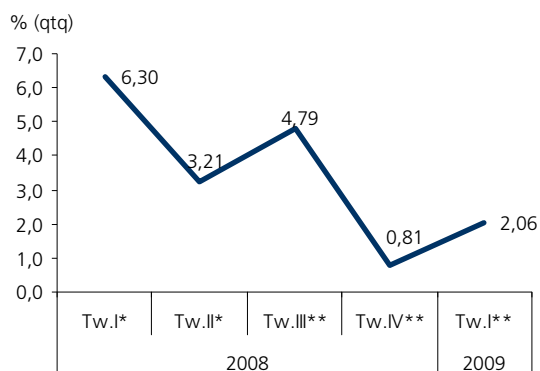


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

**b. Kelompok Bahan Makanan**

**Inflasi kelompok bahan makanan meningkat menjadi 2,06% pada triwulan I-2009, setelah melalui titik terendahnya pada triwulan IV-2008. (Grafik 2.8).** Dari sebelas subkelompok pada kelompok bahan makanan, inflasi subkelompok sayur-sayuran merupakan yang tertinggi yakni mencapai 7,98%, sekaligus menyumbang andil terbesar yaitu 0,16% (Grafik 2.9). Komoditas dalam subkelompok sayur-sayuran yang mengalami inflasi cukup tinggi antara lain bayam, kangkung, jagung muda, kacang panjang, daun bawang, dan buncis. Inflasi subkelompok ikan segar tertinggi kedua, yakni sebesar 7,58% dengan andil 0,14% karena pasokan ikan air tawar dan asin yang terganggu cuaca. Subkelompok padi-padian, umbi-umbian, dan hasil-hasilnya serta subkelompok bumbu-bumbuan sempat mengalami laju inflasi yang cukup tinggi pada bulan Februari 2009, namun pada bulan Maret 2009 menurun karena telah memasuki musim panen.

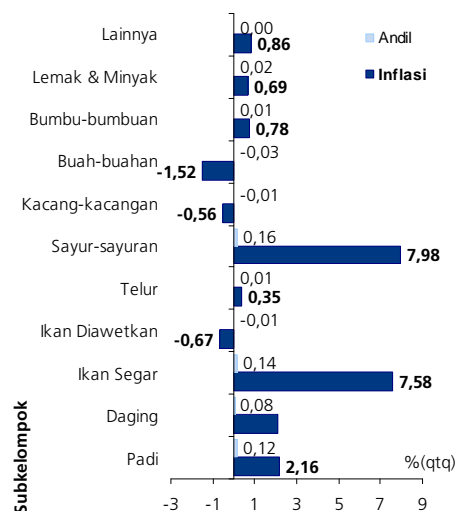
**Grafik 2.8. Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Jawa Barat**



Keterangan: \*inflasi IHK Tahun Dasar 2002; \*\*inflasi IHK Tahun Dasar 2007

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

**Grafik 2.9. Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan I-2009**

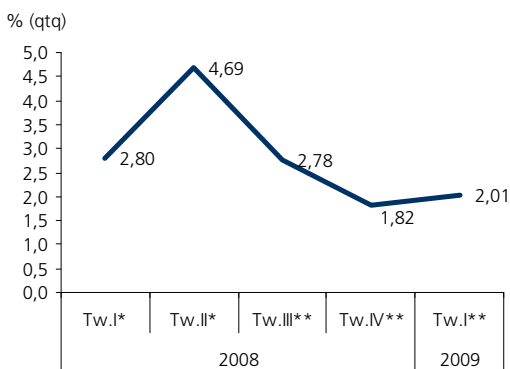


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

**c. Kelompok Makanan Jadi**

Laju inflasi triwulanan kelompok makanan jadi mengalami peningkatan tipis dari 1,82% pada triwulan sebelumnya menjadi 2,01% akibat peningkatan tekanan inflasi pada semua subkelompok (Grafik 2.10). Subkelompok minuman yang tidak beralkohol mengalami inflasi tertinggi, yakni sebesar 5,02% dengan andil 0,15% akibat kenaikan harga gula pasir yang sangat tinggi sejak awal tahun 2009 (Grafik 2.11) (lihat Boks 2. Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi: Tata Niaga Gula Kristal Putih). Sementara, subkelompok tembakau dan minuman beralkohol mengalami inflasi kedua terbesar, yakni sebesar 2,03% tetapi memberikan andil inflasi terkecil, sebesar 0,07%. Inflasi subkelompok tembakau & minuman beralkohol disebabkan oleh kenaikan cukai rokok yang ditetapkan pemerintah pada bulan Februari 2009. Subkelompok makanan jadi yang mengalami inflasi terendah menyumbang inflasi kedua terbesar, yakni sebesar 0,14%. Adapun, kenaikan harga produk makanan yang cukup tinggi seperti mie, nasi dengan lauk, serta ayam goreng disebabkan oleh kenaikan bahan makanannya.

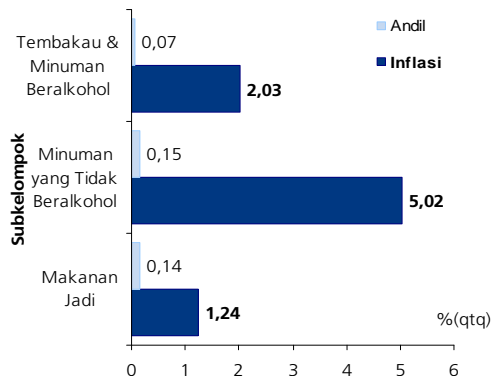
**Grafik 2.10. Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi di Jawa Barat**



Keterangan: \*inflasi IHK Tahun Dasar 2002; \*\* inflasi IHK Tahun Dasar 2007

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

**Grafik 2.11. Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan I-2009**

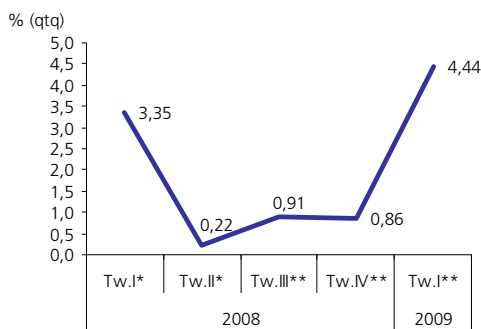


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

**d. Kelompok Sandang**

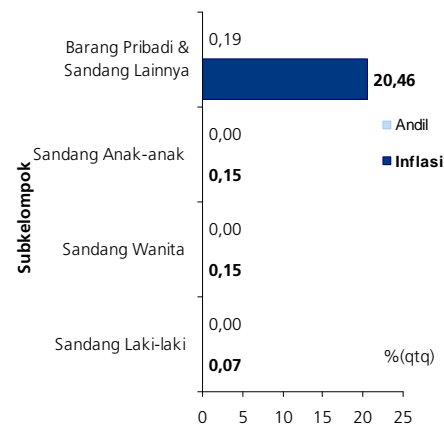
Kelompok sandang mengalami inflasi tertinggi, yakni sebesar 4,44% terutama disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan. Pada triwulan I-2009, inflasi kelompok sandang mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 0,86% menjadi 4,44% (Grafik 2.12). Peningkatan tekanan inflasi terutama disebabkan oleh subkelompok barang pribadi dan sandang lainnya yang mengalami inflasi sebesar 20,46% dengan andil 0,19% (Grafik 2.13). Tajamnya kenaikan inflasi tersebut akibat kenaikan harga emas perhiasan sepanjang triwulan I-2009 secara berturut-turut yang sebesar 0,02%, 0,10%, dan 0,07%.

**Grafik 2.12. Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Jawa Barat**



Keterangan: \*inflasi IHK Tahun Dasar 2002; \*\* inflasi IHK Tahun Dasar 2007  
 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

**Grafik 2.13. Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan I-2009**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

**1.2. INFLASI MENURUT KOTA**

**Inflasi Tahunan**

Berdasarkan kota, inflasi tahunan di tujuh kota di Jawa Barat mengalami penurunan. Namun demikian, inflasi di Kota Cirebon, Sukabumi, dan Tasikmalaya lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Jawa Barat. Kota Tasikmalaya sendiri mengalami inflasi tertinggi, yakni sebesar 9,18% (yoy), sedangkan inflasi Kota Bogor terendah sebesar 6,17% (Tabel 2.3). Kota Bogor mengalami penurunan laju inflasi yang sangat cepat dari 14,20% pada triwulan IV-2008 menjadi 6,17% pada triwulan I-2009.

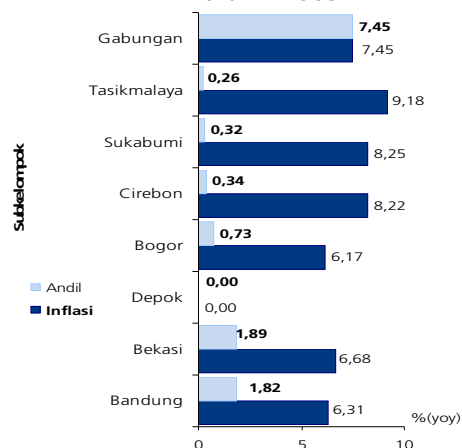
**Tabel 2.3. Inflasi Tahunan di Jawa Barat Menurut Kota (%)**

No.	Kota	2008				2009	Andil
		Tw.I*	Tw.II*	Tw.III**	Tw.IV**	Tw.I**	Tw.I**
1	Bandung	7,00	11,47	10,84	10,23	6,31	1,82
2	Bekasi	6,62	9,31	11,74	10,10	6,68	1,89
3	Depok	N/A	10,71	N/A	11,70	N/A	N/A
4	Bogor	6,58	13,19	9,62	14,20	6,17	0,73
5	Cirebon	8,17	13,34	13,41	14,14	8,22	0,34
6	Sukabumi	6,52	10,28	9,15	11,39	8,25	0,32
7	Tasikmalaya	9,77	10,47	12,17	12,07	9,18	0,26
<b>Gabungan</b>		<b>NA</b>	<b>10,83</b>	<b>12,30</b>	<b>11,11</b>	<b>7,45</b>	<b>7,45</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.  
 Keterangan: \*inflasi IHK Tahun Dasar 2002; \*\*inflasi IHK Tahun Dasar 2007

Berdasarkan sumbangannya terhadap inflasi Jawa Barat, Kota Bekasi dan Bandung menyumbangkan inflasi yang cukup tinggi yakni masing-masing sebesar 1,89% dan 1,82%, meskipun laju inflasi kedua kota tersebut lebih rendah dibandingkan dengan lima kota lainnya (Grafik 2.14). Hal ini disebabkan oleh bobot IHK kedua kota tersebut yang lebih dari 50% dalam perhitungan inflasi gabungan tujuh kota. Adapun, sumbangan inflasi kota selain Bekasi dan Bandung masing-masing masih dibawah 1%.

Grafik 2.14. Inflasi dan Andil Inflasi Tahunan di Jawa Barat Menurut Kota Triwulan I-2009



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

### Inflasi Triwulanan

Sementara itu, secara triwulanan, enam dari tujuh kota mengalami inflasi. Satu-satunya kota yang mengalami deflasi adalah Kota Depok, yakni sebesar 0,87% (qtq) (Tabel 2.4). Inflasi tertinggi dialami oleh Kota Sukabumi dengan inflasi triwulanan sebesar 1,67%, sedangkan inflasi triwulanan 5 kota lainnya berada dibawah 1%.

Tabel 2.4. Inflasi Triwulanan di Jawa Barat Menurut Kota (%)

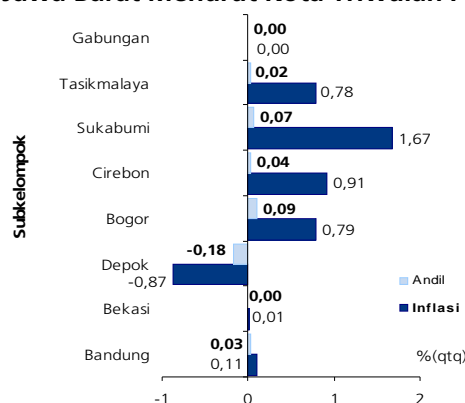
No.	Kota	2008				2009	Andil
		Tw.I*	Tw.II*	Tw.III**	Tw.IV**	Tw.I**	Tw.I**
1	Bandung	2,81	5,81	2,28	-0,07	0,11	0,03
2	Bekasi	3,31	3,98	3,82	0,03	0,01	0,00
3	Depok	NA	NA	3,49	0,18	-0,87	-0,18
4	Bogor	3,89	2,87	2,38	0,46	0,79	0,09
5	Cirebon	3,52	4,80	4,04	0,19	0,91	0,04
6	Sukabumi	2,75	3,69	3,42	1,32	1,67	0,07
7	Tasikmalaya	2,57	4,67	3,64	1,22	0,78	0,02
		NA	NA	3,14	0,15	0,00	0,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Keterangan: \*inflasi IHK Tahun Dasar 2002; \*\*inflasi IHK Tahun Dasar 2007

Andil deflasi Kota Depok yang sebesar 0,18% mampu menahan tekanan inflasi di Jawa Barat yang berasal dari enam kota lainnya sehingga secara keseluruhan inflasi Jawa Barat sebesar 0%. Sumbangan inflasi terbesar berasal dari Kota Bogor, yakni 0,09%, diikuti oleh Kota Sukabumi sebesar 0,07%. Pada triwulan I-2009, beberapa kota lainnya mengalami inflasi, sementara harga barang dan jasa di Kota Bekasi tetap stabil.

Grafik 2.15. Inflasi dan Andil Inflasi Triwulanan di Jawa Barat Menurut Kota Triwulan I-2009



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.



**Deflasi pada kota Depok terutama disebabkan oleh deflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan tembakau, yakni sebesar 1,53% (qtq) (Tabel 2.5).** Deflasi pada subkelompok bahan bakar rumah tangga telah terjadi sepanjang triwulan I-2009 terutama karena penurunan harga gas elpiji. Penyebab penurunan harga gas elpiji adalah telah normalnya pasokan gas elpiji di beberapa kota di Jawa Barat bagian utara. Selain itu, deflasi juga terjadi pada subkelompok biaya tempat tinggal sejak bulan Februari 2009 akibat rendahnya permintaan atas bahan bangunan seperti besi beton, asbes, batu bata, seng, kaca, dan daun pintu.

**Tabel 2.5. Inflasi Triwulanan di Jawa Barat Menurut Kota & Kelompok Barang dan Jasa Triwulan I-2009 (qtq, %)**

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Tsm	
1	Bahan makanan	2,15	1,24	1,53	5,48	1,06	2,51	0,52	2,06
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	1,40	1,67	3,68	2,90	1,92	3,35	6,20	2,01
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0,05	-0,29	-1,53	0,80	1,74	4,65	2,02	-0,10
4	Sandang	6,98	2,58	4,14	-0,20	6,90	5,06	4,65	4,44
5	Kesehatan	3,46	0,36	0,42	1,76	3,13	2,30	-0,82	1,57
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	-0,27	0,05	0,37	0,73	1,08	0,16	1,27	0,14
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	-6,36	-3,49	-6,93	-10,13	-5,03	-7,34	-4,16	-5,95
<b>Umum</b>		<b>0,11</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,87</b>	<b>0,79</b>	<b>0,91</b>	<b>1,67</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

**Inflasi Kota Bogor yang memiliki sumbangan inflasi terbesar didorong oleh kenaikan harga bahan makanan.** Besarnya sumbangan inflasi kelompok bahan makanan pada Kota Bogor sesuai dengan hasil penelitian KBI Bandung berjudul *Distribusi Volatile Foods di Jawa Barat* pada tahun 2008 bahwa sentra produksi pertanian cenderung memiliki fluktuasi harga yang tinggi. Inflasi kelompok bahan makanan tidak mampu ditahan oleh deflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan di Kota Bogor yang tertinggi dibandingkan 6 kota lainnya.

**Sama dengan Kota Bogor, Kota Sukabumi yang merupakan kota dengan inflasi tertinggi di Jawa Barat juga didorong oleh inflasi kelompok bahan makanan.** Kota Sukabumi juga merupakan sentra produksi beberapa komoditas bahan makanan, seperti beras, kol, kacang panjang, dan jagung. Sementara itu, jika dibandingkan dengan enam kota lainnya, inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan air bersih di Kota Sukabumi adalah yang tertinggi, yakni sebesar 4,65%.

## 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

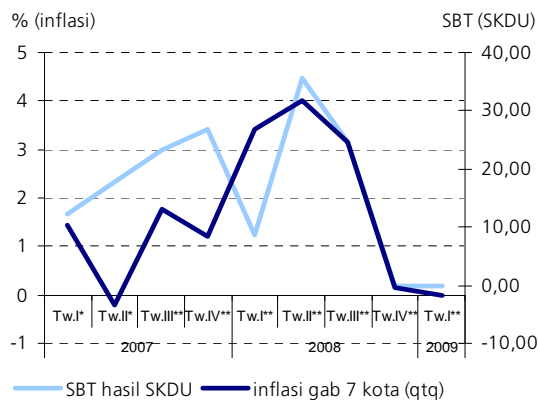
Pada triwulan I-2009, Jawa Barat tidak mengalami inflasi secara triwulanan sehingga menurunkan laju inflasi tahunan. Stabilitasnya harga di Jawa Barat secara triwulanan disebabkan oleh dampak penurunan harga barang dan jasa yang diatur oleh pemerintah, ekspektasi inflasi yang menurun, inflasi negara mitra dagang yang menurun, serta tekanan permintaan yang cenderung melemah, sedangkan inflasi didorong oleh peningkatan harga komoditas-komoditas di pasar internasional.

## 2.1. FUNDAMENTAL

### a. Ekspektasi Inflasi

Para pelaku ekonomi (khususnya pengusaha, pedagang eceran, dan konsumen) di Jawa Barat memiliki ekspektasi inflasi yang sejalan dengan perkembangan inflasi yang cenderung menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Perkembangan ekspektasi tersebut diindikasikan oleh hasil beberapa survei yang dilakukan oleh KBI Bandung, yaitu Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Penjualan Eceran (SPE), dan Survei Konsumen (SK).

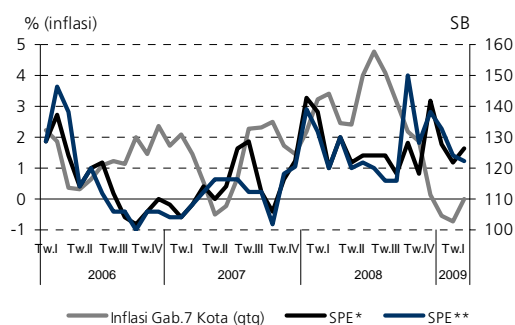
**Grafik 2.16. Perkembangan Harga Barang dan Jasa Menurut Pengusaha di Jawa Barat**



Sumber: Bank Indonesia.

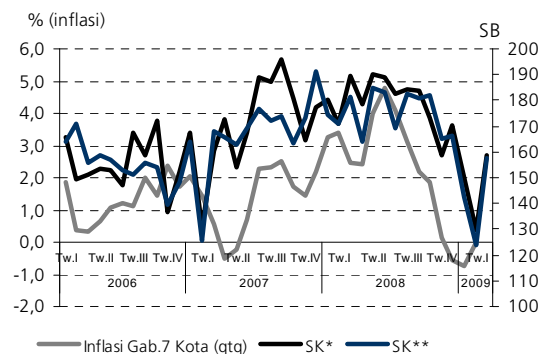
Kalangan pengusaha (responden SKDU) memprediksi bahwa masih terjadi penurunan harga jual/tarif barang/jasa pada triwulan I-2009 meskipun laju penurunan tidak sebesar pada triwulan IV-2008, seperti yang diindikasikan oleh penurunan angka SB (saldo bersih<sup>2</sup>) hasil survei dari 17,46 menjadi 10,03 (Grafik 2.16). Penurunan ekspektasi harga jual/tarif barang/jasa terjadi pada subsektor ekonomi tanaman pangan, angkutan jalan raya, serta makanan, minuman, dan tembakau. Penurunan tersebut disebabkan oleh dimulainya musim panen raya padi serta penurunan harga BBM.

**Grafik 2.17. Ekspektasi Pedagang Eceran Terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Bandung**



Sumber: SPE-KBI Bandung; BPS Provinsi Jawa Barat.  
Keterangan: SPE\*=Ekspektasi pedagang terhadap harga pada bulan tsb. menurut SPE pada 3 bulan sebelumnya; SPE\*\*= Ekspektasi pedagang terhadap harga pada bulan tsb. menurut SPE 6 bulan sebelumnya; SPE\*\*\*= Ekspektasi pedagang terhadap harga selama tahun berjalan menurut SPE bulan ybs.

**Grafik 2.18. Ekspektasi Konsumen Terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Bandung**



Sumber: SK-KBI Bandung, BPS Provinsi Jawa Barat  
Keterangan: SK\*= Ekspektasi konsumen terhadap harga pada bulan tsb. menurut SK 3 bulan sebelumnya; SK\*\*= Ekspektasi konsumen terhadap harga pada bulan tsb. menurut SK 6 bulan sebelumnya.

<sup>2</sup> Saldo bersih (SB) adalah (*net balance*) adalah selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama". SB positif menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang menyatakan bahwa harga jual meningkat dibandingkan yang menyatakan turun.

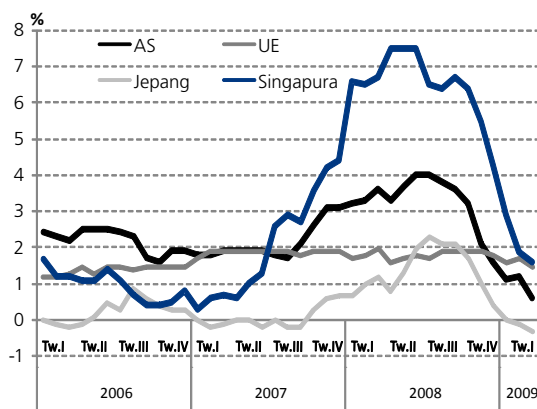
Ekspektasi inflasi menurut hasil SPE dan SK menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan IV-2008 (Grafik 2.17 dan 2.18). Hasil ini sejalan dengan inflasi triwulan I-2009 yang lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya. Angka SB harga 3 bulan yang akan datang menurut Survei Penjualan Eceran pada akhir triwulan menurun cukup besar dari 142 menjadi 126,5, sedangkan SB Survei Konsumen menurun dari 170,33 menjadi 158,67. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi konsumen lebih bersifat adaptif, sedangkan pedagang eceran dan pengusaha telah bersifat rasional.

## b. Eksternal

Tekanan inflasi eksternal relatif berkurang akibat penurunan laju inflasi negara-negara mitra dagang meskipun terdapat tekanan kenaikan harga beberapa komoditas strategis di pasar internasional. Penurunan *imported inflation* Jawa Barat terutama disebabkan oleh penurunan laju inflasi negara mitra dagang akibat dampak krisis keuangan global.

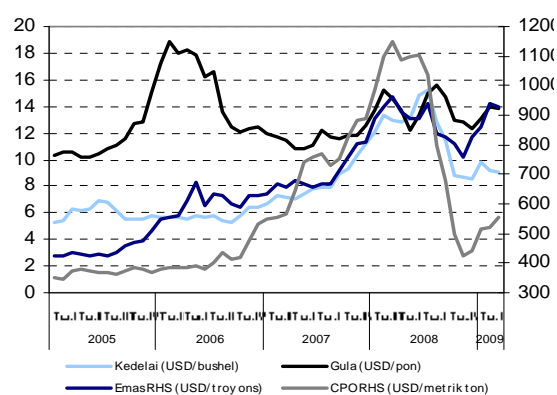
Inflasi negara mitra dagang menunjukkan tren penurunan terutama sejak triwulan III-2008 (Grafik 2.19). Beberapa negara mitra dagang Jawa Barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Singapura telah menunjukkan pelemahan tekanan inflasi yang terutama didorong oleh pelemahan tekanan inflasi. Sementara itu, negara-negara di Uni Eropa masih memiliki angka inflasi yang stabil pada kisaran 1 hingga 2%.

**Grafik 2.19. Laju Inflasi di Negara Mitra Dagang**



Sumber: Bloomberg

**Grafik 2.20. Perkembangan Harga Komoditas Strategis di Pasar Internasional**



Sumber: Bloomberg

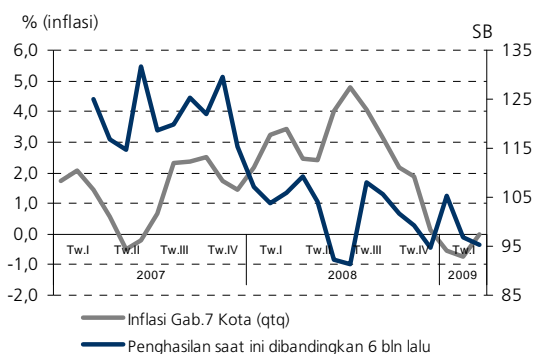
Namun demikian, beberapa komoditas strategis seperti gula pasir, emas, CPO, dan kedelai mulai menunjukkan peningkatan setelah mencapai titik terendah pada triwulan sebelumnya (Grafik 2.20). Pengaruh kenaikan harga komoditas di pasar internasional terutama dirasakan pengaruhnya pada Jawa Barat untuk komoditas emas dan gula. Pedagang emas perhiasan di Jawa Barat menaikkan harga sejalan dengan kenaikan harga emas yang cukup tinggi. Kenaikan harga emas di pasar internasional dari USD797,17/troy ons menjadi USD910,45/troy ons disebabkan oleh meningkatnya preferensi spekulan terhadap emas sebagai *safe heaven*. Sementara itu, kenaikan harga gula di pasar internasional dari USD12,72/pon menjadi USD13,61/pon serta belum tibanya musim panen tebu dimanfaatkan oleh pedagang besar untuk berspekulasi.

### c. Interaksi Permintaan dan Penawaran

Permintaan yang cenderung tumbuh melambat dan penawaran yang relatif stabil menyebabkan kesenjangan output menurun sehingga melonggarkan tekanan inflasi Jawa Barat. Penurunan permintaan diindikasikan dari pelemahan daya beli, penurunan kapasitas terpasang, penurunan volume impor, serta penurunan realisasi kredit konsumsi. Sementara itu, dari sisi penawaran, kapasitas produksi industri Jawa Barat masih mencukupi untuk mengatasi lonjakan permintaan.

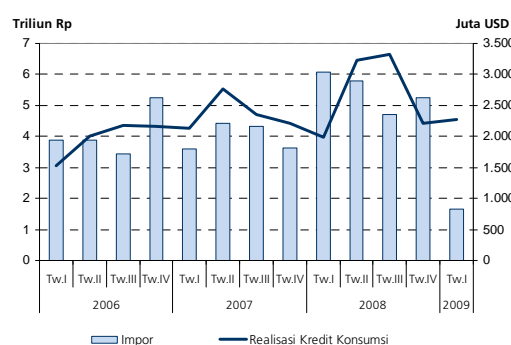
Daya beli masyarakat Jawa Barat mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sepanjang triwulan I-2009 indikator penghasilan konsumen di Kota Bandung menurun dari SB sebesar 105,33, 96,67, dan 95,33 (Grafik 2.21). Peningkatan penghasilan pada bulan Januari 2009 disebabkan oleh kenaikan upah di awal tahun, meskipun tidak setinggi pada awal tahun 2008.

**Grafik 2.21. Penghasilan Konsumen di Kota Bandung**



Sumber: SK-KBI Bandung; BPS Provinsi Jawa Barat.

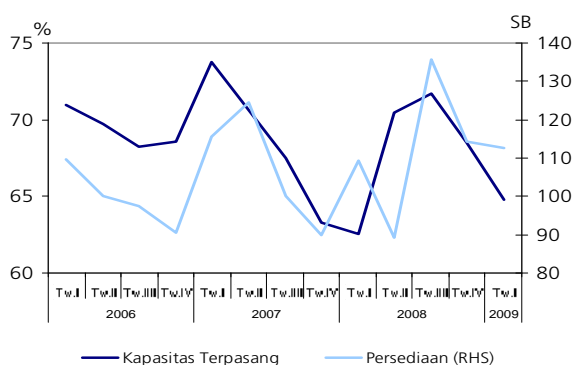
**Grafik 2.22. Nilai Impor dan Realisasi Kredit Konsumsi di Jawa Barat**



Sumber: Statistik Ekonomi & Keuangan Daerah (SEKDA) Jabar, KBI Bandung.

Melemahnya tekanan atas permintaan tercermin dari turunnya impor industri di Jawa Barat dari USD2,627 juta menjadi USD826 juta serta realisasi kredit konsumsi yang relatif rendah (Grafik 2.22). Namun demikian, penurunan impor yang relatif tajam diduga disebabkan pula oleh pembatasan impor beberapa produk oleh Departemen Perdagangan. Sementara itu, realisasi kredit konsumsi relatif stagnan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni dari Rp4,42 triliun menjadi Rp4,54 triliun.

**Grafik 2.23. Kapasitas Terpakai dan Persediaan Industri di Jawa Barat**



Sumber: SKDU-KBI Bandung

Dari sisi penawaran, industri di Jawa Barat masih memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksinya. Hal ini diindikasikan oleh hasil SKDU yang menunjukkan tingkat kapasitas terpakai industri di Jawa Barat baru sebesar 64,79% (Grafik 2.23). Kapasitas industri di Jawa Barat masih memiliki ruang sehingga penawaran dapat ditingkatkan jika terjadi lonjakan

permintaan. Namun demikian, kapasitas terpasang industri di Jawa Barat mengalami penurunan dari 68,50% menjadi 64,79% yang terutama terjadi pada industri tanaman pangan dari 73,97% menjadi 55,33%. Mayoritas pengusaha responden SKDU menyatakan bahwa penurunan kapasitas terpakai terutama disebabkan oleh penurunan permintaan domestik.

**Penawaran khususnya dari sektor pertanian mengalami peningkatan seperti diindikasikan oleh peningkatan volume persediaan responden SKDU di sektor tersebut (Grafik 2.23).**

Persediaan komoditas pertanian masih mengalami peningkatan meskipun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh belum tibanya puncak panen raya di Jawa Barat.

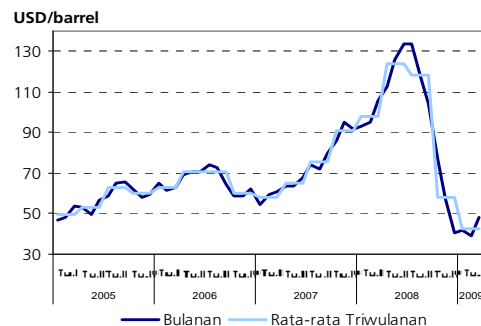
## 2.2. NON FUNDAMENTAL

### a. Administered Price

**Faktor utama pendorong deflasi pada bulan Januari dan Februari 2009 adalah penurunan harga BBM dan tarif angkutan dalam kota dan luar kota.** Dampak langsung dan tidak langsung penurunan harga BBM menyebabkan deflasi yang cukup besar pada triwulan I-2009. Namun demikian, tekanan inflasi *administered price* yang relatif kecil masih ada yang berasal dari kenaikan cukai rokok pada bulan Februari 2009.

**Penurunan harga BBM terutama disebabkan oleh melemahnya tekanan harga minyak bumi (*West Texas Intermediate*) di pasar internasional (Grafik 2.24).** Tren penurunan harga minyak bumi dari USD58,14/barrel menjadi USD42,89/barrel yang dimulai sejak triwulan IV-2008 mendorong pemerintah untuk menurunkan harga BBM di dalam negeri. Pada tanggal 15 Januari 2009 pemerintah kembali menurunkan

**Grafik 2.24. Pergerakan Harga Minyak WTI (West Texas Intermediate)**



Sumber: Bloomberg (diolah)

harga premium sebesar Rp500 menjadi Rp4.500/liter dan solar sebesar Rp300 menjadi Rp4.500/liter kembali sama dengan harga BBM sebelum terjadi kenaikan pada bulan Mei 2008.

**Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespon penurunan harga BBM dengan memperbarui tarif angkutan dalam kota sehingga rata-rata turun sebesar 8,93%.** Sejak tanggal 26 Januari 2009, tarif bus angkutan kota dalam provinsi (AKDP) diturunkan sebesar 8,36%. Dengan ketetapan tersebut, maka tarif dasar baru bus AKDP berubah dari Rp118/km/penumpang menjadi Rp108,1/km/penumpang, dengan tarif batas atas dari Rp154/km/orang menjadi Rp141,13/km/orang dan tarif batas bawah dari Rp94/km/orang menjadi Rp86,85/km/orang. Selain itu, tarif bus kecil AKDP juga mengalami perubahan dari Rp214/km/orang menjadi Rp191,88/km/orang dan tarif bus kota berubah dari Rp2.000/penumpang menjadi Rp1.800/penumpang.

**Di tengah penurunan harga BBM dan tarif angkutan, pemerintah menetapkan kenaikan cukai rokok yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2009.** Berdasarkan Peraturan Menteri

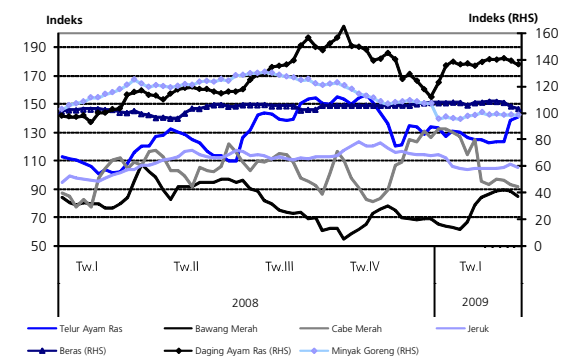
Keuangan No.203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau tanggal 9 Desember 2008, pemerintah menaikkan tarif dasar cukai rokok sehingga rata-rata beban cukai rokok meningkat rata-rata sebesar 7%. Namun demikian, peningkatan cukai rokok tersebut berdampak minimal terhadap inflasi Jawa Barat dan hanya dirasakan pada bulan Maret 2009 terhadap andil inflasi rokok kretek filter yang sebesar 0,02% (mtm).

### b. Volatile Foods

Hasil Survei Pemantauan Harga Mingguan (SPHM) oleh KBI Bandung di Kota Bandung menunjukkan bahwa harga sebagian besar komoditas yang bergejolak masih tinggi, meskipun harga beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, jeruk, dan cabe merah menunjukkan tren penurunan pada akhir triwulan I-2009 (Grafik 2.25). Penurunan disebabkan masa panen beberapa komoditas dan kembali normalnya distribusi barang setelah berlalunya musim hujan. Namun demikian, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah menunjukkan tren peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

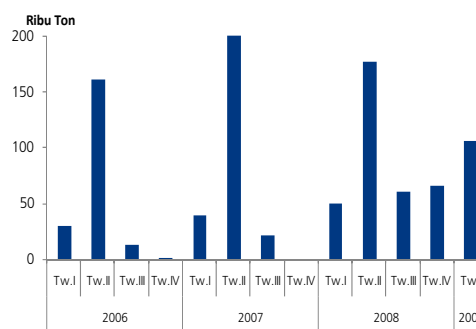
Penyerapan beras BULOG Divre III Jawa Barat menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi akibat beberapa daerah telah memasuki masa panen (Grafik 2.26). Petani di Jawa Barat melakukan panen lebih awal sehingga penyerapan raskin meningkat dari 65,32 ribu ton menjadi 106,39 ribu ton. Panen tersebut menyebabkan harga beras telah menurun sejak bulan Februari 2009. Namun demikian, penurunan harga beras masih akan berlanjut karena puncak panen raya padi yang diperkirakan terjadi pada pertengahan triwulan II-2009.

**Grafik 2.25. Perkembangan Harga Komoditas-komoditas Strategis**



Sumber: SPHM KBI Bandung

**Grafik 2.26. Penyerapan Beras Miskin oleh BULOG Jawa Barat**



Sumber: BULOG Divre Jawa Barat

Sementara itu, peningkatan harga komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah masih terjadi karena gangguan cuaca. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat menginformasikan bahwa musim hujan menyebabkan produksi *Day Old Chicks* (DOC) berkurang sehingga menghambat pasokan daging ayam ras. Sementara itu, pasokan telur ayam ras ke Jawa Barat yang berasal dari Blitar, Jawa Timur menurun karena peternak di Blitar mengirimkan telur ke luar Pulau Jawa dalam jumlah relatif besar, setelah sebelumnya sempat terhambat karena tingginya gelombang laut. Adapun, kenaikan harga bawang merah disebabkan oleh hasil panen bawang merah yang kurang baik karena banyak yang busuk akibat tingginya curah hujan di Brebes.

**BOKS 6**

**FORUM KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI: TATA NIAGA GULA KRISTAL PUTIH**

Gula Kristal Putih (GKP) adalah komoditas strategis karena merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, dari sisi inflasi, GKP memiliki bobot Indeks Harga Konsumen (IHK) yang cukup besar, yakni sebesar 0,52% dari total IHK Jawa Barat (IHK Tahun Dasar 2002 meliputi 408 komoditas) dan menyumbang rata-rata sebesar 0,83% per tahun (tahun 2003-2008) terhadap inflasi Jawa Barat. Konsumsi masyarakat Jawa Barat atas GKP cukup besar, diperkirakan mencapai 359,4 ribu ton/tahun. Namun demikian, produksi GKP Jawa Barat yang rata-rata sebesar 120,99 ribu ton/tahun belum dapat memenuhi kebutuhan regional Jawa Barat.

**Grafik 1. Perkembangan IHK GKP (Tahun Dasar 02) dan Harga Gula di Pasar Internasional**



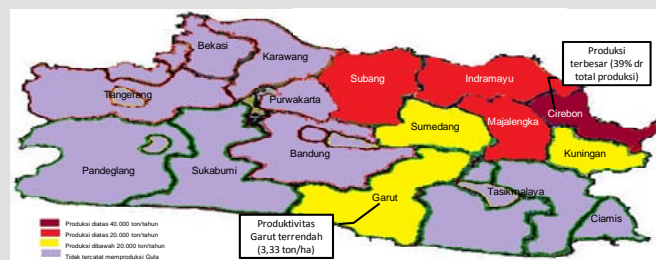
Dilihat dari perkembangan harga, sejak awal tahun 2009 harga GKP meningkat secara eksponensial, yakni dari Rp6.700/kg pada awal Januari 2009 menjadi Rp7.781/kg pada akhir bulan Maret 2009. Kenaikan harga tersebut terjadi karena beberapa hal, antara lain (i) peningkatan ekspektasi harga GKP yang sejalan dengan kenaikan harga gula pasir di pasar internasional (Grafik 1); (ii) penguasaan stok GKP oleh beberapa pedagang besar; (iii) keterbatasan produksi GKP di Jawa Barat ataupun nasional, serta (iv) rendahnya minat petani untuk menanam tebu.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 23-26 Februari 2009, tim kecil Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (FKPID) Jawa Barat yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Biro Bina Produksi, Biro Administrasi dan Perekonomian, Direktorat Intelkam Polda Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Bulog Divre III Provinsi Jawa Barat, dan Bank Indonesia Bandung bersama dengan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pertemuan guna membahas permasalahan dalam tataniaga gula di Jawa Barat. Pada pertemuan tersebut dilakukan identifikasi permasalahan terkait produksi dan tata niaga GKP dari hulu ke hilir (perkebunan tebu - pabrik gula - distribusi/tata niaga gula) beserta upaya-upaya yang telah dilakukan instansi terkait. Hasil identifikasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

**A. Perkebunan Tebu**

Wilayah perkebunan tebu di Jawa Barat tersebar di tujuh Kabupaten yaitu Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, Sumedang, serta Garut. Pada tahun 2008, areal perkebunan tebu di Jawa Barat seluas 23.051 Ha (6,4% dari areal nasional). Perkebunan tebu di Jawa Barat terbagi menjadi lahan tebu milik rakyat seluas 11.063 hektar dan tebu milik PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) seluas 11.694 Ha (Grafik 2).

**Grafik 2. Peta Produksi Tebu Jawa Barat Tahun 2008**



Sumber: Jawa Barat dalam Angka, 2008.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas tebu, Dinas Perkebunan telah melaksanakan beberapa



program, antara lain:

- a) Intensifikasi, melalui Program Akselerasi Peningkatan Gula Nasional. Program ini terdiri dari perbaikan sistem budidaya tebu rakyat (melalui perbaikan mutu bibit serta bongkar ratoon dan rawat ratoon melalui dana guliran Penguatan Modal Usaha Kelompok), revitalisasi pabrik gula, peningkatan SDM, serta pemberdayaan petani dan kelembagaan perkumpulan petani tebu rakyat.
- b) Ekstensifikasi, melalui perluasan areal pada lahan potensial pengembangan tebu, yaitu pada lahan baru dan lahan historis tebu rakyat (eks TRI), serta didukung dengan pembangunan sentra industri gula baru, khususnya di Kabupaten Garut yang telah mencapai pengembangan areal tebu seluas 150 hektar.

Namun demikian, beberapa permasalahan yang terjadi dalam budidaya tebu, antara lain:

- a) Rendahnya pendapatan petani tebu sehingga petani kurang terdorong menanam tebu (harga gula di tingkat petani yang relatif rendah dan fluktuatif).
- b) Persaingan yang tinggi antara tebu dengan komoditas lain, terutama padi.
- c) Kelangkaan dan tingginya harga sarana produksi pertanian (pupuk dan obat-obatan) .
- d) Adanya, alih fungsi lahan untuk pembangunan jalan tol sehingga semakin mempersempit lahan tebu.

### **B. Pabrik Gula (PG)**

Terdapat 5 Pabrik Gula (PG) di Jawa Barat yang kesemuanya adalah milik PT. RNI, yaitu PG Karang Suwung, PG Sindang Laut, PG Tersana Baru, PG. Subang, dan PG. Jatitujuh. Namun demikian, PT RNI hanya memproduksi 25% dari total kebutuhan gula di Jawa Barat. Kondisi ini semakin diperparah dengan penurunan kinerja pabrik gula yang tercermin dari rendemen (kadar gula) yang relatif kecil, yakni sebesar 7,5% dan masih besarnya *idle capacity*. Faktor penyebab penurunan efektivitas pabrik gula, antara lain pemeliharaan pabrik dan infrastruktur yang kurang, serta kesulitan untuk mendatangkan investor untuk pembangunan/revitalisasi pabrik gula.

### **C. Distribusi/Tataniaga GKP**

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap industri gula. Berdasarkan Kepmenperindag No.25/MPP/Kep/1/1998 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya, impor gula pasir tidak dilaksanakan oleh Bulog, serta penyediaan dan penyaluran gula pasir sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Namun demikian, kebijakan tersebut memicu banjirnya gula impor dan rafinasi (sebagai bahan baku industri makanan dan minuman serta obat-obatan dan tidak untuk dikonsumsi masyarakat) sehingga mendorong penurunan permintaan gula lokal.

Berdasarkan hasil diskusi FKPI Jawa Barat, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam budidaya tebu, pabrik gula, serta tata niaga GKP adalah, sebagai berikut:

- a) Melakukan Operasi Pasar (OP) untuk menurunkan harga gula kristal putih hingga mencapai harga yang wajar.
- b) Untuk mengendalikan harga GKP dalam jangka panjang, membentuk badan penyangga dengan memperluas peran Bulog atau jika memungkinkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- c) Menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dengan memperhitungkan biaya operasional petani serta daya beli konsumen.
- d) Memperluas lahan perkebunan tebu dan merestrukturisasi mesin pabrik yang sudah tua untuk meningkatkan produktivitas dan rendemen GKP.
- e) Menyediakan dana talangan melalui skema kredit dengan suku bunga yang tidak memberatkan untuk membantu modal kerja petani.
- f) Menyempurnakan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur OPD dan Lembaga/Asosiasi terkait.



## BAB 3

# PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH

**Perkembangan berbagai indikator perbankan di Jawa Barat pada triwulan I-2009 masih tumbuh cukup baik di tengah tekanan dampak krisis keuangan global.** Secara tahunan, beberapa indikator utama perbankan seperti total aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, sedangkan *outstanding* kredit mengalami perlambatan. Secara triwulanan (qtq), aset, DPK maupun *outstanding* kredit tumbuh melambat. Dengan kondisi tersebut, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan di Jawa Barat sedikit mengalami penurunan. Di sisi lain, seiring dengan semakin melambatnya pertumbuhan ekonomi, risiko kredit bermasalah (NPL) perbankan di Jawa Barat semakin meningkat. Sementara itu, eksekusi likuiditas berupa penempatan bank pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus menunjukkan peningkatan seiring dengan melambatnya penyaluran kredit.

**Penurunan suku bunga acuan (BI rate) direspon secara terbatas oleh perbankan di Jawa Barat.** Hal ini terlihat dari perkembangan suku bunga simpanan maupun suku bunga kredit yang relatif tidak banyak berubah. Tingginya biaya penghimpunan dana serta masih melemahnya permintaan kredit diperkirakan merupakan penyebab lambatnya penurunan suku bunga kredit maupun suku bunga simpanan perbankan.

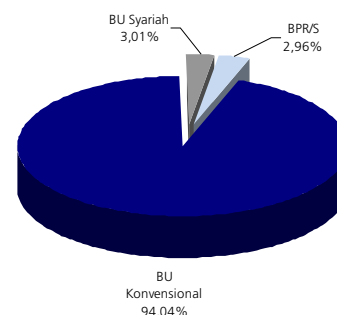
## 1. STRUKTUR PERBANKAN DI JAWA BARAT

Struktur perbankan di Jawa Barat pada triwulan I-2009 tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Bank Umum Konvensional masih mendominasi struktur perbankan dengan pangsa sebesar 94,04%, sementara bank umum syariah dan BPR/S memiliki pangsa masing-masing 3,01% dan 2,96% (grafik 3.1.).

**Sepuluh bank menguasai hampir sebagian besar (80%) total aset industri perbankan.** Pada

triwulan I-2009, aset perbankan di Jawa Barat tumbuh 5,02% (qtq) atau 22,06% (yoy) menjadi Rp173,12 triliun. Jika dibandingkan dengan perbankan nasional, pangsa perbankan di Jawa Barat hanya sebesar 7,5%.

**Grafik 3.1. Komposisi Aset Perbankan di Jawa Barat Triwulan I-2009**



Sumber: LBU, LBUS, LBPR KBI Bandung

## 2. BANK UMUM KONVENSIONAL

### 2.1 Pendanaan dan Risiko Likuiditas

#### Perkembangan Dana Pihak Ketiga

**Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan di Jawa Barat pada triwulan I-2009 mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.**

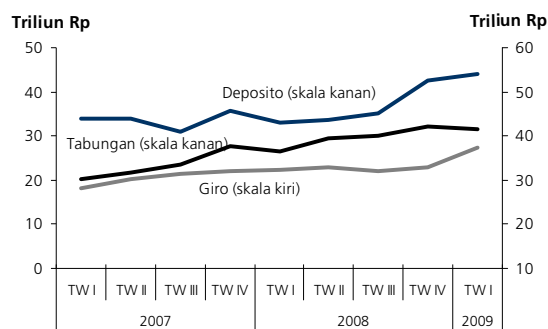
Secara tahunan, DPK tumbuh 20,90% menjadi Rp123,03 triliun atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 11,54%. Sementara itu, secara triwulanan, DPK tumbuh 4,48% atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (10,02%). Tingginya pertumbuhan DPK pada triwulan laporan diperkirakan sebagai akibat dari masih tingginya suku bunga simpanan terutama deposito terkait masih tertekannya likuiditas perbankan. Selain itu, peningkatan besarnya cakupan penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dari Rp100 juta menjadi Rp2 miliar per nasabah per bank cukup efektif untuk mendorong masyarakat meningkatkan simpanannya di bank.

**Berdasarkan jenis simpanannya, DPK bank umum konvensional di Jawa Barat masih didominasi oleh jenis simpanan deposito dengan pangsa sebesar 43,82%, disusul tabungan dengan pangsa 33,84% dan giro sebesar 22,34%.** Masih tingginya suku bunga yang ditawarkan perbankan pada triwulan I-2009 mengakibatkan pertumbuhan jenis simpanan deposito tumbuh 25,59% (yoy) menjadi Rp53,91 triliun, jenis simpanan tabungan tumbuh 13,81% (yoy) menjadi Rp41,63 triliun, sedangkan giro tumbuh

23,52% menjadi Rp27,48 triliun. Sementara itu, secara triwulanan, simpanan giro mengalami pertumbuhan tertinggi yakni 19,56% (qtq), disusul deposito yang tumbuh 2,23%. Kondisi berbeda terjadi pada jenis simpanan tabungan yang mengalami penurunan sebesar 1,09% (qtq).

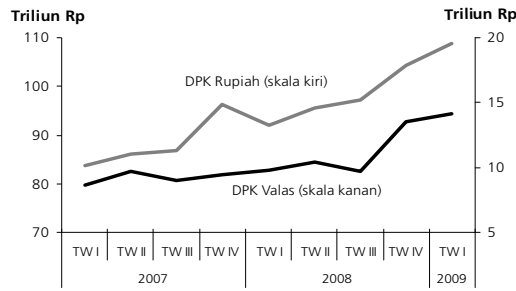
**Berdasarkan jenis valuta, pada triwulan I-2009, DPK dalam valuta asing tumbuh 4,65% (qtq) atau 44,44% (yoy) menjadi Rp14,16 triliun.** Hal ini diakibatkan faktor depresiasi nilai tukar rupiah terhadap USD selama triwulan I-2009. Rata-rata kurs tengah rupiah terhadap USD pada triwulan I-2009 terdepresiasi 5,51% (qtq) atau 25,63% (yoy) menjadi sebesar Rp11.631,00 per USD. Sementara itu, DPK dalam rupiah tetap tumbuh 4,30% (qtq) atau 18,39% (yoy) menjadi Rp108,87 triliun.

**Grafik 3.2. Perkembangan DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Jenis Simpanan**



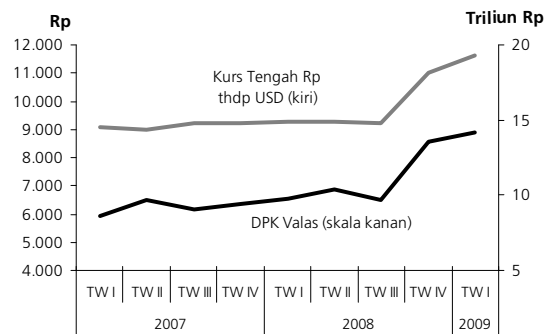
Sumber: LBU KBI Bandung

**Grafik 3.3. Perkembangan DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Jenis Valuta**



Sumber: LBU KBI Bandung

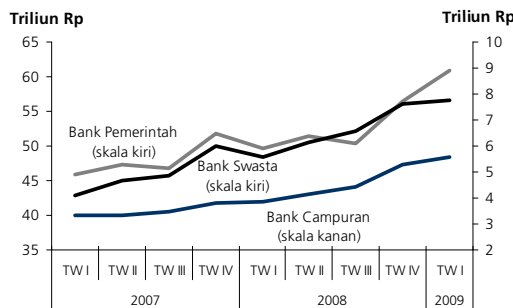
**Grafik 3.4. Perkembangan DPK Valuta Asing & Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD**



Sumber: LBU KBI Bandung

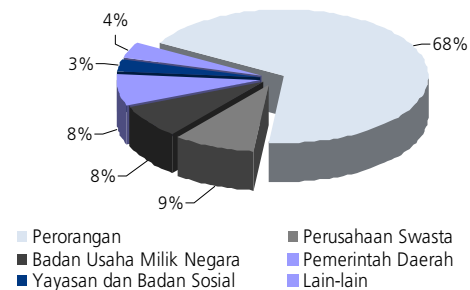
Berdasarkan kelompok bank, pada triwulan I-2009, DPK kelompok bank pemerintah meningkat melampaui jumlah DPK yang dihimpun kelompok bank swasta. DPK yang dihimpun kelompok bank pemerintah tumbuh 7,78% (qtq) atau 22,71% (yoy) menjadi Rp60,82 triliun, sedangkan DPK kelompok bank swasta tumbuh 1,01% (qtq) atau 17,19% (yoy) menjadi Rp56,63 triliun. Sementara itu, DPK kelompok bank asing/campuran tumbuh 5,98% (qtq) atau 43,97% (yoy) menjadi Rp5,58 triliun.

**Grafik 3.5. Perkembangan DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank**



Sumber: LBU KBI Bandung

**Grafik 3.6. DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Triwulan I-2009 Berdasarkan Golongan Kepemilikan**



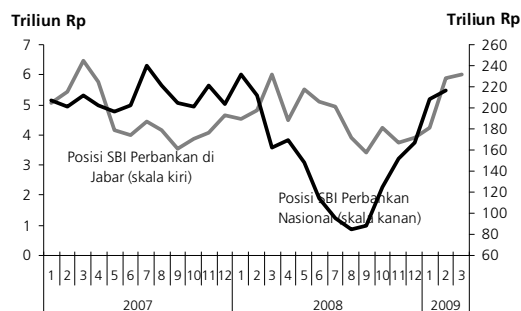
Sumber: LBU KBI Bandung

Berdasarkan golongan pemilik, pada triwulan I-2009, DPK milik pemerintah daerah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yakni 69,32% (qtq) dari Rp5,74 triliun pada triwulan IV-2008 menjadi Rp9,71 triliun, sehingga pangsaanya meningkat dari 4,87% menjadi 7,90%. Golongan perseorangan masih tetap mendominasi pangsa DPK yakni sebesar 68% atau sebesar Rp83,98 triliun, yang tumbuh 0,95% (qtq) atau 21,13% (yoy). Sementara itu, golongan pemilik BUMN mengalami pertumbuhan sebesar 8,74% (qtq) atau 22,21% (yoy) menjadi Rp9,88 triliun. Di pihak lain, DPK golongan pemilik perusahaan swasta mengalami penurunan sebesar 9,79% (qtq), meski secara tahunan tetap tumbuh 17,95% menjadi Rp11,42 triliun.

### Ekses Likuiditas

Meskipun tekanan likuiditas perbankan semakin terkendali, namun jumlah ekse likuiditas berupa penempatan bank pada **Sertifikat Bank Indonesia (SBI)** masih tetap tinggi. Jumlah penempatan SBI perbankan Jawa Barat posisi bulan Maret 2009 mencapai Rp6,01 triliun atau meningkat 50,6% dibandingkan posisi Desember 2008. Sementara itu, posisi SBI perbankan nasional sampai bulan Februari 2009 mencapai Rp217 triliun, sehingga porsi penempatan SBI perbankan Jawa Barat terhadap perbankan nasional hanya sebesar 2,78%.

**Grafik 3.7. Perkembangan SBI Bank Umum Konvensional di Jawa Barat dan SBI Perbankan Nasional**



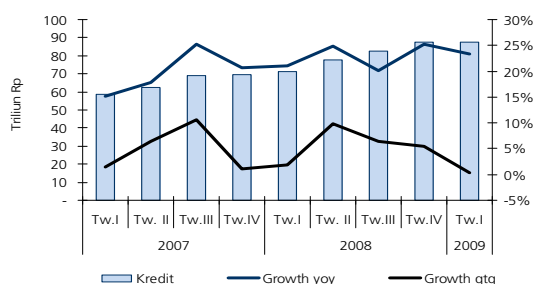
Sumber: LBU KBI Bandung

## 2.2 Perkembangan dan Risiko Kredit

### Perkembangan Kredit

Pertumbuhan kredit yang disalurkan bank umum konvensional di Jawa Barat pada triwulan I-2009 mengalami perlambatan seiring dengan meningkatnya tekanan karena memburuknya perekonomian. *Outstanding* kredit yang disalurkan sampai dengan posisi Maret 2009 tumbuh 0,27% (qtq) atau 23,40% (yoy) menjadi Rp87,58 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV-2008 yang mencapai 5,41% (qtq) atau 25,25% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit diindikasikan terkait dengan kebijakan kredit perbankan yang lebih ketat seiring dengan masih tingginya persepsi risiko kredit.

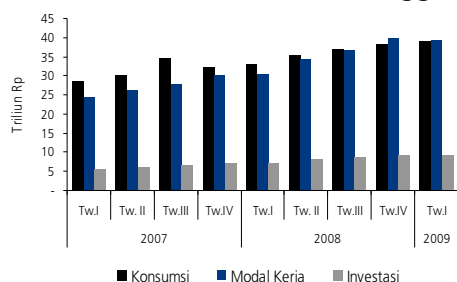
**Grafik 3.8. Perkembangan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat**



Sumber: LBU KBI Bandung

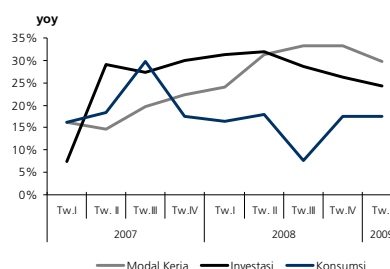
Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit yang disalurkan perbankan di Jawa Barat masih didominasi oleh kredit produktif (modal kerja dan investasi) dengan pangsa 55,45% atau Rp48,56 triliun, sedangkan sisanya 44,55% atau Rp39,02 triliun adalah kredit konsumsi. Sejalan dengan pertumbuhan kredit keseluruhan, semua kredit jenis penggunaan mengalami perlambatan. Secara tahunan, pertumbuhan *outstanding* kredit untuk modal kerja melambat dari 33,29% (yoy) pada triwulan IV-2008 menjadi 29,72% (yoy) pada triwulan I-2009. Pertumbuhan *outstanding* kredit untuk investasi melambat dari 26,26% menjadi 24,21%, sementara pertumbuhan *outstanding* kredit untuk konsumsi melambat dari 17,59% menjadi 17,44%. Secara triwulanan, *outstanding* kredit investasi dan modal kerja mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,38% dan 1,45%, sedangkan *outstanding* kredit konsumsi masih tumbuh 2,23%.

**Grafik 3.9. Perkembangan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan**



Sumber: LBU KBI Bandung

**Grafik 3.10. Perkembangan Pertumbuhan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan**



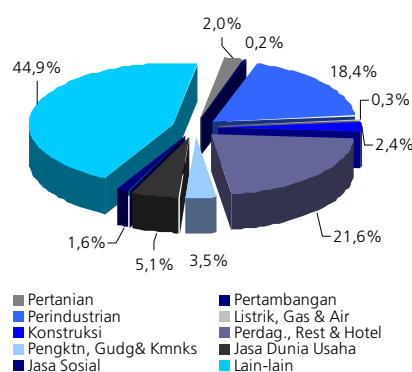
Sumber: LBU KBI Bandung

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit yang disalurkan masih tetap didominasi oleh tiga sektor utama yakni sektor lain-lain (konsumsi), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) dan sektor industri pengolahan masing-masing dengan pangsa 44,9%, 21,6% dan 18,4%.

Secara tahunan, kredit kepada seluruh sektor tetap mengalami pertumbuhan. Kredit ke sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan sangat signifikan, yakni sebesar 300% (yoy) menjadi Rp3,09 triliun. Pertumbuhan kredit terbesar kedua dialami sektor listrik, gas dan

air yang tumbuh 127% menjadi Rp290 miliar. Sementara itu secara triwulanan, kredit yang disalurkan ke lima sektor ekonomi mengalami peningkatan yakni sektor pertanian (3,04%/qtq), sektor listrik, gas dan air (17,03%), sektor PHR (0,53%), sektor jasa sosial (1,64%) dan sektor lain-lain (2,14%), sedangkan lima sektor lainnya mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

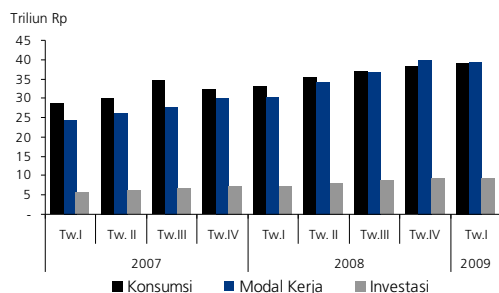
**Grafik 3.11. Pangsa Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Sektor Ekonomi Triwulan I-2009**



Sumber: LBU KBI Bandung

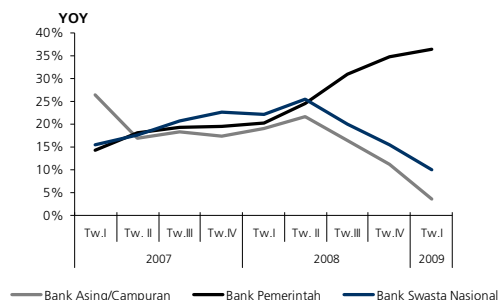
**Kelompok bank pemerintah masih memiliki pangsa terbesar dalam penyaluran kredit di Jawa Barat.** Pada triwulan I-2009, pangsa kredit kelompok bank pemerintah mencapai 57,03%, disusul oleh kelompok bank swasta yang mencapai 39,57%, dan sisanya yakni 3,41% merupakan kelompok bank asing/campuran. Pertumbuhan kredit kelompok Bank Pemerintah dua tahun terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat. Kondisi sebaliknya terjadi pada kelompok bank swasta dan bank asing/campuran yang justru mengalami tren perlambatan sejak empat triwulan terakhir (Grafik 3.13.). Secara tahunan, pada triwulan I-2009 kredit yang disalurkan kelompok bank pemerintah tumbuh 36,52% (yoy) menjadi Rp49,95 triliun. *Outstanding* kredit kelompok bank swasta mencapai Rp34,65 triliun atau tumbuh melambat dari 15,59% menjadi 9,98%. Sementara itu, kelompok bank asing/campuran mencapai Rp2,99 triliun atau tumbuh melambat dari 11,24% menjadi 3,56%.

**Grafik 3.12. Perkembangan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank**



Sumber: LBU KBI Bandung

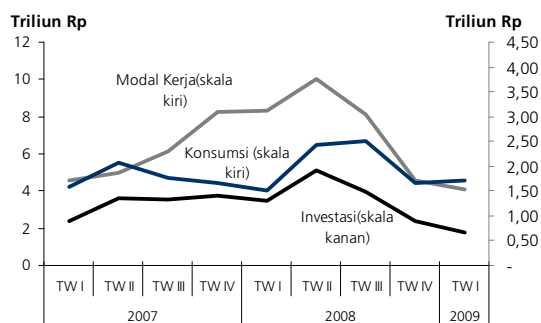
**Grafik 3.13. Perkembangan Pertumbuhan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank**



Sumber: LBU KBI Bandung

Seiring dengan perlambatan pertumbuhan kredit, pada triwulan I-2009, persetujuan plafon kredit baru mengalami penurunan yakni sebesar 5,99% (qtq) atau 31,96% (yoy) menjadi Rp9,27 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, persetujuan plafon untuk kredit konsumsi mengalami pertumbuhan sebesar 2,78% (qtq) atau 13,80% (yoy) menjadi Rp4,54 triliun, sedangkan kredit modal kerja dan investasi mengalami penurunan baik secara triwulanan maupun tahunan. Secara triwulanan, persetujuan plafon untuk kredit modal kerja dan investasi mengalami penurunan masing-masing sebesar 10,68% (qtq) dan 25,49% menjadi masing-masing Rp4,06 triliun dan Rp0,67 triliun. Sementara secara tahunan, kedua jenis kredit tersebut mengalami penurunan masing-masing sebesar 51,28% dan 48,54%.

**Grafik 3.14. Perkembangan Persetujuan Plafon Kredit Baru Bank Umum Konvensional di Jawa Barat**



Sumber: LBU KBI Bandung

Sebagian besar kredit yang disalurkan bank umum konvensional di Jawa Barat masih terfokus di Kota Bandung (48,14% dari total *outstanding* kredit). Hal ini disebabkan sebagian besar unit usaha di Jawa Barat berada di Kota Bandung dan sekitarnya. Selain itu, Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat juga merupakan salah satu pusat perekonomian di Jawa Barat. Sementara itu, pangsa kabupaten dan kota lainnya di bawah 8%. Terbesar kedua adalah Kota Bogor (7,22%), disusul Kota Bekasi (7,10%) dan sisanya tersebar di 22 kabupaten dan kota lainnya.

**Tabel 3.1. Jumlah Kredit Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Triwulan I-2009**

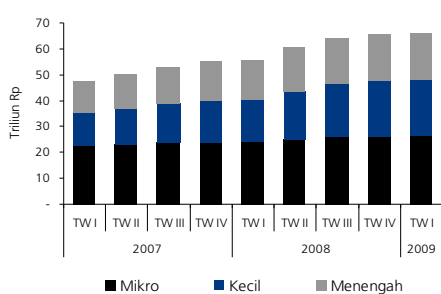
KABUPATEN/KOTA	KREDIT (Juta Rupiah)	Pangsa
Kota Bandung	42.160.127	48,14%
Kota Bogor	6.320.327	7,22%
Kota Bekasi	6.222.220	7,10%
Kota Cirebon	5.601.099	6,40%
Kota Tasikmalaya	3.520.117	4,02%
Kota Sukabumi	2.335.476	2,67%
Kab. Karawang	2.168.484	2,48%
Kab. Subang	2.020.453	2,31%
Kab. Garut	1.766.675	2,02%
Kab. Bekasi	1.714.341	1,96%
Kab. Purwakarta	1.641.148	1,87%
Kota Depok	1.518.345	1,73%
Kab. Bogor	1.494.005	1,71%
Kab. Cianjur	1.272.841	1,45%
Kab. Bandung	1.272.562	1,45%
Kab. Indramayu	1.182.924	1,35%
Kab. Sumedang	1.130.072	1,29%
Kota Cimahi	1.098.546	1,25%
Kota Banjar	774.520	0,88%
Kab. Sukabumi	714.099	0,82%
Kab. Kuningan	525.621	0,60%
Kab. Majalengka	490.439	0,56%
Kab. Ciamis	325.808	0,37%
Kab. Tasikmalaya	313.160	0,36%
<b>Jawa Barat</b>	<b>87.583.409</b>	<b>100%</b>

Sumber: LBU KBI Bandung

### Kredit Mikro, Kecil dan Menengah (MKM)

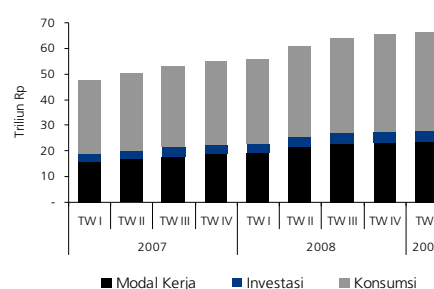
**Kredit MKM (Mikro, Kecil dan Menengah) yang disalurkan bank umum di Jawa Barat pada triwulan I-2009 mencapai Rp66,18 triliun atau 75,57% dari total kredit.** Seperti halnya yang dialami kredit secara keseluruhan, pertumbuhan kredit MKM mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I-2009, kredit MKM tumbuh 1,39% (qtq) atau 18,56% (yoy). Jika dilihat berdasarkan skala nominalnya, kredit mikro (di bawah Rp50 juta) memiliki pangsa 40%, kredit kecil (di atas Rp50 juta di bawah Rp500 juta) pangasanya mencapai 33%, dan sisanya 27% merupakan kredit menengah (di atas Rp500 juta di bawah Rp5 miliar). Sementara itu, berdasarkan jenis penggunaannya, kredit MKM masih didominasi oleh kredit konsumsi dengan pangsa sebesar 58% sedangkan sisanya sebesar 42% merupakan kredit produktif (modal kerja dan investasi).

**Grafik 3.15. Perkembangan Kredit MKM Berdasarkan Skala Usaha**



Sumber: LBU KBI Bandung

**Grafik 3.16. Perkembangan Kredit MKM Berdasarkan Jenis Penggunaan**



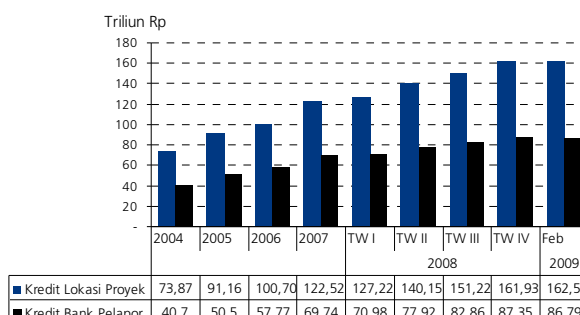
Sumber: LBU KBI Bandung



### Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek

Perkembangan kredit yang disalurkan perbankan nasional di Provinsi Jawa Barat (lokasi proyek) menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit bank pelapor, meski trennya melambat. Sampai dengan posisi bulan Februari 2009, *outstanding* kredit berdasarkan lokasi proyek mencapai Rp162,54 triliun, tumbuh 0,38% (qtq) atau 27,77% (yoy). Berdasarkan jenis

Grafik 3.17. Perkembangan Kredit Lokasi Proyek dan Kredit Bank Pelapor



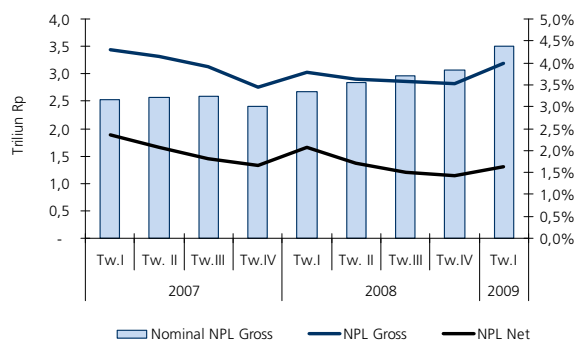
Sumber: LBU KBI Bandung

penggunaannya, kredit berlokasi proyek di Jawa Barat didominasi oleh kredit produktif (modal kerja dan investasi) yang mencapai 63% dari total kredit, sedangkan sisanya sebesar 37% merupakan kredit untuk konsumsi. Sementara itu, berdasarkan sektor ekonominya, kredit masih didominasi oleh kredit konsumsi (37%), kredit sektor industri pengolahan sebesar 31%, serta kredit sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 15%.

### Risiko kredit

Selama triwulan I-2009, seiring dengan perlambatan ekonomi, risiko kredit semakin meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) baik secara nominal maupun persentasenya. Nilai nominal NPL Gross naik dari Rp3,07 triliun pada triwulan IV-2008 menjadi Rp3,50 triliun pada triwulan laporan. Sejalan dengan hal tersebut, persentase NPL Gross meningkat dari 3,52% (posisi Desember 2008) menjadi 3,99% (posisi Maret 2009).

Grafik 3.18. Perkembangan Jumlah Kredit Bermasalah Bank Umum Konvensional di Jawa Barat



Sumber: LBU KBI Bandung

Risiko kredit bank umum di Jawa Barat selain dipengaruhi oleh kondisi perbankan sendiri juga sangat ditentukan oleh kondisi eksternal seperti kurs rupiah, pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Berdasarkan *macroeconomic stress test* ketiga faktor tersebut secara signifikan mempengaruhi risiko kredit. (lihat Boks 8 Analisis Risiko Kredit Perbankan di Jawa Barat).

Pada triwulan I-2009, berdasarkan kelompok bank, persentase NPL gross untuk kelompok bank swasta dan kelompok bank pemerintah meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Sebaliknya, persentase jumlah kredit bermasalah kelompok bank asing/campuran relatif mengalami penurunan. Persentase NPL gross kelompok bank pemerintah mengalami kenaikan dari 3,39% pada triwulan IV-2008 menjadi 4,09%. Pada triwulan I-2009, hal yang sama terjadi pada NPL di kelompok bank swasta, yaitu meningkat dari 3,21% menjadi 3,42%.

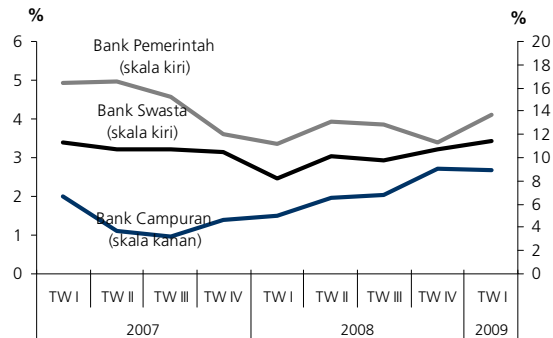
Sementara itu, persentase NPL gross pada kelompok bank asing/campuran justru mengalami penurunan dari 9,06% menjadi 8,95%. Namun demikian, penurunan ini tidak berpengaruh terhadap persentase NPL secara keseluruhan mengingat pangsa bank asing/campuran relatif kecil (hanya 3,41%).

Berdasarkan jenis penggunaannya, pada triwulan I-2009, peningkatan persentase kredit bermasalah terjadi pada kredit untuk modal kerja dan konsumsi, sedangkan kredit investasi mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Persentase NPL gross kredit modal kerja mengalami peningkatan dari 4,20% pada triwulan IV-2009 menjadi 5,29%, sementara NPL gross kredit konsumsi naik dari 2,08% menjadi 2,16%. Kondisi berbeda terjadi pada kredit NPL gross investasi yang mengalami penurunan dari 6,53% pada triwulan IV-2009 menjadi 6,24%.

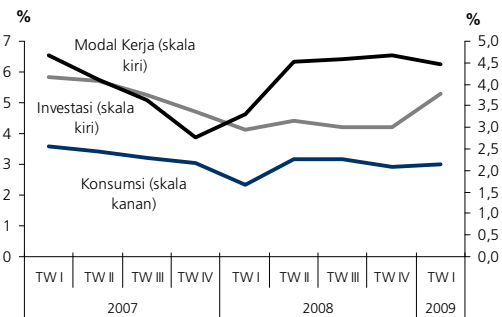
Pada triwulan I-2009, risiko kredit pada sebagian besar sektor ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), sektor bangunan dan konstruksi, sektor pertanian dan sektor pertambangan. Persentase NPL gross kredit yang disalurkan kepada sektor industri pengolahan meningkat dari 5,93% pada triwulan IV-2008 menjadi 7,22% pada triwulan I-2009. NPL gross kredit kepada sektor PHR meningkat dari

**Grafik 3.19. Perkembangan NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank**



Sumber: LBU KBI Bandung

**Grafik 3.20. Perkembangan NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan**



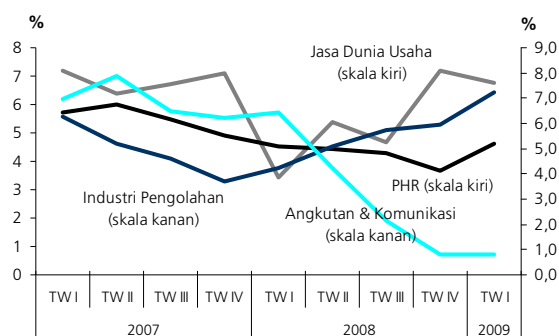
Sumber: LBU KBI Bandung

3,66% menjadi 4,62%. Sementara itu, sektor-sektor yang mengalami penurunan risiko kredit adalah sektor jasa dunia usaha, sektor jasa sosial dan sektor listrik, gas dan air.

**Berdasarkan kota, persentase kredit bermasalah terdapat di Kota Bandung mencapai 5,19% terhadap kredit yang disalurkan di kota tersebut.** Empat daerah lainnya yang memiliki persentase kredit bermasalah terbesar adalah Kabupaten Purwakarta yang mencapai

4,22%, Kota Depok mencapai 3,97%, Kota Bekasi mencapai 3,91% dan Kota Tasikmalaya mencapai 3,78%. Sementara itu, lima daerah yang memiliki persentase NPL terendah adalah Kabupaten Majalengka (0,08%), Kabupaten Kuningan (0,30%), Kota Cimahi (1,08%), Kabupaten Sumedang (1,18%) dan Kota Banjar (1,44%).

**Grafik 3.21. Perkembangan NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Beberapa Sektor Ekonomi Utama**



Sumber: LBU KBI Bandung

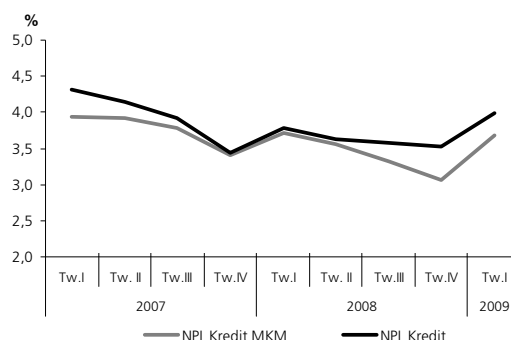
**Tabel 3.2. NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota**

KABUPATEN/KOTA	KREDIT (Juta Rp)	NPL	
		NOMINAL (Juta Rp)	%
Kota Bandung	41.852.528	2.170.418	5,19
Kab. Purwakarta	1.641.148	69.277	4,22
Kota Depok	1.518.345	60.301	3,97
Kota Bekasi	6.222.220	243.235	3,91
Kota Tasikmalaya	3.520.117	133.067	3,78
Kab. Tasikmalaya	313.160	11.203	3,58
Kota Bogor	6.320.327	215.271	3,41
Kab. Sukabumi	714.099	22.351	3,13
Kota Sukabumi	2.335.476	72.168	3,09
Kab. Bekasi	1.714.341	52.037	3,04
Kab. Karawang	2.168.484	64.147	2,96
Kota Cirebon	5.601.099	152.559	2,72
Kab. Indramayu	1.182.924	29.198	2,47
Kab. Subang	2.020.453	46.594	2,31
Kab. Cianjur	1.272.841	26.603	2,09
Kab. Bogor	1.494.005	28.873	1,93
Kab. Garut	1.766.675	32.224	1,82
Kab. Bandung	1.580.161	23.328	1,48
Kab. Ciamis	325.808	4.720	1,45
Kota Banjar	774.520	11.148	1,44
Kab. Sumedang	1.130.072	13.295	1,18
Kota Cimahi	1.098.546	11.848	1,08
Kab. Kuningan	525.621	1.588	0,30
Kab. Majalengka	490.439	388	0,08
<b>Jawa Barat</b>	<b>87.583.409</b>	<b>3.495.841</b>	<b>3,99</b>

Sumber: LBU KBI Bandung

Seiring dengan risiko kredit secara keseluruhan, risiko kredit mikro kecil dan menengah (MKM) pada triwulan I-2009 juga mengalami peningkatan. Selain itu, persentase NPL gross kredit MKM masih tetap di bawah persentase NPL kredit secara keseluruhan. Persentase NPL gross kredit MKM mengalami peningkatan dari 3,06% pada triwulan IV-2008 menjadi 3,69%, seiring peningkatan nominal kredit MKM bermasalah dari Rp1,99 triliun menjadi Rp2,44 triliun.

Grafik 3.22. Perkembangan NPL Gross Kredit MKM dan Total Kredit



Sumber: LBU KBI Bandung

## 2.3 Risiko Pasar

Perbankan Jawa Barat memiliki respon yang berbeda terhadap kontraksi kebijakan moneter selama triwulan I-2009. Secara keseluruhan, perbankan Jawa Barat telah menurunkan suku bunga deposito 1 bulan sejak bulan Januari 2009. Hal ini menunjukkan bahwa respon suku bunga deposito perbankan di Jawa Barat terhadap suku bunga acuan adalah 1 bulan. Sementara itu, suku bunga kredit perbankan Jawa Barat telah menunjukkan respon terbatas atas penurunan suku bunga acuan. Sejak bulan Januari 2009, seluruh bank telah menurunkan suku bunga kredit investasi. Responsifnya suku bunga kredit investasi perbankan Jawa Barat diperkirakan karena kredit investasi memiliki pangsa terkecil dari penyaluran kredit.

Berdasarkan jenis penggunaannya, suku bunga kredit konsumsi untuk kategori bank beraset besar dan menengah telah turun. Namun demikian, bank beraset kecil masih menaikkan suku bunga kredit konsumsi yang diduga akibat segmentasi likuiditas. Di lain pihak, suku bunga kredit modal kerja bank beraset besar dan sedang masih mengalami kenaikan karena pangsa KMK yang besar sehingga penurunan suku bunga dapat menimbulkan penurunan keuntungan (*coordination failure*).

Tabel 3.3. Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan di Jawa Barat

Kategori Bank dan Jenis Kredit	Oct-08	Nov-08	Dec-08	Jan-09	Feb-09
<b>Bank beraset besar</b>					
KMK	15.43	15.65	15.85	16.00	16.05
KI	14.78	15.06	15.07	15.03	14.99
KK	12.11	12.20	12.28	12.27	12.21
Deposito 1 bulan	6.87	7.07	7.26	6.99	6.72
<b>Bank beraset sedang</b>					
KMK	17.98	18.82	19.52	19.97	20.09
KI	15.78	16.36	16.74	17.12	17.34
KK	14.93	15.33	15.55	15.54	15.52
Deposito 1 bulan	8.57	8.75	9.20	8.86	8.73
<b>Bank beraset kecil</b>					
KMK	16.30	16.50	16.68	16.54	16.53
KI	15.13	15.38	15.57	15.32	15.34
KK	17.19	17.44	17.55	17.55	17.67
Deposito 1 bulan	9.56	9.72	9.69	9.59	9.54

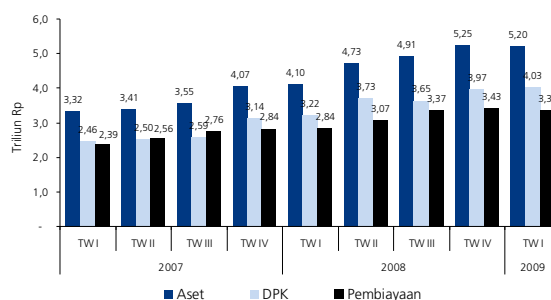
Sumber: LBU, diolah

### 3. BANK UMUM SYARIAH

Perkembangan beberapa indikator bank umum syariah di Jawa Barat pada triwulan I-2009, secara tahunan tetap menunjukkan peningkatan. Namun secara triwulanan pada umumnya mengalami penurunan kecuali DPK yang dihimpun. Secara tahunan, aset, pembiayaan dan DPK masing-masing tumbuh 26,81%, 18,06% dan 25,29%.

Sebaliknya, secara triwulanan aset dan pembiayaan mengalami penurunan masing-masing 0,92% dan 2,04%, sedangkan DPK tetap tumbuh sebesar 1,45%. Dengan kondisi tersebut, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank umum syariah di Jawa Barat mengalami sedikit penurunan dari 86% pada triwulan IV-2008 menjadi 83% pada triwulan laporan. Di sisi lain, risiko pembiayaan juga mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah/*Non Performing Financing* (NPF) yang mengalami peningkatan dari 3,55% pada Desember 2008 menjadi 3,90% pada Februari 2009.

Grafik 3.23. Perkembangan Bank Umum Syariah Di Jawa Barat



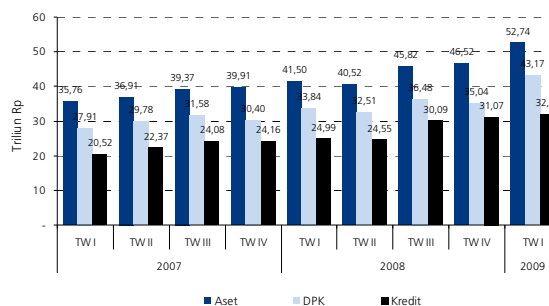
Sumber: LBUS KBI Bandung

### 4. BANK UMUM YANG BERKANTOR PUSAT DI JAWA BARAT

Perkembangan bank umum berkantor pusat di Jawa Barat pada triwulan I-2009 tetap mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan aset yang mencapai 13,36% (qtq) atau 27,07% (yoy) menjadi sebesar Rp46,52 triliun.

DPK tumbuh 23,19% (qtq) atau 27,56% (yoy) menjadi Rp43,17 triliun. Kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan 3,28% (qtq) atau 28,39% (yoy) menjadi Rp32,09 triliun. Di sisi lain, LDR bank umum tersebut mengalami penurunan dari 88,66% triwulan sebelumnya menjadi 74,33%. Sementara itu, risiko kredit mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari persentase kredit bermasalah yang naik dari 0,76% pada triwulan sebelumnya menjadi 0,90% pada triwulan I-2009.

Grafik 3.24. Perkembangan Bank yang Berkantor Pusat di Jawa Barat



Sumber: LBU KBI Bandung

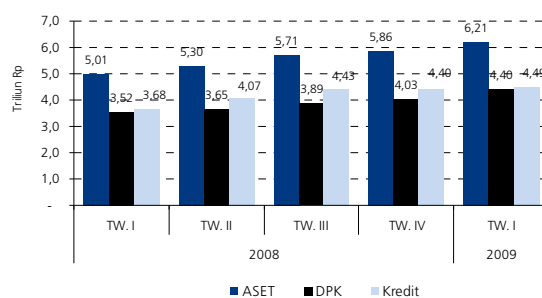
Pada awal tahun 2009, tujuh bank umum yang berkantor pusat di Jawa Barat menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari laba yang berhasil diperoleh dalam tiga bulan pertama. Sampai dengan bulan Maret 2009 *Net Interest Income* (NII) tercatat sebesar Rp883,8 miliar atau lebih tinggi dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp774,97 miliar. Namun secara persentase NII hanya mencapai 2,43% atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2,49%). Sementara itu, rasio *Return on Asset* (ROA) sampai dengan bulan Maret 2009 tercatat sebesar 0,70% lebih rendah dibandingkan dengan posisi Maret 2008 (0,82%),

sedangkan rasio efisiensi antara Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 81,69% lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun 2008 yang sebesar 76,56%.

## 5. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Secara umum perkembangan indikator BPR di Provinsi Jawa Barat pada triwulan I-2009 mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya beberapa indikator BPR seperti aset, DPK dan kredit. Total aset tumbuh 4,54% (qtq) atau 8,83% (yoy) menjadi sebesar Rp6,24 triliun. DPK tumbuh 9,13% (qtq) atau 24,96% (yoy) menjadi Rp4,39 triliun. Penyaluran kredit BPR juga mengalami pertumbuhan 2,14% (qtq) atau

Grafik 3.25. Perkembangan BPR di Provinsi Jawa Barat



Sumber: LBPR KBI Bandung

22,08% (yoy) menjadi Rp4,49 triliun. Jika dilihat berdasarkan jenis penggunaannya, sebagian besar kredit yang disalurkan BPR merupakan kredit produktif (modal kerja dan investasi), dengan pangsa mencapai sekitar 57,04% dari total kredit BPR, sedangkan sisanya merupakan kredit konsumsi. Sementara itu, perkembangan kredit modal kerja mengalami penurunan sebesar 0,24% (qtq) menjadi Rp2,42 triliun, kredit investasi turun 4,14% (qtq) menjadi Rp0,14 triliun, sementara kredit konsumsi naik 5,76% (qtq) menjadi Rp1,93 triliun.

## BOKS 7

## SURVEI DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL TERHADAP PERBANKAN JAWA BARAT

Krisis keuangan global tidak saja berpengaruh terhadap ekonomi makro Jawa Barat, namun juga diperkirakan berdampak terhadap perbankan. Untuk mengetahui kondisi terkini perbankan pada triwulan I-2009, KBI Bandung menyelenggarakan survei dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Jawa Barat.

### Evaluasi Kinerja Perbankan Triwulan I-2009

Hasil survei kepada perbankan menunjukkan bahwa pada triwulan I-2009, pelaku usaha perbankan berpendapat bahwa kinerja bank secara umum diperkirakan akan meningkat jika dibandingkan dengan triwulan I-2008 dan triwulan IV-2008. Jika dibandingkan dengan triwulan IV-2008, sebagian besar indikator-indikator kinerja perbankan menunjukkan perbaikan, kecuali kualitas aktiva produktif serta LDR mengalami stagnasi. Sementara itu, secara tahunan, perbankan Jawa Barat dapat mempertahankan kinerjanya meskipun penurunan terutama akan terjadi pada margin keuntungan dan LDR. Kondisi ini berbeda dengan kinerja perbankan yang sangat baik secara keseluruhan pada tahun 2008 dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang sangat besar, yakni 25,25% (yoy) dan tingkat NPL yang relatif rendah yakni sebesar 3,99%.

**Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Survei**

#### Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan pada Triwulan I-2009

No.	Indikator Kinerja	Perbandingan dgn Triwulan IV-2008	Perbandingan dgn Triwulan I-2008
1	Likuiditas	Sedikit Meningkat	Tetap
2	Margin	Sedikit Meningkat	Sedikit Menurun
3	Dana Pihak Ketiga	Sedikit Meningkat	Sedikit Meningkat
4	Kredit	Sedikit Meningkat	Sedikit Meningkat
5	Kualitas Aktiva Produktif	Tetap	Tetap
6	NPL	Sedikit Menurun	Sedikit Meningkat
7	LDR	Tetap	Sedikit Menurun
8	Jumlah Tenaga Kerja Tetap	Tetap	Tetap
9	Jumlah Tenaga Kerja Kontrak	Sedikit Meningkat	Sedikit Meningkat

Mayoritas responden menjawab bahwa faktor penyebab stagnasi kinerja usaha perbankan di Jawa Barat adalah penurunan aktivitas penghimpunan dana, serta kegiatan perdagangan internasional dan domestik. Secara umum pihak perbankan di Jawa Barat mempersepsikan bahwa krisis finansial memiliki dampak terhadap *cost of fund* perbankan (suku bunga *funding* maupun *lending*), aset dan NPL.

### Ekspektasi Kinerja Perbankan Enam Bulan yang Akan Datang

Mayoritas pelaku usaha perbankan memperkirakan bahwa pada 6 bulan yang akan datang, aset dan DPK akan sedikit meningkat, sementara tingkat suku bunga baik *funding* maupun *lending* akan sedikit menurun. Beberapa sektor yang dianggap oleh perbankan masih prospektif untuk dibiayai pada 6 bulan mendatang antara lain sektor pengolahan, pertambangan, listrik gas dan air bersih, bangunan dan jasa-jasa. Sementara sektor yang diperkirakan sedikit menurun diantaranya adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa.

**Tabel 2. Prospek Kredit 6 Bulan Yang Akan Datang**

No.	Sektor	Perkiraan Kinerja
1	Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan	Tetap
2	Sektor Pertambangan	Sedikit Meningkat
3	Sektor Industri Pengolahan	Sedikit Meningkat
4	Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	Sedikit Meningkat
5	Sektor Bangunan	Sedikit Meningkat
6	Sektor Perdagangan Hotel& Restoran	Meningkat
7	Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Sedikit Menurun
8	Sektor Jasa-Jasa	Sedikit Meningkat
9	Sektor Lain-Lain	Sedikit Meningkat

Strategi perbankan Jawa Barat dalam mengantisipasi dampak krisis keuangan global, antara lain melalui penyaluran kredit secara lebih selektif serta menurunkan tingkat suku bunga pendanaan. Perbankan Jawa Barat memperkirakan bahwa kinerja perbankan di masa mendatang, masih akan meningkat terutama disebabkan oleh membaiknya kondisi pasar domestik dan kesesuaian kebijakan moneter (suku bunga acuan/*BI rate*).



## BOKS 8

## ANALISIS RISIKO KREDIT PERBANKAN DI JAWA BARAT

Risiko kredit yang diindikasikan oleh NPL dapat dipengaruhi oleh faktor internal serta faktor eksternal. Jika diamati secara agregat maka faktor pendorong peningkatan risiko kredit terutama adalah dari sisi eksternal perbankan. Faktor-faktor eksternal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perbankan, antara lain berasal dari pasar modal, pasar uang dan sektor riil. Dari pasar modal, perkembangan IHSG dapat digunakan sebagai acuan untuk mencerminkan preferensi serta kesempatan perbankan dalam menghimpun modal. Selain itu, nilai saham dapat mempengaruhi neraca bank terkait dengan surat-surat berharga yang dihargai dengan *market value*. Sementara, kurs yang digunakan sebagai indikator dalam pasar uang dapat mencerminkan risiko pasar. Depresiasi kurs dapat meningkatkan risiko kredit karena potensi gagal bayar kreditur yang menggunakan bahan baku impor, serta *mismatch* dalam pengelolaan neraca bank. Indikator sektor riil dapat diperoleh dari perkembangan PDRB dan inflasi Jawa Barat. Output perekonomian yang tinggi dapat menurunkan risiko kredit karena peningkatan kemampuan membayar kreditur, sedangkan inflasi yang tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat dan menyebabkan ketidakstabilan perekonomian secara jangka panjang. Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut maka disusun model yang dapat menangkap potensi kenaikan risiko kredit perbankan Jawa Barat, sebagai berikut:

$$NPL = c + \alpha_1 \cdot NPL_{t-1} + \alpha_2 \cdot Y_{t-4} + \alpha_3 \cdot KURS_{t-2} + \alpha_4 \cdot \pi_{t-4} + \alpha_5 \cdot IHSG_{t-2}$$

Keterangan:

NPL : Risiko kredit atau rasio *non performing loans gross* perbankan Jabar

Y : PDRB Jawa Barat

Kurs : Kurs Rupiah (Rp/USD)

$\pi$  : Inflasi tahunan Jawa Barat (yoy)

IHSG : Rata-rata Indeks Hari Saham Gabungan tiap bulan

Dari hasil *macroeconomic stress test* atas NPL perbankan di Jawa Barat, hanya variabel IHSG yang tidak memiliki hubungan dengan risiko kredit perbankan di Jawa Barat, sementara variabel lain, yakni PDRB, kurs rupiah, inflasi, dan IHSG memiliki hubungan yang kuat dengan *lag* tertentu. Hal ini diperkirakan akibat IHSG tidak dapat mencerminkan nilai surat berharga yang berada di neraca perbankan Jawa Barat dan relatif konvensionalnya perbankan Jawa Barat dalam menempatkan asetnya.

Berdasarkan persamaan diatas maka diperkirakan risiko kredit akan meningkat dari 3,99% pada triwulan I-2009 menjadi kisaran 4,1% hingga 4,4% pada triwulan II-2009. Namun demikian, kenaikan risiko kredit tersebut masih dalam level aman yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia.

**Tabel Persamaan Macroeconomic Stress Test**

Variabel	Koefisien
C	8,86**
NPL <sub>t-1</sub>	0,72**
Y <sub>t-4</sub>	-0,93**
Kurs <sub>t-1</sub>	0,67**
$\pi$ <sub>t-4</sub>	0,06*
IHSG <sub>t-2</sub>	0,13
R-squared	88%
DW-stat	2,63

Sumber: LBU KBI Bandung, BPS, dan BI

## BAB 4

# KEUANGAN DAERAH

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp8,26 triliun, meningkat 33,59% (yoy) dibandingkan volume APBD pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp6,19 triliun.** Dari sisi pendapatan, peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sementara itu, dari sisi belanja peningkatan volume APBD 2009 antara lain didorong oleh peningkatan pada alokasi belanja langsung yaitu sekitar 65%, sedangkan alokasi belanja tidak langsung meningkat sebesar 25%.

**Kebijakan APBD tahun 2009 ditujukan untuk mewujudkan 8 (delapan) *common goals*.** Ke delapan *common goals* tersebut adalah peningkatan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia, ketahanan pangan, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan kinerja aparatur, penanganan pengelolaan bencana, pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan, pengembangan infrastruktur wilayah, serta kemandirian energi dan kecukupan air baku.

**Sampai dengan triwulan I-2009, realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai Rp393,40 miliar, atau 4,76% dari total anggaran belanja daerah tahun 2009.** Angka tersebut lebih tinggi 40,08% dari realisasi belanja pada triwulan I-2008. Realisasi belanja tidak langsung mencapai Rp227,97 miliar, atau 4,23% dari total belanja tidak langsung tahun 2009. Sementara itu, realisasi belanja langsung, yaitu komponen belanja daerah yang terkait langsung dengan program/kegiatan pembangunan daerah, mencapai Rp165,43 miliar, atau 5,75% dari total belanja langsung pada tahun 2009. Sebagian besar realisasi belanja pada triwulan I-2009 digunakan untuk belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji, tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS).

## **1. APBD PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009**

**APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 telah ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2009.** Penetapan APBD Pemprov Jabar tersebut lebih cepat dibandingkan penetapan pada tahun-tahun sebelumnya, yang biasa terjadi pada bulan Februari-Maret. Percepatan dimaksudkan agar proses pembangunan dapat lebih awal dilaksanakan, serta diharapkan dapat menjadi stimulus dalam menghadapi dampak krisis keuangan global yang sedang terjadi saat ini. Belanja langsung yang terkait dengan kegiatan pembangunan dan investasi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi penopang kegiatan perekonomian daerah serta mampu menyerap tenaga kerja ditengah lesunya kegiatan ekonomi di sektor swasta, sebagai akibat krisis keuangan global.

**Volume APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp8,26 triliun, meningkat 33,59% dibandingkan volume APBD tahun 2008.** APBD tersebut meliputi pendapatan daerah sebesar Rp6,95 triliun, belanja daerah sebesar Rp8,36 triliun, serta pembiayaan daerah sebesar Rp1,4 triliun. Sekitar 20% APBD 2009 dialokasikan untuk bidang pendidikan (Rp1,62 triliun), diikuti oleh bidang infrastruktur dan lingkungan hidup (Rp1,24 triliun atau 14,91% dari total belanja daerah), bidang ekonomi (Rp674,15 miliar atau 8,06%), dan bidang kesehatan (Rp306,98 miliar atau 3,67%).

Tabel 4.1. APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

No.	Uraian	APBD 2008 (Rp Miliar)	APBD 2009 (Rp Miliar)
<b>I</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>5.696,29</b>	<b>6.951,98</b>
1	Pendapatan Asli Daerah	4.055,12	5.176,29
2	Dana Perimbangan	1.630,81	1.763,25
3	Lain-lain PAD yang Sah	10,36	12,44
<b>II</b>	<b>Belanja</b>	<b>6.050,02</b>	<b>8.262,58</b>
1	Belanja Tidak Langsung	4.313,03	5.398,71
2	Belanja Langsung	1.736,99	2.863,87
<b>III</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>353,73</b>	<b>1.310,59</b>
1	Penerimaan Daerah	488,84	1.310,76
2	Pengeluaran Daerah	135,12	0,17
3	SILPA	-	-
	<b>Volume</b>	<b>6.185,13</b>	<b>8.262,74</b>

Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Barat

**Krisis ekonomi global yang terjadi sejak akhir tahun 2008 merupakan salah satu asumsi factor eksternal yang mendasari penetapan APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2009.** Beberapa asumsi kondisi eksternal lainnya adalah harga minyak dunia tahun 2009 sebesar 80 dolar AS, pemerintah tidak akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL), serta laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0%. Sementara itu, Kondisi internal yang diperkirakan berdampak terhadap APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2009 diantaranya adalah laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,6%-1,7%, tingkat inflasi sebesar 10%-12%, jumlah penduduk miskin menjadi pada kisaran 13%-14%, serta angka pengangguran berkisar 9%-10%. Namun demikian, asumsi yang digunakan tersebut masih dimungkinkan berubah mengikuti perkembangan terkini (lihat Boks 9. Asumsi Dasar Penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2009).

**Berdasarkan asumsi-asumsi yang ada, serta tantangan dan peluang ke depan, kebijakan APBD Tahun 2009 ditujukan untuk mewujudkan 8 (delapan) *common goals*.** Ke delapan *common goals* tersebut adalah peningkatan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia, ketahanan pangan, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan kinerja aparatur, penanganan pengelolaan bencana, pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan, pengembangan infrastruktur wilayah, serta kemandirian energi dan kecukupan air baku.

**Peningkatan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia melalui peningkatan di bidang pendidikan menjadi prioritas utama alokasi APBD tahun 2009, yaitu sebesar Rp1,62 triliun, atau 20,26% dari total belanja daerah.** Bidang pendidikan diarahkan pada peningkatan indeks pendidikan, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah diantaranya melalui penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun dengan program utama: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) provinsi mulai dari jenjang SD/MI sampai SMA/SMK/MA, pengadaan buku paket pelajaran untuk mata pelajaran yang

diujinasikan dari kelas 1 hingga kelas 12, peningkatan kesejahteraan guru khususnya di daerah terpencil, daerah perbatasan dan guru Madrasah serta penuntasan buta aksara.

**Alokasi terbesar kedua setelah bidang pendidikan adalah pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, yaitu sebesar Rp1,24 triliun atau 14,91% dari total belanja daerah.**

Bidang pekerjaan umum, perhubungan dan lingkungan hidup, diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan infrastruktur transportasi, sumber daya irigasi, penanggulangan bencana dan pengembangan sarana transportasi. Kegiatan tersebut akan direalisasikan melalui: pembebasan tanah untuk pembangunan Bandara Kertajati, Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), Tol Soroja (Soreang-Pasirkoja), dan TPA Legok Nangka, peningkatan kualitas jalan provinsi hingga jalan desa pada sentra-sentra pertanian dan industri terpilih dalam rangka desa membangun serta perbaikan jaringan irigasi.

**Sementara itu, alokasi APBD untuk bidang ekonomi dan bidang kesehatan masing-masing sebesar Rp674,15 miliar (8,06%) dan Rp306,98 miliar (3,67%).** Bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan indeks kesehatan yaitu meningkatkan Angka Harapan Hidup, mengurangi angka kematian ibu dan bayi serta pengendalian penyebaran penyakit menular dan khusus, dengan program utama: beasiswa bagi bidan desa yang berdomisili di daerah terpencil, peningkatan sebagian fasilitas Puskesmas, gerakan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih, pencegahan dan penanggulangan gizi buruk, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin serta bantuan untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat.

**Bidang ekonomi difokuskan pada ketahanan pangan melalui pengembangan komoditas beras, jagung, kedelai, ketersediaan protein hewani dan upaya diversifikasi pangan guna mencapai swasembada pangan sejalan dengan kebijakan nasional.** Khusus dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan daya beli masyarakat, dilakukan melalui Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR JABAR), Gerakan Pengembangan Perikanan Pantura dan Pantai Selatan (GAPURA JABAR), pemanfaatan teknologi pertanian, penataan sistem niaga hasil produksi pertanian, pengembangan agro industri, pemenuhan kebutuhan pupuk, stabilisasi harga gabah, peningkatan cadangan pangan daerah, serta dalam rangka perlindungan pasar tradisional dilaksanakan Gerakan Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional (GEMPITA JABAR).

## **2. PENDAPATAN DAERAH**

**Pendapatan daerah pada APBD tahun 2009 meningkat 22,04%, atau sekitar Rp1,26 triliun dibandingkan APBD tahun 2008.** Sebagian besar peningkatan pendapatan tersebut diasumsikan didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebesar Rp1,12 triliun, serta peningkatan Dana Perimbangan (sebesar Rp132,44 miliar), dan pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (sebesar Rp2,08 miliar).

**Tabel 4.2. Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 dan 2009**

No.	Uraian	APBD 2008 (Rp Miliar)	APBD 2009 (Rp Miliar)	Perubahan	
				Rp Miliar	%
1	Pendapatan Asli Daerah	4,055.12	5,176.29	1,121.17	22.04
2	Dana Perimbangan	1,630.81	1,763.25	132.44	22.04
3	Lain-lain PAD yang Sah	10.36	12.44	2.08	22.04
<b>Total Pendapatan</b>		<b>5,696.29</b>	<b>6,951.98</b>	<b>1,255.69</b>	<b>22.04</b>

Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Seperti tahun-tahun sebelumnya, PAD merupakan kontributor utama pembentukan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat, bahkan proporsinya terus mengalami peningkatan (Tabel 4.2.). Hal ini menunjukkan bahwa sumber-sumber potensi pendapatan daerah masih cukup besar untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Selain itu, tingginya proporsi PAD juga menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat cukup mampu untuk membiayai pembangunannya secara mandiri.

**Tabel 4.3. PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 s.d 2009**

Tahun	Realisasi PAD	Pendapatan Daerah	Proporsi (%)
<b>2003</b>	<b>2,170,593,640,359.73</b>	<b>3,885,420,919,258.22</b>	<b>55.87</b>
2004	2,846,800,734,938.37	4,712,887,298,214.09	60.40
2005	3,604,767,565,479.84	5,700,026,831,254.93	63.24
2006	3,748,404,050,807.05	5,564,023,660,142.09	67.37
2007	4,249,886,446,800.00	5,569,049,568,751.84	76.31
<b>2008*</b>	<b>4,055,119,336,950.00</b>	<b>6,185,131,593,321.25</b>	<b>65.56</b>
2009*	5,176,292,473,000.00	6,951,984,436,000.00	74.46

Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Keterangan: Tahun 2008 dan 2009 Perda tentang APBD (murni)

### 3. BELANJA DAERAH

Pada APBD Tahun 2009, pos Belanja Daerah Jawa Barat, yang terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung, meningkat cukup tinggi sebesar 36,61% (Rp2,21 triliun) menjadi Rp8,26 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pada komponen Belanja Langsung, yaitu 65,58% (Rp1,14 triliun) menjadi sebesar Rp2,88 triliun. Sementara itu, untuk komponen Belanja Tidak Langsung meningkat 24,94% (Rp1,08 triliun) menjadi sebesar Rp5,39 triliun.

Peningkatan pada pos Belanja Tidak Langsung terutama terjadi pada komponen Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Kedua komponen

tersebut masing-masing meningkat 66,62% (Rp771,24 miliar) dan 13,75% (Rp222,80 miliar). Tingginya peningkatan pada komponen Belanja Bantuan Keuangan antara lain terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi pertanian dan industri manufaktur, dalam mendukung program Desa Membangun. Program Desa Membangun merupakan program yang mensinergikan program yang berbasis desa, antara lain Infrastruktur Pedesaan, GEMAR, GEMPITA, pengembangan inkubator *e-Government* serta *Capacity Building* aparat desa dan kecamatan.

**Tabel 4.4. Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 dan 2009**

No.	Uraian	APBD 2008 (Rp Miliar)	APBD 2009 (Rp Miliar)	Perubahan	
				Rp Miliar	%
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4.313,03</b>	<b>5.388,57</b>	<b>1.075,54</b>	<b>24,94</b>
	a. Belanja Pegawai	892,10	1.083,68	191,58	21,48
	b. Belanja Bunga	0,25	-	-	-
	c. Belanja Subsidi	16,45	16,05	-0,40	-2,43
	d. Belanja Hibah	411,40	100,31	-311,09	-75,62
	e. Belanja Bantuan Sosial	165,07	326,74	161,67	97,94
	f. Belanja Bagi Hasil	1.620,11	1.842,91	222,80	13,75
	g. Belanja Bantuan Keuangan	1.157,65	1.928,89	771,24	66,62
	h. Belanja Tidak Terduga	50,00	90,00	40	80
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.736,99</b>	<b>2.876,10</b>	<b>1.139,11</b>	<b>65,58</b>
	a. Belanja Pegawai	290,33	384,44	94,11	32,41
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.030,52	1.567,90	537,38	52,15
	c. Belanja Modal	416,13	923,77	507,64	121,99
<b>Total Belanja</b>		<b>6.050,02</b>	<b>8.264,67</b>	<b>2.214,65</b>	<b>36,61</b>

Sementara itu, tingginya peningkatan pada pos Belanja Langsung terkait dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80 pada 2015. Sampai dengan tahun 2007, IPM Jawa Barat baru mencapai 70,76. Adapun target IPM pada tahun 2009 adalah sebesar 72,39. Dalam rangka akselerasi pencapaian IPM tersebut, pos belanja akan diprioritaskan kepada bidang pendidikan, dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2009 tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan lanjutan yang belum selesai tahun sebelumnya (*multi years*). Kebijakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan diantaranya melalui perbaikan fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan, serta memperbanyak tenaga medis dan paramedis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Sampai dengan triwulan I-2009, realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai Rp393,40 miliar, atau 4,76% dari total anggaran belanja daerah tahun 2009, atau 40,08% lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja pada triwulan I-2008 (Tabel 4.5.). Realisasi belanja tidak langsung mencapai Rp227,97 miliar, atau 4,23% dari total anggaran belanja tidak langsung tahun 2009. Sementara itu, realisasi belanja langsung, yaitu komponen belanja daerah yang terkait langsung dengan program/kegiatan pembangunan daerah, mencapai Rp165,43 miliar, atau 5,75% dari total anggaran belanja langsung pada tahun 2009. Sebagian

besar realisasi belanja pada triwulan I-2009 digunakan untuk belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji, tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS.

**Tabel 4.5. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Triwulan I – 2009**

No.	Uraian	APBD 2009 (Rp Miliar)	Triwulan I-2009	
			Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi thd APBD
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>5.388,57</b>	<b>227,97</b>	<b>4,23</b>
	a. Belanja Pegawai	1.083,68	158,57	14,63
	b. Belanja Bunga	-	-	-
	c. Belanja Subsidi	16,05	0,78	4,83
	d. Belanja Hibah	100,31	1,97	1,97
	e. Belanja Bantuan Sosial	326,74	23,78	7,28
	f. Belanja Bagi Hasil	1.842,91	42,87	2,33
	g. Belanja Bantuan Keuangan	1.928,89	0,00	0,00
	h. Belanja Tidak Terduga	90,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.876,10</b>	<b>165,43</b>	<b>5,75</b>
	a. Belanja Pegawai	384,44	14,31	3,72
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.567,90	28,45	1,81
	c. Belanja Modal	923,77	0,51	0,06
<b>Total Belanja</b>		<b>8.264,67</b>	<b>393,40</b>	<b>4,76</b>

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat

**Realisasi belanja langsung baru dimulai pada bulan Maret 2009, terutama dengan tambahan dana dari pemerintah pusat untuk belanja infrastruktur dengan total dana sebesar Rp10,2 triliun.** Program stimulus fiskal dari pemerintah pusat tersebut diarahkan untuk dilaksanakan pada bulan Maret atau April 2009. Provinsi Jawa Barat memperoleh stimulus fiskal dari pemerintah pusat sebesar Rp897,20 miliar yang didistribusikan kepada beberapa dinas teknis dengan alokasi anggaran, yaitu (i) Pekerjaan Umum sebesar Rp398,75 miliar, (ii) Menteri Negara Perumahan Rakyat sebesar Rp95,25 miliar, (iii) Dinas Perhubungan sebesar Rp348,50 miliar, (iv) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp39,82 miliar, (v) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp6,00 miliar, serta (vi) Permodalan Nasional Madani sebesar Rp8,87 miliar. Dengan stimulus fiskal dari pemerintah pusat tersebut, Jawa Barat akan terdapat 133.947 lapangan kerja baru.



## BOKS 9.

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2009

Asumsi-asumsi dasar penyusunan APBD tahun anggaran 2009 dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

No.	Indikator	Realisasi 2007	Asumsi 2008	Asumsi 2009
1	a. Jumlah Penduduk	41,48 jt jiwa	42,4 jt jiwa	42,86-42,95 jt jiwa
	b. Laju Pertumbuhan Penduduk	1,83%	1,99%	1,6 – 1,7%
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,41%	6,0 – 6,5%	5,5 – 5,8%
3	Inflasi	5,10%	11,39%	10 – 12%
4	PDRB (harga konstan tahun 2000)	Rp273,99 triliun	Rp293,03 triliun	Rp304,13 triliun – Rp305,77 triliun
5	% penduduk miskin thd total penduduk	13,55%	13,01%	13 – 14%
6	Laju pertumbuhan investasi	15,20%	12 – 14%	6 – 8%
7	% pengangguran	6,27%	8,5 – 9,8%	9 – 10%
8	Investasi total	Rp87,13 triliun	Rp96,57 triliun	Rp97,59 triliun – Rp101,07 triliun

## 1. Kondisi Eksternal

- **Pertama**, harga minyak dunia tahun 2009 diasumsikan 80 dolar AS per barel. Pada kisaran harga tersebut diprediksi Pemerintah akan melakukan penurunan BBM bersubsidi, sebagai akibat kenaikan harga minyak dunia yang sangat drastis dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini. Dengan demikian penurunan harga BBM bersubsidi yang mulai diberlakukan 1 Desember 2008 diharapkan akan membantu memperbaiki kondisi ekonomi nasional termasuk menurunkan inflasi.
- **Kedua**, selain harga BBM, tarif dasar listrik (TDL) sangat signifikan untuk mempengaruhi kondisi perekonomian. Pada tahun 2009, beberapa perusahaan pembangkit listrik bertenaga batubara akan mulai beroperasi. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan menaikkan TDL, namun pemberian insentif dan disinsentif penggunaan listrik akan diperluas penggunaannya.
- **Ketiga**, pada tahun 2009, penerimaan Negara dan hibah diperkirakan mencapai 18,3%-18,6% terhadap PDB, sementara belanja Negara diperkirakan mencapai 20-50% terhadap PDB, sehingga target defisit APBN Tahun 2009 diperkirakan berada pada kisaran 1,0-1,3% dari PDB. Tingkat defisit yang relatif tinggi ini akan mempengaruhi peningkatan kebutuhan pembiayaan, namun memberikan keleluasaan dalam menentukan besarnya pengeluaran pemerintah.
- **Keempat**, nilai tukar Rupiah diasumsikan berada pada kisaran Rp9.400,00 per dolar AS, sedangkan tingkat suku bunga SBI tiga bulan sebesar 7,25-7,75%. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong sektor riil untuk lebih berperan dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi yang akan memperluas lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
- **Kelima**, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 diperkirakan sebesar 6,0% yang dipacu oleh

meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi dan harga ekspor komoditas nonmigas. Keserasian peraturan pusat dan daerah serta peningkatan pengelolaan APBD diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan investasi yang pada saatnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara agregat. Laju inflasi diperkirakan sebesar 6,2%.

- **Keenam**, angka pengangguran terbuka nasional diperkirakan dapat ditekan menjadi sebesar 5,1% dan tingkat kemiskinan turun menjadi sekitar 8,2% pada tahun 2009. Asumsi dasar faktor eksternal di atas belum mengakomodasi krisis ekonomi dunia. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan untuk mengubah asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan, antara lain pertumbuhan ekonomi lebih rendah menjadi 5,5 – 6,1%, inflasi naik menjadi 7%, harga minyak dunia sebesar 85 dolar AS per barel, dan nilai tukar menjadi Rp9.500 per dolar AS.

## 2. Kondisi Internal

- **Pertama**, laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat diperkirakan sebesar 1,6-1,7%. Dengan demikian, jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2009 diperkirakan menjadi 42,86-42,95 juta jiwa.
- **Kedua**, pada tahun 2009 mulai dirintis Program Wajib Belajar 12 Tahun di kabupaten/kota terpilih. Karena itu, pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja daerah disertai bantuan-bantuan program pendidikan lainnya perlu menjadi perhatian Pemda.
- **Ketiga**, Jawa Barat merupakan wilayah endemik untuk penyakit menular tertentu yang bagi Jawa Barat dapat menjadi kejadian luar biasa. Untuk mengatasinya, upaya promotif dan preventif harus menjadi fokus perhatian.
- **Keempat**, pelaksanaan pemilu 2009 perlu didukung oleh ketertiban umum dan penciptaan kondisi yang kondusif. Sehubungan dengan hal tersebut, besaran belanja pada APBD 2009 akan meningkat terutama untuk program pendidikan politik masyarakat dan program pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.
- **Kelima**, terbentuknya Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang baru akan berpengaruh terhadap besaran belanja, terutama Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
- **Keenam**, dalam rangka meningkatkan investasi baik melalui PMA maupun PMDN, anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan untuk menjaga stabilitas politik di Jawa Barat menjadi perhatian pada tahun 2009.
- **Ketujuh**, pada tahun 2009, kondisi perekonomian regional diasumsikan akan mengalami penurunan, antara lain:
  - a. Pada tahun 2009, **pertumbuhan ekonomi** Jawa Barat diprediksikan mengalami perlambatan menjadi sebesar 5,5 – 5,8% dengan nilai PDRB (nilai konstan) sebesar Rp304,13 – 305,77 triliun.
  - b. **Inflasi** Jawa Barat pada tahun 2009 diprediksi sebesar 10 – 12%. Strategi yang akan dilakukan

untuk pengendalian inflasi antara lain melalui penyediaan dana talangan untuk pengadaan gabah dan pupuk, cadangan pangan daerah, dan operasi pasar untuk bahan pokok.

- c. **Penduduk miskin.** Tingkat kemiskinan pada tahun 2009 diperkirakan akan meningkat menjadi 13 – 14%. Strategi yang akan dilakukan adalah mempertahankan daya beli masyarakat melalui pelaksanaan program penanggulangan penduduk miskin seperti BOS Provinsi, beasiswa, bantuan buku murah, GEMAR, dll.
- d. **Pengangguran.** Pada tahun 2009 angka pengangguran diperkirakan akan meningkat menjadi 9 – 10%. Hal ini dilandasi oleh asumsi adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terutama terjadi pada industri yang berbahan baku impor dengan orientasi penjualan ekspor. Strategi yang akan dilakukan untuk menangani pengangguran antara lain melalui program pemberian kerja sementara yang bersifat padat karya, peningkatan kesempatan kerja, serta program desa membangun dan menumbuhkan semangat kemandirian dan berdaya saing melalui budaya masyarakat bekerja.
- e. **Investasi.** Pada tahun 2009, laju pertumbuhan investasi diprediksi berada pada kisaran 6-8% dengan nilai total investasi sebesar Rp97,59 – 101,07 triliun. Strategi yang akan dilakukan untuk menarik investasi antara lain melalui peningkatan promosi terpadu, memberikan kemudahan proses perizinan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), percepatan pembangunan infrastruktur dasar terutama untuk meningkatkan akses jalan ke sentra-sentra produksi dan penyediaan energi, dll.

Sumber: Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

## BAB 5

# PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

**Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional baik tunai maupun non tunai merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan undang-undang.** Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar (*clean money policy*). Sementara itu kebijakan di bidang instrumen pembayaran non tunai tetap diarahkan untuk menyediakan sistem pembayaran yang efektif, efisien, aman dan handal dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

**Pada triwulan I-2009, sistem pembayaran di Jawa Barat mengalami perkembangan yang bervariasi dibandingkan triwulan sebelumnya.** Jumlah aliran uang masuk (*inflow*) ke KBI-KBI di wilayah Jawa Barat, secara total mengalami peningkatan, sebaliknya jumlah aliran uang keluar (*outflow*) secara total mengalami penurunan. Sementara itu, nilai dan volume transaksi pembayaran melalui kliring di wilayah Jawa Barat mengalami penurunan. Nilai dan volume transaksi pembayaran melalui Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), untuk wilayah Jawa Barat, mengalami penurunan.

## 1. PENGEDARAN UANG KARTAL

### 1.1. Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (*Inflow/Outflow*)

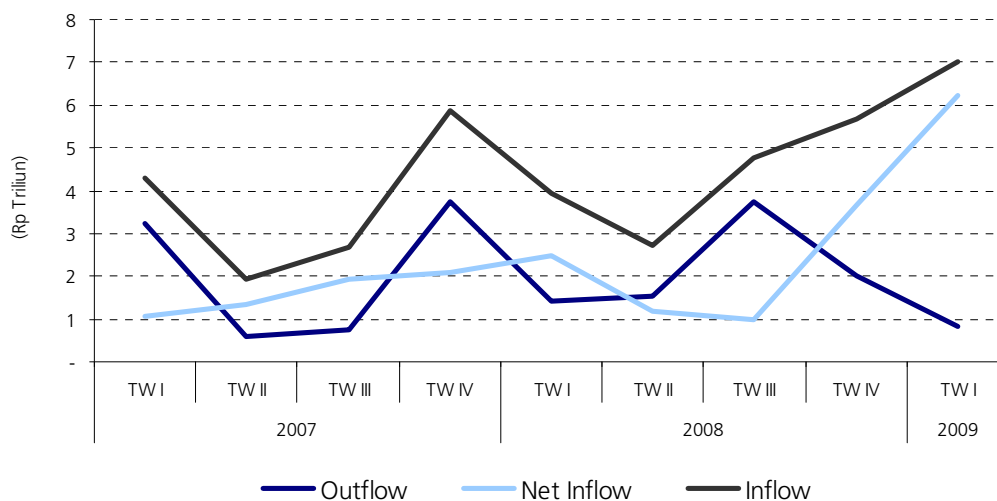
Seperti halnya yang terjadi pada triwulan IV-2008, perkembangan aliran uang kartal pada triwulan I-2009 di wilayah kerja KBI Bandung, Tasikmalaya dan Cirebon tetap mengalami *net inflow*. Artinya jumlah aliran uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*) lebih besar dibandingkan dengan jumlah aliran uang kartal yang keluar ke masyarakat (*outflow*). Pada triwulan I-2009, *inflow* di KBI wilayah Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 23,57% (qtq) atau 78,53% (yoy) menjadi Rp7,02 triliun, sementara *outflow* di KBI wilayah Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 60,08% (qtq) atau 43,35% (yoy) menjadi Rp0,81 triliun (Grafik 5.1). Peningkatan *inflow* yang cukup signifikan diperkirakan merupakan cerminan dari meningkatnya transaksi uang kartal di Jawa Barat terkait dengan belanja Pemilu Legislatif 2009. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu sentra produksi kaos di Indonesia, sehingga sebagian besar belanja kaos untuk Pemilu 2009 dilakukan di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Hal ini tercermin dari peningkatan *inflow* di KBI Bandung yang sangat signifikan.

Peningkatan *inflow* di KBI wilayah Jawa Barat pada triwulan I-2009 disebabkan oleh peningkatan *inflow* di KBI Bandung sebesar 4,87% (qtq) menjadi Rp5,28 triliun; dan peningkatan *inflow* di KBI Cirebon sebesar 320,17% (qtq) menjadi Rp1,50 triliun. Sebaliknya *inflow* di KBI Tasikmalaya pada triwulan I-2009, mengalami penurunan sebesar 17,31% (qtq) menjadi Rp0,24 triliun. Penurunan *outflow* di KBI wilayah Jawa Barat pada triwulan I-2009 disebabkan oleh penurunan *outflow* di KBI Bandung sebesar 72,05% (qtq) menjadi Rp0,48 triliun; di KBI Cirebon turun sebesar 9,72% (qtq) menjadi Rp0,26 triliun; namun di KBI Tasikmalaya naik sebesar 221,50% (qtq) menjadi Rp0,07 triliun.

**Pada triwulan I-2009, kegiatan transaksi sistem pembayaran tunai di Jawa Barat masih didominasi transaksi di wilayah kerja KBI Bandung, dengan *net inflow* sebesar Rp4,80 triliun.**

Sedangkan *net inflow* di wilayah kerja KBI Tasikmalaya dan KBI Cirebon pada triwulan I-2009, masing-masing adalah sebesar Rp0,17 triliun dan Rp1,24 triliun.

**Grafik 5.1. Perkembangan *Inflow* dan *Outflow* Uang Kartal Di Jawa Barat**



Sumber: KBI Bandung, KBI Tasikmalaya & KBI Cirebon

Selama triwulan I-2009, uang kertas yang keluar dari KBI Bandung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun demikian uang logam mengalami peningkatan (Tabel 5.1). Secara nominal, uang kertas yang keluar dari KBI Bandung selama triwulan I-2009 adalah sebesar Rp488,045 miliar atau turun 71,58% (qtq), sedangkan uang logam yang keluar mencapai Rp281,72 juta atau naik 285,65% (qtq). Sementara itu, jumlah bilyet uang kertas yang keluar mencapai 14,01 juta bilyet atau turun 60,08% (qtq), serta uang logam mencapai 0,82 juta keping atau naik 48,84% (qtq).

**Tabel 5.1. Perkembangan *Outflow* Uang Kertas dan Uang Logam melalui KBI Bandung**

Jenis Pecahan	Tw. IV-2008		Tw. I-2009		Pertumbuhan (qtq)	
	Nominal (Rp Juta)	Bilyet/Keping (Juta)	Nominal (Rp Juta)	Bilyet/Keping (Juta)	Nominal	Bilyet/Keping
<b>Uang Kertas</b>						
100.000	687.927,30	6,88	273.001,40	2,73	-60,32%	-60,32%
50.000	992.680,55	19,85	175.868,60	3,52	-82,28%	-82,28%
20.000	8.662,68	0,43	15.700,90	0,79	81,25%	81,25%
10.000	9.064,87	0,91	8.571,70	0,86	-5,44%	-5,44%
5.000	14.592,12	2,92	10.972,11	2,19	-24,81%	-24,81%
1.000	4.117,61	4,12	3.930,42	3,93	-4,55%	-4,55%
<b>Total</b>	<b>1.717.045,13</b>	<b>35,11</b>	<b>488.045,13</b>	<b>14,01</b>	<b>-71,58%</b>	<b>-60,08%</b>
<b>Uang Logam</b>						
1.000	-	-	176,00	0,18	n/a	n/a
500	46,50	0,09	24,12	0,05	(0,48)	(0,48)
200	4,80	0,02	54,30	0,27	10,31	10,31
100	0,03	0,00	22,00	0,22	732,33	732,33
50	21,70	0,43	5,30	0,11	(0,76)	(0,76)
25	0,02	0,00	-	-	(1,00)	(1,00)
<b>Total</b>	<b>73,05</b>	<b>0,55</b>	<b>281,72</b>	<b>0,82</b>	<b>285,65%</b>	<b>48,84%</b>

Sumber: KBI Bandung

## 1.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Bank Indonesia secara berkesinambungan melakukan pemusnahan atau kegiatan pemberian tanda tidak berharga (PTTB) terhadap uang kartal yang sudah tidak layak edar (lusuh/rusak) sebagai upaya untuk memelihara kualitas uang kartal yang diedarkan di masyarakat (*clean money policy*).

Selama triwulan I-2009, KBI Bandung melakukan pemusnahan uang kertas sebanyak 69,40 juta lembar atau turun 16,99% (qtq) (Grafik 5.2). Berdasarkan jumlah lembar yang dimusnahkan, yang paling banyak adalah pecahan Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, dan Rp20.000 masing-masing sebesar 60,09%, 21,57%, 10,84%, dan 5,05%. Sementara itu, KBI Tasikmalaya melakukan pemusnahan uang kertas sebanyak 11,02 juta lembar atau turun 12,95% (qtq), dan KBI Cirebon melakukan pemusnahan uang kertas sebanyak 37,82 juta lembar atau naik 10,22% (qtq).

**Grafik 5.2. Perkembangan PTTB Kantor Bank Indonesia Bandung**



Sumber: KBI Bandung

## 1.3. Uang Palsu

Selama triwulan I-2009, KBI Bandung telah menemukan uang rupiah palsu di wilayah kerjanya sebanyak 1.967 lembar atau turun 1.071 lembar dibandingkan triwulan sebelumnya. Pecahan uang palsu yang paling banyak ditemukan selama triwulan I-2009, adalah uang kertas pecahan Rp50.000 yaitu sebanyak 58,30% dari total lembar uang palsu yang ditemukan. Penurunan jumlah uang palsu yang ditemukan di KBI Bandung pada triwulan I-2009, dapat menjadi indikator semakin baiknya pemahaman masyarakat terhadap ciri-ciri keaslian uang.

Meskipun demikian, KBI Bandung terus berupaya menekan perkembangan peredaran uang palsu, diantaranya melalui sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada semua lapisan masyarakat, menyediakan sarana informasi *hotline service*, serta iklan layanan masyarakat.

## 2. SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

### 2.1 Kliring lokal

Pada triwulan I-2009, transaksi sistem pembayaran non tunai melalui kliring di wilayah Jawa Barat, secara volume mengalami peningkatan namun secara nominal turun dibandingkan triwulan sebelumnya. Rata-rata nominal transaksi kliring per bulan pada triwulan I-2009, adalah sebesar Rp9,94 triliun atau turun 9,00% (qtq), namun secara tahunan masih tetap tumbuh 3,53% (yoy). Sementara itu, rata-rata volume transaksi kliring per bulan pada triwulan I-2009, adalah sebanyak 504.311 warkat, meningkat sebesar 5,12% (qtq) namun turun secara tahunan 0,38% (yoy) (Tabel 5.2).

Tabel 5.2. Perkembangan Transaksi Kliring Lokal Rata-rata per Bulan di Jawa Barat

Keterangan	2008				2009	Pertumbuhan (%)	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	qtq	yoy
Nominal (Rp Triliun)	9,60	10,23	11,48	10,93	9,94	-9,00	3,53
Volume (Lembar)	506.234	516.866	544.327	479.764	504.311	5,12	-0,38

Sumber: Website BI

### 2.2 Real Time Gross Settlement (RTGS)

Transaksi RTGS masih mendominasi sistem pembayaran non tunai di Jawa Barat. Hal ini disebabkan BI RTGS mempunyai keunggulan dalam kecepatan penyelesaian transaksi (seketika) dan risiko penyelesaian transaksi yang dapat diperkecil. Perkembangan penyelesaian rata-rata nominal dan volume transaksi RTGS per bulan (dari dan ke Jawa Barat), selama triwulan I-2009, mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Selama triwulan I-2009, rata-rata nominal transaksi RTGS per bulan adalah sebesar Rp43,52 triliun atau turun 16,46% (qtq), dan rata-rata volume transaksi RTGS per bulan adalah sebanyak 62.954 transaksi atau turun 13,13% (qtq) (Tabel 5.4). Total nominal dan volume transaksi RTGS pada triwulan I-2009, masing-masing sebesar Rp130,57 triliun dan 188.863 transaksi.

Tabel 5.3. Perkembangan Transaksi RTGS di Jawa Barat

Bulan	From		To		From + To	
	Nominal (Triliun Rp)	Volume	Nominal (Triliun Rp)	Volume	Nominal (Triliun Rp)	Volume
April	21,09	31.987	27,76	33.748	48,85	65.735
Mei	19,99	29.410	25,23	30.581	45,22	59.991
Juni	21,40	30.612	28,33	32.131	49,72	62.743
<b>Rata2 Tw II-08</b>	<b>20,83</b>	<b>30.670</b>	<b>27,10</b>	<b>32.153</b>	<b>47,93</b>	<b>62.823</b>
Juli	18,57	17.863	22,85	22.783	41,42	40.646
Agustus	17,03	24.448	24,69	26.711	41,73	51.159
September	23,42	30.286	33,87	42.343	57,29	72.629
<b>Rata2 Tw III-08</b>	<b>19,67</b>	<b>24.199</b>	<b>27,14</b>	<b>30.612</b>	<b>46,81</b>	<b>54.811</b>
Oktober	22,58	30.134	29,15	34.648	51,73	64.782
November	19,92	31.860	26,86	36.797	46,78	68.657
Desember	23,59	38.451	34,20	45.509	57,79	83.960
<b>Rata2 Tw IV-08</b>	<b>22,03</b>	<b>33.482</b>	<b>30,07</b>	<b>38.985</b>	<b>52,10</b>	<b>72.466</b>
Januari	17,58	25.993	24,19	33.736	41,77	59.729
Februari	18,33	29.266	22,77	34.240	41,10	63.506
Maret	18,73	31.282	28,97	34.346	47,70	65.628
<b>Rata2 Tw I-09</b>	<b>18,21</b>	<b>28.847</b>	<b>25,31</b>	<b>34.107</b>	<b>43,52</b>	<b>62.954</b>
Pertumbuhan	-17,32%	-13,84%	-15,83%	-12,51%	-16,46%	-13,13%

Sumber: Website BI



## BAB 6

# PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH

**Krisis keuangan global yang terjadi sejak akhir tahun 2008 diperkirakan sudah mulai berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat pada triwulan I-2009.**

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, sampai dengan akhir bulan Maret 2009 tercatat sekitar 18.000 tenaga kerja di Jawa Barat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan tidak mampu beroperasi akibat menurunnya pesanan pembeli, khususnya dari pasar luar negeri.

**Turunnya kondisi ketenagakerjaan di sektor industri pengolahan tercermin pula dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan I-2009.**

Hasil survei menginformasikan bahwa terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan pada triwulan I-2009 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan jumlah tenaga kerja juga terjadi di sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

**Berbeda dengan kondisi ketenagakerjaan yang menurun, salah satu indikator kesejahteraan, yaitu nilai tukar petani (NTP) Jawa Barat pada triwulan I-2009 cenderung mengalami peningkatan.**

NTP Jawa Barat, yang merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani terus mengalami peningkatan sejak Oktober 2008 sampai dengan triwulan I-2009. Peningkatan tersebut terjadi hampir di seluruh subsektor pertanian, kecuali di subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat.

## **1. KETENAGAKERJAAN**

### **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**

**Krisis keuangan global yang terjadi sejak akhir tahun 2008 telah berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat.** Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, sampai dengan akhir triwulan I-2009, sekitar 18.000 tenaga kerja di Jawa Barat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagian besar PHK (95%) terjadi di perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), dan sisanya dari industri manufaktur lainnya, tersebar merata di hampir semua sentra industri di Jawa Barat seperti Bandung, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, Depok, dan Bekasi. Berdasarkan informasi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat, perumahan tenaga kerja di industri TPT hanya terjadi pada industri hulu, meliputi industri pemintalan, perajutan, dan pertenunan akibat turunnya permintaan ekspor. Sementara itu, PHK maupun perumahan tenaga kerja belum terjadi pada industri garmen.

**Beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat sudah menginformasikan terjadinya PHK di beberapa industri di wilayahnya.** Menurut informasi resmi dari Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kota Cimahi, pada awal tahun 2009 sudah ada 7 perusahaan, dari total 390 perusahaan, yang merumahkan sebagian karyawannya akibat krisis keuangan global yang menyebabkan ketidakmampuan perusahaan untuk menanggung beban operasional perusahaan.

Jumlah karyawan yang dirumahkan tersebut diperkirakan sekitar 869 orang. Kondisi ini menambah jumlah pengangguran di Kota Cimahi yang pada Desember 2008 mencapai 41.463 orang atau sekitar 7,2% dari total jumlah penduduk Kota Cimahi yang mencapai 579.802 orang. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung mencatat, sampai dengan Januari 2009 ada sebanyak 3.000 buruh di wilayah Kabupaten Bandung terkena PHK dan dirumahkan.

**Meningkatnya angka PHK antara lain juga tercermin dari peningkatan pembayaran jaminan hari tua (JHT) yang dilakukan PT. Jamsostek.** Sampai dengan triwulan I-2009, PT. Jamsostek telah membayarkan JHT sekitar Rp2 triliun untuk sekitar 400.000 tenaga kerja peserta Jamsostek. Menurut data dari PT. Jamsostek Kanwil IV Jabar-Banten, pada awal tahun 2009 ini terjadi peningkatan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) karena berhenti bekerja menjadi rata-rata 300 sampai 400 orang per hari, dari sebelumnya yang hanya 100 orang per hari. Namun demikian, kondisi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh PHK akibat krisis keuangan global, tetapi juga karena alasan lain, seperti perpindahan karyawan ke perusahaan lain atau karena adanya karyawan yang pensiun. Sebagian besar karyawan yang mencairkan JHT tersebut berasal dari perusahaan TPT, kulit dan elektronika. Sampai dengan akhir 2009, diperkirakan pencairan JHT akan meningkat sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya.

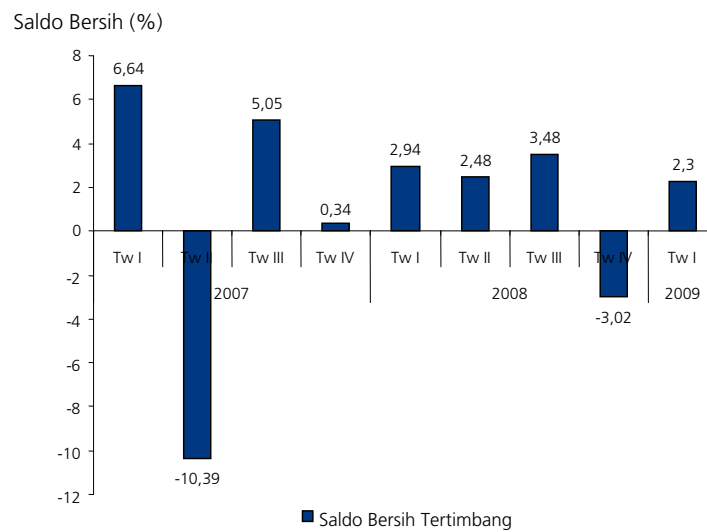
**Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada triwulan I-2009 yang dilakukan oleh KBI Bandung juga menunjukkan terjadinya penurunan tenaga kerja di sektor industri pengolahan.** Sektor lainnya yang mengindikasikan adanya penurunan jumlah tenaga kerja adalah sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR); dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Namun demikian, secara keseluruhan hasil survei menunjukkan bahwa penggunaan tenaga kerja di Jawa Barat masih mengalami peningkatan, terutama di sektor pertambangan, pertanian, jasa-jasa, dan keuangan. Peningkatan penggunaan tenaga kerja di sektor pertanian antara lain terkait dengan musim panen yang mulai terjadi sejak akhir triwulan I-2009.

**Tabel 6.1. Saldo Bersih Tertimbang Penggunaan Tenaga Kerja di Jawa Barat Triwulan I-2009**

No.	Sektor	SBT
1	Pertanian	1.06
2	Pertambangan	3.49
3	Industri Pengolahan	(1.59)
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	(0.53)
5	Bangunan	(0.94)
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	(0.58)
7	Pengangkutan dan Komunikasi	(0.43)
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Keuangan	0.10
9	Jasa-jasa	1.72
	<b>Total Seluruh Sektor</b>	<b>2.30</b>

Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) KBI Bandung

**Grafik 6.1. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Triwulanan di Jawa Barat**



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) KBI Bandung

Dalam rangka meminimalisir dampak krisis keuangan global terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat, Disnakertrans telah mempersiapkan beberapa program yang ditargetkan dapat menyerap sekitar 96.000 tenaga kerja pada tahun 2009. Program-program tersebut diantaranya adalah Pemuda Mandiri Pencipta Lapangan Kerja di pedesaan. Untuk tahap pertama, Disnakertrans menargetkan sekitar 6.000 orang untuk menjadi pemuda wirausaha. Peserta program akan mendapatkan pelatihan atau pendidikan kewirausahaan, yang kemudian diharapkan nantinya dapat menularkan kemampuan kewirausahaannya pada rekan-rekannya.

Program lainnya adalah Padat Karya Produktif Berkelanjutan (PKPB) yang merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota. Program ini ditujukan kepada upaya untuk pengembangan perekonomian terutama di sektor pedesaan yang melibatkan para pemuda maupun kalangan wanita yang tergabung dalam suatu kelompok maupun koperasi. Hingga akhir tahun 2008, program ini telah menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja, dan diharapkan pada tahun 2009, dapat menyerap sekitar 86.000 tenaga kerja di Jawa Barat. Dana untuk program PKPB di Jabar berasal dari Pemerintah Pusat yang besarnya Rp4–6 miliar per kabupaten/kota. Selain itu, dalam upaya menciptakan lapangan kerja, Disnakertrans juga akan terus mengembangkan balai latihan kerja (BLK) yang sudah ada di beberapa wilayah di Jawa Barat. Saat ini ada sekitar 16 BLK yang tersebar di kota/kabupaten di Jabar. Keberadaan BLK sangat diperlukan untuk membuka lapangan pekerjaan, terutama bagi para pemuda pemudi.

### Penanggulangan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Perusahaan yang mengajukan penanggulangan UMK di Jawa Barat pada tahun 2009 meningkat dibandingkan tahun 2008. Pengajuan datang dari berbagai daerah dan bergelut di berbagai bidang industri. Pada tahun 2008, menurut catatan Disnakertrans Jabar sekitar 50 perusahaan mengajukan

penanggungan. Pada tahun ini, jumlah perusahaan yang mengajukan penanggungan mengalami peningkatan menjadi 81 perusahaan, namun hanya 69 perusahaan yang pengajuannya disetujui oleh Gubernur Jawa Barat. Adapun lokasi perusahaan tersebar di berbagai daerah industri seperti Kabupaten Bandung, Purwakarta, Karawang, Bogor, dan Kota Bekasi.

**Namun demikian, apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan yang ada di Jawa Barat, jumlah perusahaan yang mengajukan penanggungan UMK hanya sebagian kecil.**

Dari 6.000 perusahaan yang masuk dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, hanya 81 perusahaan yang mengajukan permohonan penanggungan. Artinya, sebagian besar perusahaan masih bisa menerima kebijakan kenaikan UMK tersebut. Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar pada 2009 ditetapkan sebesar Rp628.191,15 per bulan, atau naik 10,56% dibandingkan UMP tahun 2008 yang sebesar Rp568.193,00 per bulan. UMK di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat untuk tahun 2009, besarnya harus di atas UMP.

**Pengajuan penanggungan UMK tersebut disebabkan belum stabilnya kinerja perusahaan.** Hal ini merupakan dampak dari menurunnya kemampuan produksi perusahaan yang dipengaruhi menurunnya permintaan serta tingginya biaya produksi yang ditanggung oleh perusahaan, terkait dengan krisis ekonomi global. Persyaratan utama bagi perusahaan yang mengajukan penanggungan UMK adalah laporan masalah kemunduran keuangan serta persetujuan dari serikat pekerja di perusahaan tersebut.

**Tabel 6.2. Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2009**

No.	Kab/Kota	UMK 2009 (Rp)	Kenaikan (%)
1	Kota Bekasi	1.089.000	10,00
2	Kab. Bekasi	1.084.140	10,63
3	Kota Depok	1.078.000	12,00
4	Kab. Karawang	1.058.181	16,00
5	Kota Bandung	1.044.630	11,25
6	Kota Cimahi	1.019.000	11,87
7	Kab. Bandung Barat	1.011.054	12,84
8	Kab. Bandung	1.000.950	11,72
9	Kab. Sumedang	995.000	12,30
10	Kab. Bogor	991.714	13,57
11	Kota Bogor	893.412	7,64
12	Kab. Purwakarta	839.300	10,00
13	Kota Sukabumi	770.000	10,00
14	Kab. Indramayu	769.500	10,56
15	Kota Cirebon	765.000	12,17
16	Kab. Cirebon	746.000	12,86
17	Kota Tasikmalaya	705.000	11,46
18	Kab. Tasikmalaya	700.000	12,63
19	Kab. Majalengka	680.000	12,40
20	Kab. Cianjur	677.600	10,00
21	Kab. Subang	670.000	6,35
22	Kab. Garut	660.000	12,15
23	Kab. Ciamis	636.195	11,00
24	Kab. Kuningan	634.500	10,93
25	Kota Banjar	633.500	11,14
26	Kab. Sukabumi	630.000	10,24
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>628.191</b>	<b>10,56</b>

## 2. KESEJAHTERAAN

### Kesejahteraan Petani

Dimulainya musim panen pada pertengahan triwulan I-2009 telah mendorong perbaikan tingkat kesejahteraan petani di Jawa Barat. Masa panen pada triwulan I ini telah mendorong peningkatan pendapatan petani. Membaiknya kondisi kesejahteraan petani di Jawa Barat antara lain tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP), yang merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Jawa Barat terhadap perkembangan harga-harga di pedesaan di 16 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, NTP pada bulan Februari 2009 mencapai 97,33, meningkat dibandingkan angka NTP pada November 2008 yang sebesar 96,08, atau naik 1,30%.

**Tabel 6.3. Nilai Tukar Petani di Jawa Barat  
Bulan September dan Desember 2008 (2007 = 100)**

No.	Sektor, Kelompok, & Subkelompok	Nov'08	Feb'09	% Perubahan (qtq)
<b>1</b>	<b>INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI</b>	<b>113.14</b>	<b>117.18</b>	<b>3.57</b>
<b>2</b>	<b>INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI</b>	<b>117.76</b>	<b>120.39</b>	<b>2.23</b>
	<b>2.1. KONSUMSI RUMAH TANGGA</b>	<b>118.80</b>	<b>122.11</b>	<b>2.79</b>
	2.1.1. Bahan Makanan	120.20	124.14	3.28
	2.1.2. Makanan Jadi	113.47	117.19	3.28
	2.1.3. Perumahan	126.47	131.23	3.76
	2.1.4. Sandang	112.13	114.89	2.46
	2.1.5. Kesehatan	110.61	114.28	3.32
	2.1.6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	111.89	112.86	0.87
	2.1.7. Transportasi dan Komunikasi	118.39	112.79	-4.73
	<b>2.2. BIAYA PRODUKSI DAN PENAMBAHAN MODAL</b>	<b>114.00</b>	<b>115.28</b>	<b>1.12</b>
	2.2.1. Bibit	111.93	114.03	1.88
	2.2.2. Obat-obatan dan Pupuk	111.13	111.73	0.54
	2.2.3. sewa Lahan, Pajak dan Lainnya	108.92	112.24	3.05
	2.2.4. Transportasi	118.40	113.44	-4.19
	2.2.5. Penambahan Barang Modal	115.32	117.90	2.24
	2.2.6. Upah Buruh Tani	114.42	116.78	2.06
<b>3</b>	<b>NILAI TUKAR PETANI</b>	<b>96.08</b>	<b>97.33</b>	<b>1.30</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

**Peningkatan NTP ini terjadi karena kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB).** IT, yang menunjukkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani, mengalami peningkatan sebesar 3,57%, yaitu dari 113,14 pada November 2008 menjadi 117,18 pada Februari 2009. Sedangkan IB, yang menunjukkan fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian, mengalami kenaikan sebesar 2,23%. Kenaikan IB ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan biaya berbagai kebutuhan pokok petani, yang meningkat sebesar 2,79%, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada

subkelompok perumahan (meningkat 3,76%), diikuti oleh biaya kesehatan (3,32%), bahan makanan dan makanan jadi (3,28%). Sementara itu, komponen IB lainnya, yaitu biaya produksi dan penambahan modal mengalami peningkatan sebesar 1,12%, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada subkelompok sewa lahan, pajak dan lainnya, yang mencapai 3,05%.

**Dari lima subsektor yang diamati, kenaikan NTP terjadi pada subsektor Hortikultura dan Perikanan.** Sementara itu, NTP di tiga subsektor lainnya, yaitu subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Peternakan mengalami penurunan. Penurunan NTP tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, diikuti oleh subsektor peternakan, dan tanaman pangan. Penurunan IT pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang sebesar -2,19% terkait dengan kecenderungan semakin menurunnya harga komoditas perkebunan di pasar internasional. Komoditas perkebunan utama Jawa Barat yang mengalami penurunan harga diantaranya adalah karet. Permintaan karet alam yang makin menurun, menyusul pelemahan kinerja sejumlah perusahaan otomotif di Amerika Serikat dan Jepang, menyebabkan harga karet alam turun ke level terendah dalam 2 bulan terakhir di bursa komoditas Tokyo.

**Tabel 6.4. Nilai Tukar Petani per Subsektor di Jawa Barat Bulan November 2008 dan Februari 2009 (2007 = 100)**

No.	SubSektor	Nov '08	Feb '09	Persentase Perubahan
1	Tanaman Pangan	93.28	92.58	(0.75)
2	Hortikultura	93.52	101.70	8.75
3	Tanaman Perkebunan Rakyat	105.72	103.40	(2.19)
4	Peternakan	99.23	97.54	(1.70)
5	Perikanan	105.37	108.46	2.93
<b>6</b>	<b>Gabungan/Provinsi</b>	<b>96.08</b>	<b>97.33</b>	<b>1.30</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

**Sebagian besar provinsi di pulau Jawa mengalami penurunan tingkat kesejahteraan petaninya, kecuali di Provinsi Jawa Barat dan Banten.** Tiga provinsi lainnya, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan D.I. Yogyakarta mengalami penurunan NTP, dengan penurunan masing-masing sebesar 3,22%, 0,44%, dan 0,27%. Akibat penurunan tersebut, hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa memiliki NTP dibawah 100, yang menandakan bahwa tingkat kesejahteraan petaninya masih rendah, karena pendapatan yang diterima petani masih lebih kecil dibandingkan biaya kebutuhan hidup dan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani.

**Tabel 6.5. Perbandingan NTP di 5 Provinsi di Pulau Jawa Bulan November 2008 dan Februari 2009 (2007 = 100)**

No.	Provinsi	Nov '08	Feb '09	Persentase Perubahan
1	Jawa Barat	96.08	97.33	1.30
2	Jawa Tengah	101.65	98.38	-3.22
3	D.I. Yogyakarta	105.71	105.42	-0.27
4	Jawa Timur	96.95	96.52	-0.44
5	Banten	96.21	96.66	0.47

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

## BAB 7

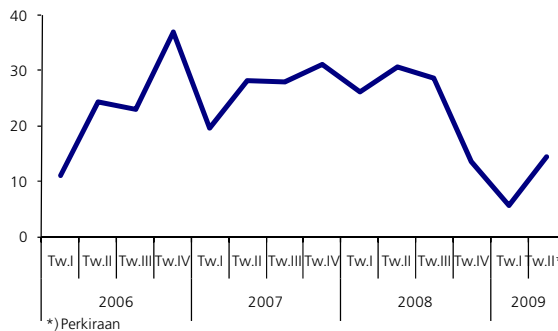
# PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH



## 1. PROSPEK EKONOMI MAKRO

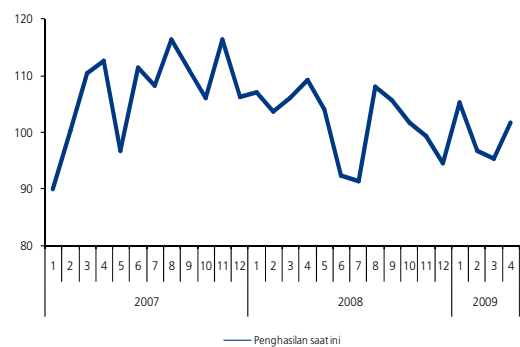
**Perekonomian Jawa Barat pada triwulan II-2009 diperkirakan tumbuh relatif sama dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya.** Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diperkirakan berada pada kisaran 3,6%-4,4% (yoy) pada triwulan II-2009, tidak jauh berbeda dengan level pertumbuhan Jawa Barat pada triwulan I-2009, yang diperkirakan sebesar 4,1%. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2009 adalah perkembangan ekspektasi kegiatan dunia usaha, dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha di Jawa Barat.

**Grafik 7.1. Ekspektasi Kegiatan Dunia Usaha**



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), KBI Bandung.

**Grafik 7.2. Indikator Penghasilan Saat Ini**



Sumber: Survei Konsumen di Kota Bandung, KBI Bandung.

**Di sisi permintaan, pertumbuhan masih didorong oleh pertumbuhan konsumsi swasta dan investasi.** Pertumbuhan konsumsi swasta di Jawa Barat pada triwulan II-2009 diperkirakan membaik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Salah satu pemicu peningkatan konsumsi rumah tangga ini adalah dampak Pemilu Legislatif pada awal triwulan I-2009 serta masa persiapan menjelang Pemilu Presiden pada awal triwulan III-2009. Pengeluaran belanja kampanye yang telah dilakukan partai dan calon legislatif pada triwulan I-2009 akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang kemudian mendorong konsumsi swasta untuk dibelanjakan pada triwulan II-2009. Selain itu, kenaikan gaji pokok para Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan Polri sebesar 15% juga akan mendorong konsumsi. Kenaikan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2009, namun pembayaran kenaikan 3 bulan gaji Januari s.d. Maret 2009 baru akan dibayarkan mulai 1 April 2009. Kenaikan penghasilan tersebut juga diakui para responden Survei Konsumen April 2009. Sumber peningkatan pendapatan lainnya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mulai dicairkan pada bulan April 2009 di Jawa Barat. Selain konsumsi, investasi juga diperkirakan mulai mengalami peningkatan, sebagai respons positif investor atas pelaksanaan Pemilu Legislatif yang relatif aman. Di sisi lain, kinerja ekspor diperkirakan masih mengalami penurunan, karena kondisi perekonomian global relatif belum membaik. Selain itu, tendensi proteksi pasar domestik yang dilakukan oleh sejumlah negara diperkirakan turut memperlemah kinerja ekspor pada triwulan II-2009.

**Respons di sisi penawaran ditandai dengan perlambatan pada sektor dominan di Jawa Barat.** Pertumbuhan sektor industri pengolahan di Jawa Barat pada triwulan II-2009 diperkirakan masih mengalami perlambatan, ditandai dengan masih relatif kecilnya aktivitas ekspor-impor terkait

sektor tersebut, serta masih lesunya aktivitas produksi. Selain akibat belum pulihnya pasar luar negeri, perlambatan di industri TPT juga dipengaruhi oleh penurunan pesanan pasca masa kampanye Pemilu Legislatif. Kinerja industri kendaraan bermotor juga diperkirakan masih lemah, karena harga kendaraan meningkat akibat pelemahan kurs rupiah. Sementara itu, sektor pertanian diperkirakan mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya. Tahun ini masa panen raya padi di Jawa Barat diperkirakan mencapai puncaknya pada triwulan II-2009, berbeda dengan masa puncak panen di tahun 2008 yang terjadi pada triwulan I.

## 2. PRAKIRAAN INFLASI

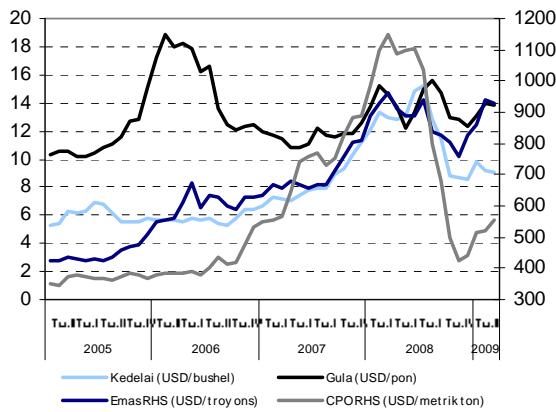
**Laju inflasi tahunan Jawa Barat pada triwulan II diperkirakan akan mengalami perlambatan yang signifikan dibandingkan triwulan I-2009, yakni dari 7,45% (yoy) menjadi berkisar antara 3,6% hingga 4,6%.** Penurunan laju inflasi tersebut terutama akibat telah redanya pengaruh eksternal yang cukup tinggi pada triwulan II-2008 telah hilang (*baseline effect*). Sementara itu, inflasi triwulanan diproyeksikan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni dari 0% (qtoq) menjadi antara 0,55% hingga 1,05%. Peningkatan terutama akan terjadi pada bulan Juni 2009 akibat tekanan eksternal, pasokan bahan makanan yang menurun karena telah berlalunya panen raya padi, serta penyelenggaraan PEMILU Presiden pada bulan Juli 2009.

### Faktor Fundamental

**Secara tahunan, tekanan inflasi yang berasal dari faktor fundamental diperkirakan berkurang.** Harga komoditas strategis di pasar internasional serta inflasi negara mitra dagang utama diperkirakan menurun dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (Grafik 7.3). Selain itu, tekanan permintaan Jawa Barat melemah akibat penurunan kinerja ekspor. Ekspektasi inflasi masyarakat pun mengalami penurunan setelah kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2008 (Grafik 7.4).

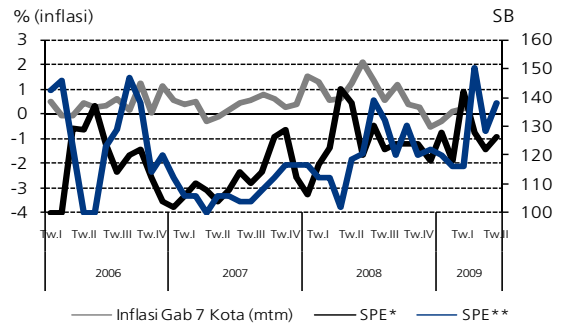
**Namun demikian, inflasi triwulanan akan meningkat terutama dari sisi eksternal dan permintaan.** Harga minyak bumi, tembaga, dan kedelai diperkirakan akan meningkat, sedangkan emas, gas bumi, nikel dan gandum dapat mengalami penurunan (Reuters, April 2009). Namun demikian, laju kenaikan harga komoditas-komoditas tersebut diperkirakan masih lebih lambat dibandingkan dengan triwulan I-2009. Sementara itu, ekspektasi inflasi pedagang eceran responden SPE menurun sebagaimana tercermin dari penurunan indeks SB ekspektasi inflasi dari 142 pada akhir triwulan I-2009 menjadi 126,5 pada akhir triwulan II-2009 (Grafik 7.4). Dari sisi interaksi permintaan dan penawaran, sejalan dengan prospek perekonomian Jawa Barat triwulan II-2009, permintaan diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya karena realisasi BLT serta kenaikan gaji pokok PNS, anggota TNI dan Polri.

**Grafik 7.3. Perkembangan Harga Komoditas Strategis di Pasar Internasional**



Sumber: Bloomberg, diolah

**Grafik 7.4. Ekspektasi Pedagang Eceran Terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Bandung**



Sumber: SPE-KBI Bandung; BPS Provinsi Jawa Barat.

Keterangan: SPE\*=Ekspektasi pedagang terhadap harga pada bulan tsb. menurut SPE pada 3 bulan sebelumnya; SPE\*\*=Ekspektasi pedagang terhadap harga pada bulan tsb. menurut SPE 6 bulan sebelumnya;

### Faktor Non Fundamental

**Hilangnya pengaruh kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2008 menyebabkan laju inflasi tahunan menurun drastis.** Pelemahan tekanan inflasi tahunan yang cukup dalam didukung pula oleh persediaan beras yang meningkat pada triwulan II-2009 (puncak panen raya).

**Faktor non fundamental khususnya komoditas dengan harga yang bergejolak (*volatile foods*) berpotensi memberikan tekanan inflasi triwulanan Jawa Barat.** Meskipun puncak musim panen raya padi diperkirakan akan terjadi pada triwulan II-2009, beberapa komoditas bahan makanan berpotensi mengalami peningkatan harga, seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah. Sementara itu, harga komoditas yang diatur oleh pemerintah (*administered price*) diperkirakan akan tetap stabil.

# LAMPIRAN

## 1. EKONOMI MAKRO

**Tabel 1.A. Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Menurut Sektor Ekonomi (Miliar Rupiah)**

SEKTOR EKONOMI	2008				2009
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I*)
Pertanian	11.012	8.227	9.050	8.100	10.307
Pertambangan dan Penggalian	1.532	1.530	1.730	1.720	1.753
Industri Pengolahan	30.932	33.487	34.260	35.080	33.460
Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.515	1.476	1.495	1.540	1.567
Bangunan	2.242	2.269	2.618	2.600	2.432
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	13.368	14.038	14.824	14.710	13.670
Pengangkutan dan Komunikasi	2.932	3.050	3.155	3.100	3.071
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2.087	2.255	2.425	2.310	2.233
Jasa-jasa	4.688	4.679	4.822	4.870	4.706
<b>PDRB</b>	<b>70.310</b>	<b>71.012</b>	<b>74.380</b>	<b>74.020</b>	<b>73.200</b>

\*) Proyeksi KBI Bandung

**Tabel 1.B. Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Menurut Jenis Penggunaan (Miliar Rupiah)**

SEKTOR EKONOMI	2008				2009
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV*)	Tw.I*)
Konsumsi Rumah Tangga	46.112	45.930	47.730	48.000	48.378
Konsumsi Pemerintah	3.279	4.110	4.710	6.190	3.518
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	12.404	12.590	13.280	13.460	12.979
Perubahan Inventori	1.819	1.830	1.900	1.860	1.860
Deskrepansi Statistik	1.593	1.212	(609)	1.150	
Ekspor barang dan jasa	30.790	29.280	29.180	28.860	25.965
Dikurangi impor barang dan jasa	25.688	23.940	21.810	25.500	19.500
<b>PDRB</b>	<b>70.310</b>	<b>71.012</b>	<b>74.380</b>	<b>74.020</b>	<b>73.200</b>

\*) Proyeksi KBI Bandung

## 2. INFLASI

**Tabel 2.A. Perkembangan Inflasi IHK Tahun Dasar 2007 Bulanan (mtm) di Jawa Barat Menurut Kota dan Kelompok Barang dan Jasa Bulan Januari 2009 (%)**

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Ts	
1	Bahan makanan	1,27	-0,06	-0,10	2,71	0,39	0,31	1,66	0,64
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	0,19	0,41	1,38	0,78	0,14	1,20	0,01	0,61
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0,03	-0,05	0,02	0,61	0,11	0,96	0,99	0,12
4	Sandang	0,49	0,10	1,09	0,49	0,88	0,73	1,07	0,56
5	Kesehatan	0,11	0,01	0,22	1,00	0,13	1,30	-0,64	0,22
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	-0,34	0,00	0,12	0,35	0,72	0,10	-0,20	-0,02
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	-3,59	-2,42	-2,22	-9,48	-3,09	-3,46	-2,76	-3,31
<b>Umum</b>		<b>-0,29</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,34</b>	<b>-0,21</b>	<b>0,12</b>	<b>0,43</b>	<b>-0,28</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Keterangan: Bd= Bandung, Bks=Bekasi, Dpk=Depok, Bgr=Bogor, Cn=Cirebon, Skbm=Sukabumi, Ts=Tasikmalaya

**Tabel 2.B. Perkembangan Inflasi IHK Tahun Dasar 2007 Bulanan (mtm) di Jawa Barat Menurut Kota dan Kelompok Barang dan Jasa Bulan Februari 2009 (%)**

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Ts	
1	Bahan makanan	0,86	1,91	1,65	1,85	0,19	1,74	0,57	1,49
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	0,35	0,66	1,24	1,03	1,75	1,31	0,20	0,60
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	-0,03	0,41	-0,85	0,01	2,28	-0,03	0,23	-0,02
4	Sandang	2,44	2,13	2,74	-0,46	3,74	3,95	1,24	2,29
5	Kesehatan	0,04	0,12	0,05	0,24	2,98	0,83	-0,01	0,20
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0,07	0,05	0,00	0,00	0,10	-0,67	1,02	0,03
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	-2,93	-1,10	-4,85	-0,96	2,29	-4,09	-2,07	-2,78
<b>Umum</b>		<b>-0,12</b>	<b>0,59</b>	<b>-0,67</b>	<b>0,60</b>	<b>1,03</b>	<b>0,37</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 2.C Perkembangan Inflasi IHK Tahun Dasar 2007 Bulanan (mtm) di Jawa Barat Menurut Kota dan Kelompok Barang dan Jasa Bulan Maret 2009 (%)**

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Ts	
1	Bahan makanan	0,02	-0,61	-0,02	0,84	0,47	0,45	1,68	-0,09
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	0,85	0,59	1,01	1,07	0,02	0,80	5,98	0,79
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0,05	-0,65	-0,71	0,18	-0,64	3,68	0,79	-0,20
4	Sandang	3,93	0,34	0,27	-0,23	2,15	0,33	2,27	1,54
5	Kesehatan	3,30	0,24	0,15	0,51	0,02	0,16	0,18	1,15
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0,00	0,00	0,25	0,39	0,26	0,74	0,45	0,13
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0,06	0,00	0,03	0,24	0,29	0,08	0,64	0,06
<b>Umum</b>		<b>0,52</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,03</b>	<b>0,53</b>	<b>0,10</b>	<b>1,18</b>	<b>0,25</b>	<b>0,20</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 2.D. Perkembangan Inflasi IHK Tahun Dasar 2007 Triwulanan (qtq) di Jawa Barat Menurut Kota dan Kelompok Barang dan Jasa Triwulan I-2009 (%)**

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Ts	
1	Bahan makanan	2,15	1,24	1,53	5,48	1,06	2,51	0,52	2,06
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	1,40	1,67	3,68	2,90	1,92	3,35	6,20	2,01
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0,05	-0,29	-1,53	0,80	1,74	4,65	2,02	-0,10
4	Sandang	6,98	2,58	4,14	-0,20	6,90	5,06	4,65	4,44
5	Kesehatan	3,46	0,36	0,42	1,76	3,13	2,30	-0,82	1,57
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	-0,27	0,05	0,37	0,73	1,08	0,16	1,27	0,14
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	-6,36	-3,49	-6,93	-10,13	-5,03	-7,34	-4,16	-5,95
<b>Umum</b>		<b>0,11</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,87</b>	<b>0,79</b>	<b>0,91</b>	<b>1,67</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 2.E. Perkembangan Inflasi IHK Tahun Dasar 2007 Tahun Kalender (ytd) di Jawa Barat Menurut Kota dan Kelompok Barang dan Jasa Bulan September 2008 (%)**

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Tsm	
1	Bahan makanan	2,15	1,24	1,53	5,48	1,06	2,51	0,52	2,06
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	1,40	1,67	3,68	2,90	1,92	3,35	6,20	2,01
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0,05	-0,29	-1,53	0,80	1,74	4,65	2,02	-0,10
4	Sandang	6,98	2,58	4,14	-0,20	6,90	5,06	4,65	4,44
5	Kesehatan	3,46	0,36	0,42	1,76	3,13	2,30	-0,82	1,57
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	-0,27	0,05	0,37	0,73	1,08	0,16	1,27	0,14
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	-6,36	-3,49	-6,93	-10,13	-5,03	-7,34	-4,16	-5,95
<b>Umum</b>		<b>0,11</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,87</b>	<b>0,79</b>	<b>0,91</b>	<b>1,67</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

### 3. DATA PERBANKAN

Tabel 3.A. Indikator Bank Umum di Jawa Barat Posisi bulan Desember 2008 (Rp Triliun)

#### Bank Umum Konvensional

Pos Tertentu	2007				2008				2009	Pertumbuhan	
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	q-t-q	y-o-y
Total Aset	118,82	122,65	124,99	136,39	133,59	139,72	145,03	154,91	162,80	5,09%	21,86%
DPK	92,24	95,80	95,91	105,57	101,76	105,98	107,03	117,76	123,03	4,48%	20,90%
Kredit bank pelapor	58,67	62,39	66,03	69,74	70,98	77,92	82,86	87,35	87,58	0,26%	23,39%
Kredit lokasi proyek	102,05	109,46	115,50	122,52	127,22	135,29	147,46	163,33	162,54	-0,48%	27,76%
LDR %	63,60	65,13	68,85	66,06	69,75	73,52	77,42	74,18	71,19		
Rasio NPLs (%)	4,31	4,13	3,92	3,44	3,78	3,63	3,57	3,52	3,99		

Sumber: LBU KBI Bandung

#### Bank Umum Syariah

Indikator	2007				2008				2009	Pertumbuhan	
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	qtq	yoy
Total Aset (Rp Triliun)	3,32	3,41	3,55	4,07	4,10	4,73	4,91	5,25	5,23	-0,38%	27,56%
DPK (Rp Triliun)	2,46	2,5	2,59	3,14	3,21	3,73	3,65	3,97	4,09	3,02%	27,41%
Pembiayaan (Rp Triliun)	2,39	2,56	2,76	2,84	2,84	3,07	3,37	3,43	3,41	-0,58%	19,86%
- FDR (%)	96,97	102,21	106,77	90,34	88,40	82,28	92,21	86,26	86,26		
NPF (%)	6,6	8,2	7,87	5,83	5,63	5,14	4,81	3,55	2,92		

Sumber: LBU KBI Bandung



## DAFTAR ISTILAH

<i>Administered price</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
<i>Imported inflation</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal)
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Pembangunan Manusia	Ukuran kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup, yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
Mtm	Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
<i>Perceived risk</i>	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara
Qtq	<i>Quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
<i>Share effect</i>	Kontribusi pangsa sektor atau subsektor terhadap total PDRB.

<i>Share of Growth</i>	Kontribusi suatu sektor ekonomi terhadap total pertumbuhan PDRB.
<i>Volatile food</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
<i>West Texas Intermediate</i>	Jenis minyak bumi yang menjadi acuan untuk transaksi perdagangan minyak dunia.
Yoy	<i>Year on year</i> . Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.